



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2013–2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 150 ayat (3e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau 2013-2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010– 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006 – 2025;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PULANG PISAU
dan
BUPATI PULANG PISAU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2013 – 2018**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat pada pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
6. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk Periode 20 (dua puluh) Tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Pulang Pisau dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMN.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018; dan
 - b. Pedoman pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam menyusun RKPD.

Pasal 3

SKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra SKPD.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, merupakan lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis;
- e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

- f. BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan;
- g. BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- h. BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan;
- i. BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan
- j. BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Pasal 5

Lampiran sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD dilakukan, apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah,
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah,
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 8

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 7, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan RPJM Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJM Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah melalui RKPD.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Apabila masa jabatan Kepala Daerah berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum tersusun, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan daerah untuk masa 1 (satu) tahun kedepan dapat mengacu kepada program yang tertuang di dalam RPJMD yang ada.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018.

Pasal 12

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 24 Januari 2014

BUPATI PULANG PISAU,

Ttd.

EDY PRATOWO

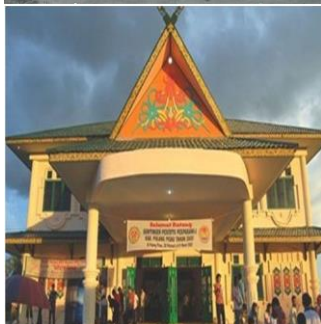
Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 24 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

Ttd.

AFIADIN HUSNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2014 NOMOR 02



LAMPIRAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 02 TAHUN 2014**

TENTANG :

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2013-2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami menyampaikan rasa *syukur* kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 ini telah disusun sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Berpedoman kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2010-2014, maka dokumen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006-2025, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, dan RPJMN Tahun 2010-2014.

Dokumen RPJMD ini disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Periode 2013-2018. Untuk memperkuat substansi Dokumen RPJMD ini, maka dirumuskan pula secara seksama sasaran, strategi, program prioritas, dan arah kebijakan umum. Sebagai sebuah dokumen perencanaan, maka RPJMD masih sangat terbuka terhadap setiap bentuk saran/pendapat dan kritik yang konstruktif, demi perbaikan dan penyempurnaan materi yang terdapat dalam dokumen ini. Terhadap setiap bentuk saran/pendapat dan kritik yang konstruktif dimaksud, akan menjadi sarana untuk penyempurnaan Dokumen RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018.

Akhirnya, dengan mengucapkan *alhamdulillahirobbil'alamin*, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak (*stakeholder*) yang telah membantu menyediakan data dan informasi yang sangat berguna dalam penyusunan dokumen perencanaan 5 tahunan ini. Tanpa dukungan data dan informasi dari berbagai *stakeholder* tersebut, mustahil Dokumen RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 ini dapat tersusun dengan baik. Semoga dokumen ini akan menjadi salah satu sarana mewujudkan visi dan misi demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau yang kita cintai ini.

Pulang Pisau, Januari 2014

BUPATI PULANG PISAU,

H. EDY PRATOWO, S.Sos, MM

KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah sebuah dokumen perencanaan jangka menengah yang sangat penting bagi proses perencanaan dan penganggaran di tataran pemerintahan daerah. Seiring dengan usainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung dengan sangat baik, maka sesuai dengan pengaturan yang berlaku, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih diwajibkan untuk membuat dokumen perencanaan lima tahunan ini.

Selain memandang sebagai suatu kewajiban, kami juga menyadari arti pentingnya RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 – 2018 ini dalam mengarahkan proses pembangunan daerah. Lebih jauh, RPJMD ini dapat menjadi landasan regulasi dalam pelaksanaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah mengatur proses penyusunan RPJMD ini. Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan pembuatan Rancangan Awal RPJMD yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Bappeda sendiri dalam proses penyusunan rancangan awal ini melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sehingga diharapkan dokumen yang disusun memenuhi standar sebuah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

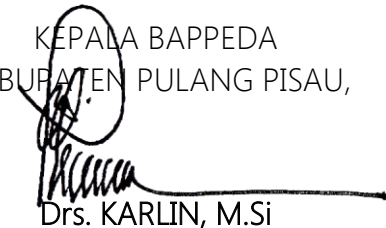
Hasil rancangan awal ini yang konsultasikan dengan publik terlebih dahulu, kemudian dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Pelaksanaan Musrenbang ini

merupakan bagian dari proses perencanaan partisipatif yang dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.

Akhirnya, atas tersusunnya dokumen RPJMD ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih terutama kepada seluruh SKPD, jajaran eksekutif lainnya, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah menunjukkan kepeduliannya atas penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pulang Pisau, Januari 2014

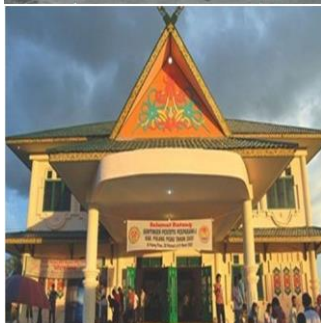
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PULANG PISAU,



Drs. KARLIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19561114 198503 1 005



DAFTAR ISI



Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2013-2018

Kata Pengantar Bupati Kabupaten Pulang Pisau i

Kata Pengantar Kepala Bappeda Kabupaten Pulang Pisau iii

Daftar Isi v

Daftar Tabel vii

Daftar Bagan xiii

Daftar Gambar xiv

Bab I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-2

1.3 Sistematika Penulisan 1-6

1.4 Maksud dan Tujuan 1-8

Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-8

2.3 Aspek Pelayanan Umum II-23

2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-42

2.5 Kinerja Pembangunan Daerah II-44

Bab III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-5

3.3 Kerangka Pendanaan III-12

Bab IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS IV-1

4.1 Permasalahan Pembangunan IV-1

4.2 Isu Strategis IV-2

Bab V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN V-1

5.1 Visi V-1

5.2 Misi V-2

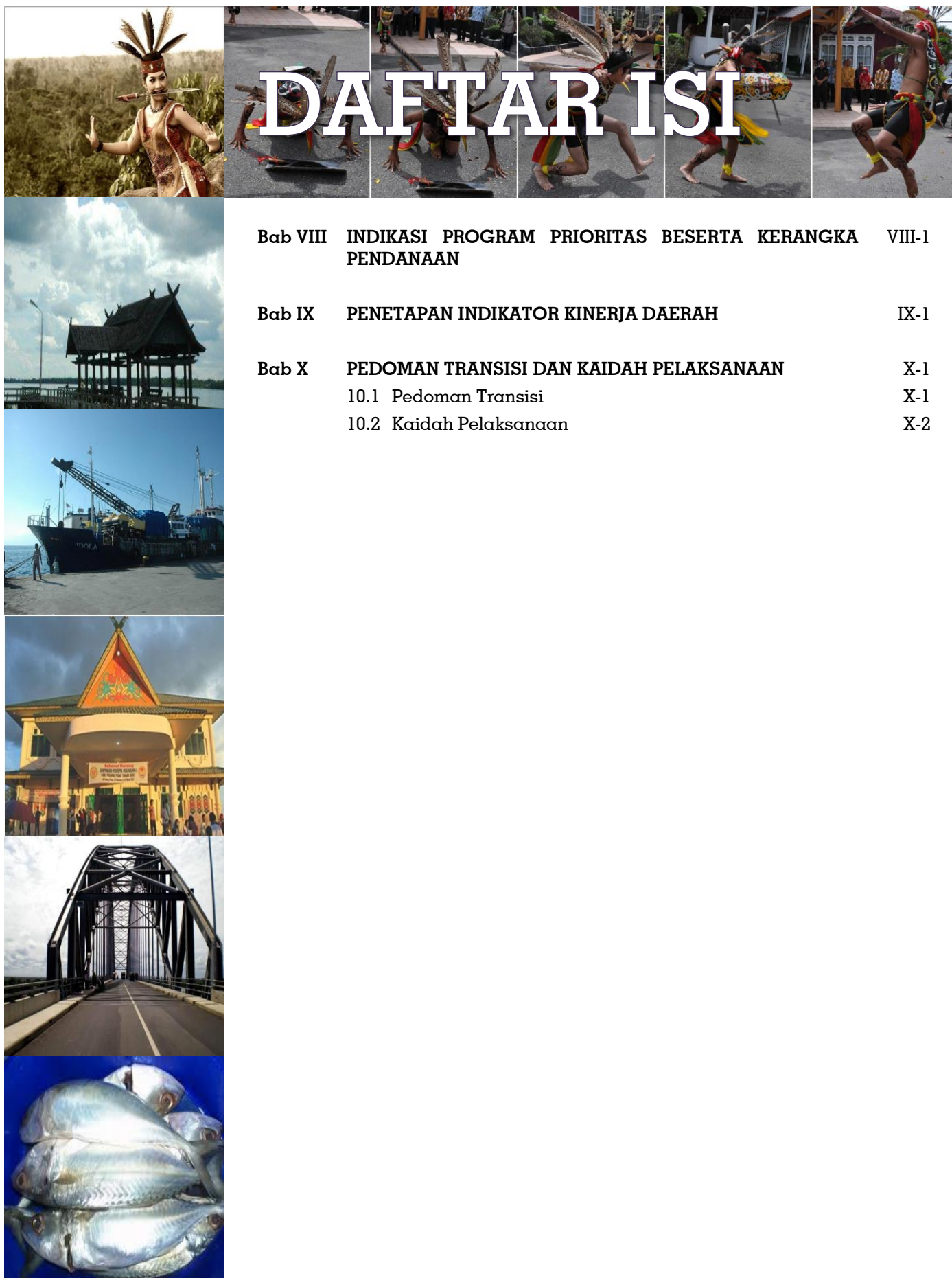
5.3 Tujuan dan Sasaran V-2

Bab VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-1

6.1 Strategi VI-1

6.2 Arah kebijakan VI-6

Bab VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-1



DAFTAR ISI

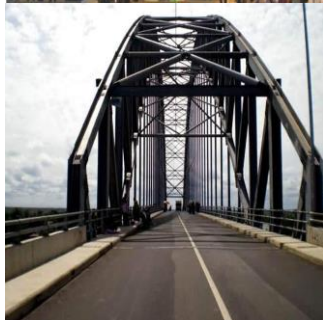
Bab VIII	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA KERANGKA PENDANAAN	VIII-1
Bab IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX-1
Bab X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	X-1
	10.1 Pedoman Transisi	X-1
	10.2 Kaidah Pelaksanaan	X-2

	<h1>DAFTAR TABEL</h1>		
	Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Menurut Kecamatan Tahun 2012	II-2
	Tabel 2.2	Tinggi Ibukota Kecamatan di Atas Permukaan Air Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau	II-4
	Tabel 2.3	Nama Sungai/Anak Sungai Menurut Panjangnya di Kabupaten Pulang Pisau	II-5
	Tabel 2.4	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau	II-7
	Tabel 2.5	Kepadatan Penduduk serta Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2012	II-7
	Tabel 2.6	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pulang Pisau (Jutaan Rupiah)	II-10
	Tabel 2.7	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012 atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Pulang Pisau (Jutaan Rupiah)	II-11
	Tabel 2.8	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Pulang Pisau	II-11
	Tabel 2.9	Location Quotient (LQ) PDRB Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012	II-13
	Tabel 2.10	PDRB per Kapita Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007 – 2011	II-14
	Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase	II-14

 <h1 style="text-align: center;">DAFTAR TABEL</h1>			
	Tabel 2.12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah Tahun 2008-2011	II-16
	Tabel 2.13	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 - 2012	II-19
	Tabel 2.14	Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012	II-22
	Tabel 2.15	Persentase Penduduk Kabupaten Pulang Pisau yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha/ Sektor Tahun 2012	II-22
	Tabel 2.16	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2009-2012	II-24
	Tabel 2.17	Rasio Sekolah terhadap Murid Di Kabupaten Pulang Pisau 2011/2012	II-25
	Tabel 2.18	Rasio Guru terhadap Murid Di Kabupaten Pulang Pisau 2011/2012	II-25
	Tabel 2.19	Rasio Fasilitas Kesehatan Terhadap 1.000 penduduk Tahun 2010-2011	II-26
	Tabel 2.20	Rasio Rumah Sakit Terhadap 1.000 penduduk Tahun 2009-2011	II-27
	Tabel 2.21	Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Terhadap 1.000 penduduk Tahun 2011	II-28
	Tabel 2.22	Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Pulang Pisau	II-28
	Tabel 2.23	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Status Jalan di Kabupaten Pulang Pisau (km) tahun 2011-2012	II-29



Tabel 2.24	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Air Minum Kabupaten Pulang Pisau 2009-2012	II-30
Tabel 2.25	Rumah Tangga Pengguna Listrik	II-31
Tabel 2.26	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Buang Air Besar	II-32
Tabel 2.27	Daftar Wajib KTP, Yang Sudah Perekaman e-KTP, Yang Sudah Dicitak Per Kecamatan di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau	II-32
Tabel 2.28	Rasio Akseptor KB Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011	II-33
Tabel 2.29	Cakupan Peserta KB Aktif Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011	II-34
Tabel 2.30	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Pulang Pisau Tahun 2010-2012	II-35
Tabel 2.31	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2010 – 2012	II-35
Tabel 2.32	Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012	II-36
Tabel 2.33	Jumlah UMKM di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012	II-37
Tabel 2.34	Data Produksi dan Kebutuhan Beras Tahun 2008-2012	II-39
Tabel 2.35	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012	II-41
Tabel 2.36	Kontribusi Sektor Pertambangan & Penggalian Terhadap PDRB Pulang Pisau Tahun 2008-2012	II-41



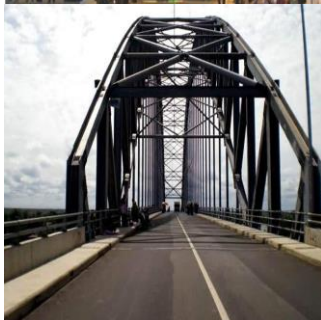
Tabel 2.37	Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel, & Restoran Terhadap PDRB Pulang Pisau Tahun 2008-2012	II-42
Tabel 2.38	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Status Jalan di Kabupaten Pulang Pisau (km) tahun 2011-2012	II-43
Tabel 2.39	Persentase Perkara Pidana yang Tertangani Tahun 2010-2012	II-43
Tabel 2.40	Rasio Ketergantungan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012	II-46
Tabel 2.41	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012	
Tabel 3.1.	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2010-2012	III-2
Tabel 3.2.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2010-2012	III-3
Tabel 3.3.	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2010-2012	III-4
Tabel 3.4.	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2008-2012	III-5
Tabel 3.5.	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2010-2012	III-9
Tabel 3.6.	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2010-2012	III-13



Tabel 3.7.	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2011-2012	III-13
Tabel 3.8.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	III-15
Tabel 3.9.	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2011-2012	III-15
Tabel 3.10.	Defisit Riil dan Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2010-2012	III-16
Tabel 3.11.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2010-2012	III-16
Tabel 3.12.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2014-2018	III-18
Tabel 3.13.	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2014-2018	III-19
Tabel 3.14.	Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2014-2018	III-19
Tabel 3.15.	Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2014-2018	III-20
Tabel 3.16.	Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2014-2018	III-21

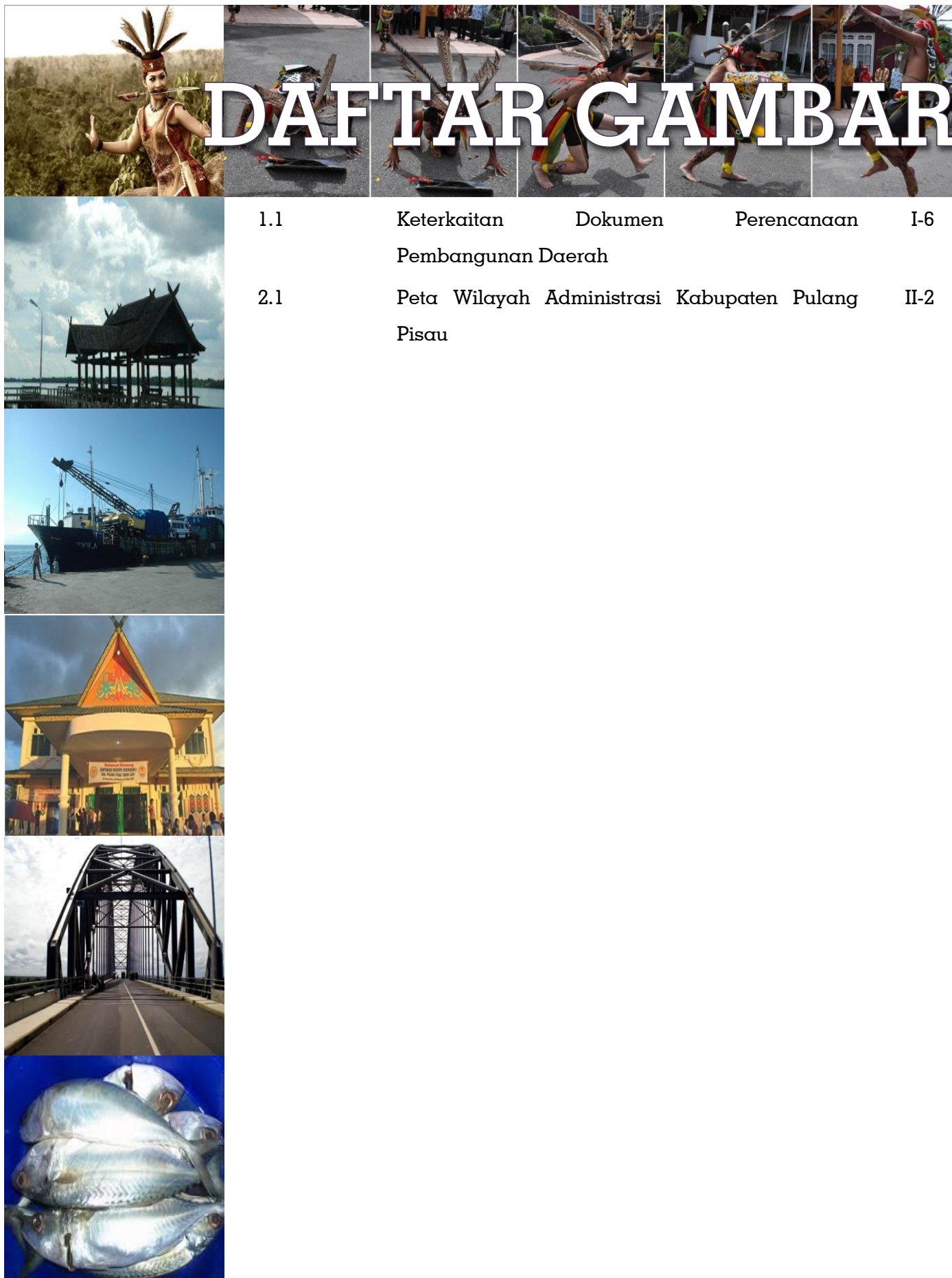


DAFTAR TABEL



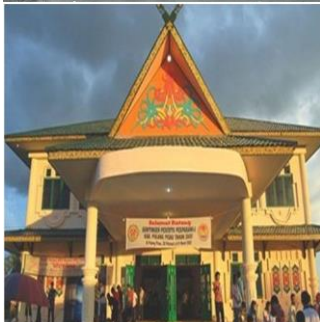
Tabel 3.17.	Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2014-2018	III-21
Tabel 4.1	Identifikasi Kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota Lain	IV-11
Tabel 5.1	Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pulang Pisau	V-4
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, dan Indikator	V-6
Tabel 5.3	Target Tahunan Indikator Sasaran	V-11
Tabel 6.1	Analisis SWOT	VI-3
Tabel 6.2	Sasaran, Indikator, Strategi	VI-4
Tabel 6.3	Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Pulang Pisau	VI-7
Tabel 7.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah	VII-2
Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	VIII-2
Tabel 9.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah	IX-2

	DAFTAR BAGAN		
	Bagan 2.1	Persentase Luas Kecamatan terhadap Luas Pulang Pisau	II-3
	Bagan 2.2	Persentase Penduduk Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	II-8
	Bagan 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012	II-9
	Bagan 2.4	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pulang Pisau 2012	II-12
	Bagan 2.5	Persentase (%) Penduduk dibawah Garis Kemiskinan	II-15
	Bagan 2.6	Angka Melek Huruf Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2010-2012	II-16
	Bagan 2.7	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2011	II-17
	Bagan 2.8	APK Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau 2008 - 2012	II-19
	Bagan 2.9	APM Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau 2008 - 2012	II-20
	Bagan 2.10	Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Keatas Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2012	II-21
	Bagan 2.11	Persentase Penduduk Kabupaten Pulang Pisau yang Bekerja Menurut Sektor Tahun 2012	II-23
	Bagan 2.12	Rasio Sekolah terhadap Murid Di Kabupaten Pulang Pisau 2011/2012	II-25
	Bagan 2.13	Rasio Guru terhadap Murid Di Kabupaten Pulang Pisau 2011/2012	II-26
	Bagan 2.14	Jumlah Koperasi Aktif Aktif Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012	II-36
	Bagan 2.15	Jumlah UMKM di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012	II-37



DAFTAR GAMBAR

- | | |
|-----|---|
| 1.1 | Keterkaitan Dokumen Perencanaan I-6 |
| | Pembangunan Daerah |
| 2.1 | Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pulang Pisau II-2 |



BAB I

PENDAHULUAN



RPJMD KABUPATEN
PULANG PISAU
TAHUN 2013-2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk waktu 5 (lima) tahun serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN. Selanjutnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah bupati/wakil bupati terpilih dilantik, memuat visi, misi dan program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2013-2018 pada tanggal 24 Juli 2013, maka disusun RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Visi pembangunan Pulang Pisau Tahun 2013-2018 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Pulang

Pisau yang Damai, Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera”, selanjutnya akan menjadi pondasi bagi pelaksanaan pembangunan Pulang Pisau 5 (lima) tahun yang akan datang.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 dilaksanakan dengan tahapan: a) Persiapan penyusunan RPJMD, b) Penyusunan rancangan awal RPJMD, c) Penyusunan rancangan RPJMD, d) Pelaksanaan musrenbang RPJMD, e) Perumusan rancangan akhir RPJMD, dan f) Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD. Pelaksanaan tahapan ini dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif dan terpadu, dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif, serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010– 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006 – 2025; dan

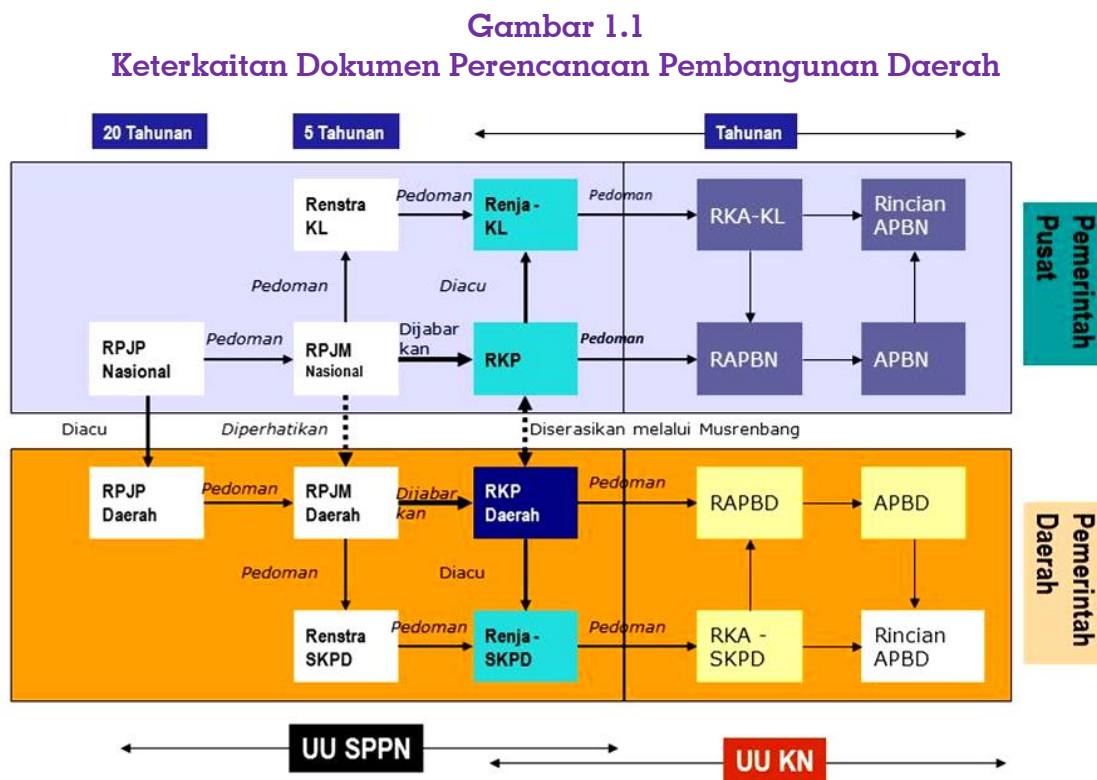
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 dengan dokumen perencanaan lainnya diuraikan sebagai berikut:

- a. RPJMD Pulang Pisau Tahun 2013-2018 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Pulang Pisau Tahun 2006-2025 serta memperhatikan RPJMN Tahun 2010-2014.
- b. RPJMD Pulang Pisau Tahun 2013-2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2013-2018 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pelalawan yang merupakan rencana kerja tahunan.
- c. Keberhasilan pelaksanaan Renstra SKKPD sangat ditentukan oleh pelaksanaan Renja SKPD yang merupakan penjabaran Renstra SKPD Tahun 2013-2018 di perencanaan tahunan masing-masing SKPD.

- d. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. RKPD disusun berpedoman kepada RPJMD dan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Keterhubungan antardokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam kaitannya dengan RPJMD Pulang Pisau 2013-2018 disajikan pada gambar dibawah ini.



1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian RPJMD Pulang Pisau 2013-2018 terdiri dari 10 (sepuluh) bab sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Bab I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Dasar Hukum Penyusunan
1.3	Hubungan Antar Dokumen
1.4	Sistematika Penulisan
1.5	Maksud dan Tujuan
Bab II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1	Aspek Geografi dan Demografi
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3	Aspek Pelayanan Umum
2.4	Aspek Daya Saing Daerah
Bab III	GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.3	Kerangka Pendanaan
Bab IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1	Permasalahan Pembangunan
4.2	Isu Strategis
Bab V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
5.1	Visi
5.2	Misi
5.3	Tujuan dan Sasaran
Bab VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1	Strategi
6.2	Arah kebijakan
Bab VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Bab VIII	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA KERANGKA PENDANAAN
Bab IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Bab X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
10.1	Pedoman Transisi
10.2	Kaidah Pelaksanaan

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

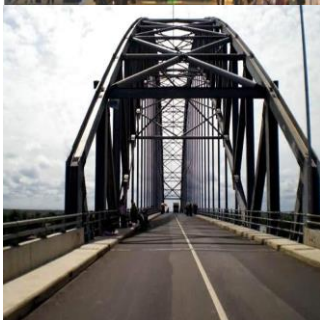
RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih kedalam perencanaan lima tahunan guna memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan.

1.5.2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2013-2018, yaitu:

- a. Mewujudkan visi dan misi Bupati dan Waki Bupati melalui kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan;
- b. Memberikan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD;
- c. Memberikan pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Tahun 2014-2018;
- d. Mewujudkan pembangunan yang mengedepankan *pro poor, pro job, pro growth* dan *pro environment* dengan memperhatikan kearifan lokal;
- e. Menjadi tolok ukur kinerja Bupati dan Waki Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan; dan

Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



RPJMD KABUPATEN
PULANG PISAU
TAHUN 2013-2018

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Aspek geografi memberikan gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Pulang Pisau lima tahun kedepan.

2.1.1. Luas dan Batas Administrasi

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini mempunyai wilayah dengan luas 8.997 km² atau sekitar 5.85% dari luas Kalimantan Tengah (153.564 km²). Wilayah Kabupaten Pulang Pisau terletak di daerah khatulistiwa, yaitu antara 10° sampai 0° Lintang Selatan dan 110° sampai 120° Bujur Timur.

Secara administratif wilayah Kabupaten Pulang Pisau berbatasan dengan :

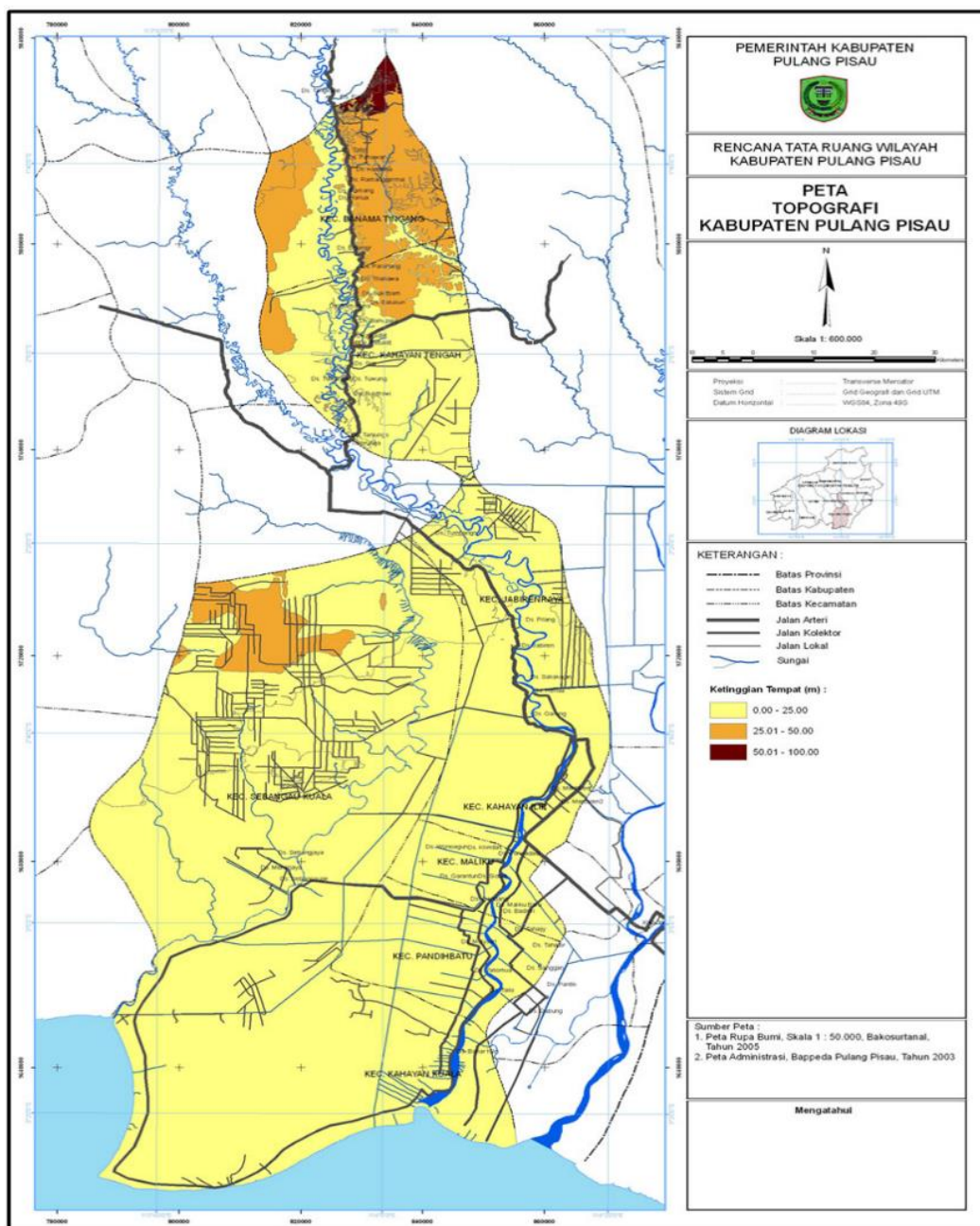
- 1) Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Gunung Mas.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas;
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya;
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau dikepalai oleh Bupati dan Wakil Bupati yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 8 kecamatan yang terdiri dari 95 desa dan 4 kelurahan. Ibukota Kabupaten Pulang Pisau terletak di **Pulang Pisau**.

Peta wilayah administrasi Kabupaten Pulang Pisau disajikan pada Gambar

2.1.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pulang Pisau



Sedangkan untuk luas wilayah masing-masing kecamatan ditampilkan pada Tabel 2.1 dan Bagan 2.1.

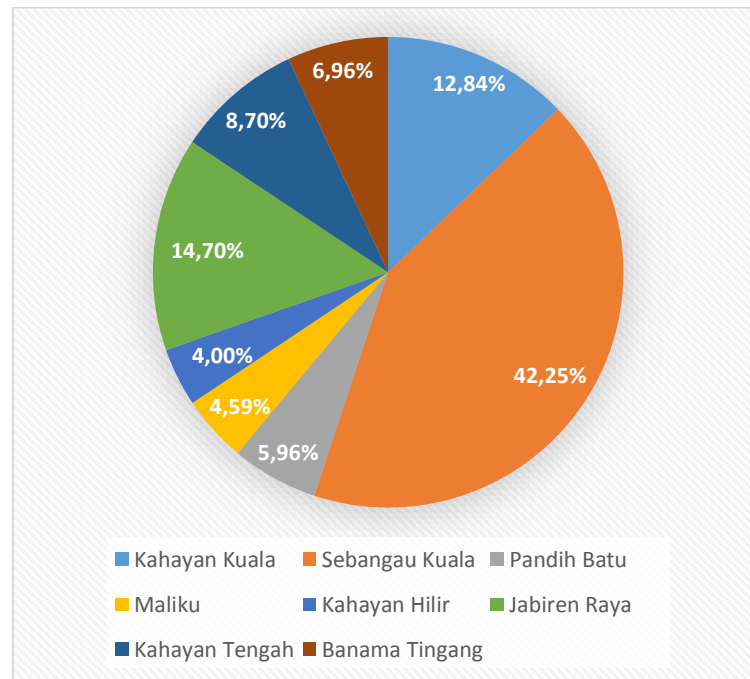
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Menurut Kecamatan Tahun 2012

No.	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ² .)	Persentase (%) terhadap Luas Pulang Pisau	Jumlah Desa/Kelurahan
1.	Kahayan Kuala	Bahaur Basantan	1.155,00	12,84	13
2.	Sebangu Kuala	Sebangu Permai	3.801,00	42,25	8
3.	Pandih Batu	Pangkoh Hilir	535,86	5,96	16
4.	Maliku	Maliku Baru	413,14	4,59	15
5.	Kahayan Hilir	Pulang Pisau	360,00	4,00	10
6.	Jabiren Raya	Jabiren	1.323,00	14,70	8
7.	Kahayan Tengah	Bukit Rawi	783,00	8,70	14
8.	Banama Tingang	Bawan	626,00	6,96	15
Jumlah			8.997	100,00	99

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013

Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sebangu Kuala yaitu seluas 3.801 km² atau 42,25% dari total luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Kahayan Hilir dengan persentase luas 4% dari luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Ditunjukkan oleh Bagan 2.1 berikut.

Bagan 2.1 Persentase Luas Kecamatan terhadap Luas Pulang Pisau



Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013, diolah

2.1.2. Topografi

Kondisi Topografi wilayah Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari:

- 1) Bagian Utara, yang merupakan daerah perbukitan, dengan ketinggian antara 50-100 m dari permukaan air laut, yang mempunyai sudut elevasi 8° - 15° , serta mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan $\pm 15^{\circ}$ - 25°
- 2) Bagian Selatan, terdiri atas pantai/pesisir, rawa dengan ketinggian 0-5 m dari permukaan laut dengan elevasi 0° - 8° serta dipengaruhi oleh pasang surut dan merupakan daerah yang mempunyai intensitas banjir yang cukup besar. Kabupaten Pulang Pisau memiliki perairan yang meliputi danau, rawa-rawa, dan dilintasi jalur sungai besar, yaitu Sungai Kahayan dan Sungai Sebangau.

Ketinggian wilayah Kabupaten Pulang Pisau bervariasi antara 0 – 100 meter dari permukaan laut. Ada 6 (enam) kecamatan yang terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian 0 - 25 meter di atas permukaan air laut (dpl), yaitu Kecamatan Kahayan Kuala, Kecamatan Sebangau Kuala, Kecamatan Pandih Batu, Kecamatan Maliku, Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Jabiren Raya. Dua kecamatan lainnya berada pada ketinggian 25 – 100 meter di atas permukaan laut

(dpl), yaitu Kecamatan Kahayan Tengah dan Kecamatan Banama Tingang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.2 Tinggi Ibukota Kecamatan di Atas Permukaan Air Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi Rata-Rata dpl (m)
1	Kahayan Kuala	Bahaur Basantan	0-25
2	Sebangu Kuala	Sebangu Permai	0-25
3	Pandih Batu	Pangkoh Hilir	0-25
4	Maliku	Maliku Baru	0-25
5	Kahayan Hilir	Pulang Pisau	0-25
6	Jabiren Raya	Jabiren	0-25
7	Kahayan Tengah	Bukit Rawi	25-50
8	Banama Tingang	Bawan	50-100

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013

2.1.3. Geologi dan Tanah

Berdasarkan peta **geologi** formasi geologi yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, tersusun atas formasi aluvium *Qa) yang terbentuk sejak zaman Holosen dan formasi Batuan Api (Trv). Formasi Aluvium (Qa) merupakan formasi yang tersusun dari bahan-bahan liat kaolinit dan debu bersisipan pasir, gambut, kerakal dan bongkahan lepas, merupakan endapan sungai dan rawa. Sementara formasi Batuan Gunung Api (Trv) merupakan formasi yang tersusun dari batuan breksi gunung api berwarna kelabu kehijauan dengan komponennya terdiri dari andesit, basal dan rijang. Bahan-bahan ini terkumpul dengan basal yang berwarna coklat kemerahan.

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau juga mengikuti pola kondisi topografinya. Di bagian Selatan, jenis tanah yang dominan adalah tanah gambut dan tanah aluvial, terutama pada bagian Selatan Kabupaten Pulang Pisau yang kondisi drainasenya kurang bagus. Sedangkan jenis tanah yang ada di bagian utara didominasi tanah podsoil dan aluvial. Pada daerah-daerah pinggir sungai umumnya didominasi oleh tanah aluvial yang berasal dari endapan sungai.

2.1.4. Hidrologi

Kabupaten Pulang Pisau memiliki perairan yang meliputi danau, rawa-rawa, dan dilintasi jalur sungai. Sungai yang termasuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau, yaitu :

- Sungai Kahayan dengan panjang ± 600 km;
- Sungai Sebangau dengan panjang ± 180 km;
- Sungai Anjir Kalampan dengan panjang $\pm 14,6$ km, yang menghubungkan Mandomai Kecamatan Kapuas Barat (Kabupaten Kapuas) dan Pulang Pisau mengarah ke Palangka Raya. Sungai Anjir Kalampan yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau sepanjang $\pm 6,5$ km;
- Sungai Anjir Basarang dengan panjang ± 24 km, menghubungkan Kuala Kapuas (Kabupaten Kapuas) dengan wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Sungai Anjir Basarang yang masuk Wilayah Kabupaten Pulang Pisau sepanjang ± 7 km;
- Sungai Terusan Raya dengan panjang ± 18 km yang menjadi jalur transportasi sungai dari Kuala Kapuas ke Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala melalui Terusan Batu. Sungai Terusan Raya yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau sepanjang ± 6 km;
- Daerah pantai / pesisir Laut dengan bentangan pantai sepanjang $\pm 153,4$ km dari timur ke barat.

Tabel 2.3 Nama Sungai Menurut Panjangnya di Kabupaten Pulang Pisau

No	Nama Sungai	Panjang (km)
1	Sungai Kahayan	626,00
2	Sungai Sebangau	180,00
3	Sungai Anjir Kalampan	6,50
4	Sungai Anjir Basarang	7,00
5	Sungai Terusan Raya	6,00

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013

2.1.5. Klimatologi

Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya termasuk daerah yang beriklim tropis dengan kelembaban yang cukup tinggi, suhu udara berkisar antara $26,5^{\circ}\text{C}$ – $27,5^{\circ}\text{C}$

dengan suhu rata-rata maksimum 32,5°C dan minimum 22,9°C. Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Kabupaten Pulang Pisau rata-rata mendapat penyinaran matahari diatas 50%. Berdasarkan klasifikasi Oldeman (1975), tipe iklim wilayah Kabupaten Pulang Pisau termasuk tipe iklim B1, yaitu wilayah dengan bulan basah terjadi antara 7 – 9 bulan (curah hujan > 200 mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan < 100 mm/bulan kurang dari 2 bulan. Hujan terjadi hampir sepanjang tahun dan curah hujan terbanyak jatuh pada bulan Oktober - Desember serta Januari - Maret yang berkisar antara 2.000 – 3.500 mm setiap tahun, sedangkan bulan kering jatuh pada bulan Juni – September.

2.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.6.1 Pola Penggunaan Lahan Areal Hutan

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013, penggunaan lahan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2002 untuk Kawasan Hutan adalah seluas 5.095 km², dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kawasan Hutan lindung dengan Luas : 1.961 km²
- 2) Kawasan Hutan gambut dengan Luas : 2.789 km²
- 3) Kawasan mangrove (bakau) dengan Luas: 280 km²
- 4) Kawasan air hitam dengan Luas : 65 km²

2.1.6.2 Pola Penggunaan Lahan Areal Budidaya (Non Hutan)

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013, penggunaan lahan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2002 untuk Kawasan Budidaya adalah seluas 3.902 km², dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Hutan produksi : 369 km²
- 2) Hutan produksi tetap : 753 km²
- 3) Pertanian ladang basah (sawah) : 404 km²

4) Perkebunan dan peternakan	: 1.384 km ²
5) Pemukiman perkotaan	: 46 km ²
6) Pemukiman transmigrasi	: 99 km ²
7) Perairan dan sungai	: 492 km ²
8) Jaringan jalan	: 16 km ²

2.1.7. Demografi

2.1.7.1 Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Pulang Pisau

Pada tahun 2012 penduduk Kabupaten Pulang Pisau berjumlah 122.511 jiwa, yang terdiri atas 63.699 laki-laki dan 58.812 perempuan. Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Maluku adalah dua kecamatan dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 26.813 jiwa dan 23.374 jiwa.

Dengan luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau sekitar 8.997 kilometer persegi yang didiami oleh 122.511 orang, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Pulang Pisau adalah sebanyak 14 orang per kilometer persegi. Dilihat dari distribusi penduduk menurut kecamatan, kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Kahayan Hilir yaitu 74 penduduk per km², diikuti Kecamatan Maluku sebanyak 57 penduduk per km². Sementara kecamatan dengan kepadatan terendah Kecamatan adalah Sebangau Kuala, hanya 2 penduduk per km². (Lihat Tabel 2.4).

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per (Km ²)
1	Kahayan Kuala	1.155	20.175	17
2	Sebangau Kuala	3.801	8.024	2
3	Pandih Batu	535,86	20.155	38
4	Maliku	413,14	23.374	57
5	Kahayan Hilir	360,00	26.813	74
6	Jabiren Raya	1.323,00	7.912	6
7	Kahayan Tengah	783,00	7.515	10
8	Banama Tingang	626,00	8.543	14
Jumlah Total		8.997	122.511	14
Tahun 2011			122.073	
Tahun 2010			119.983	

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013

2.1.7.2 Sex Ratio

Penduduk Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari laki-laki 63.699 jiwa dan perempuan 58.812 jiwa dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 108. Dengan demikian, terdapat 108 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan, dan kepadatan penduduk (*density*) mencapai 14 jiwa per km². (Lihat Tabel 2.5)

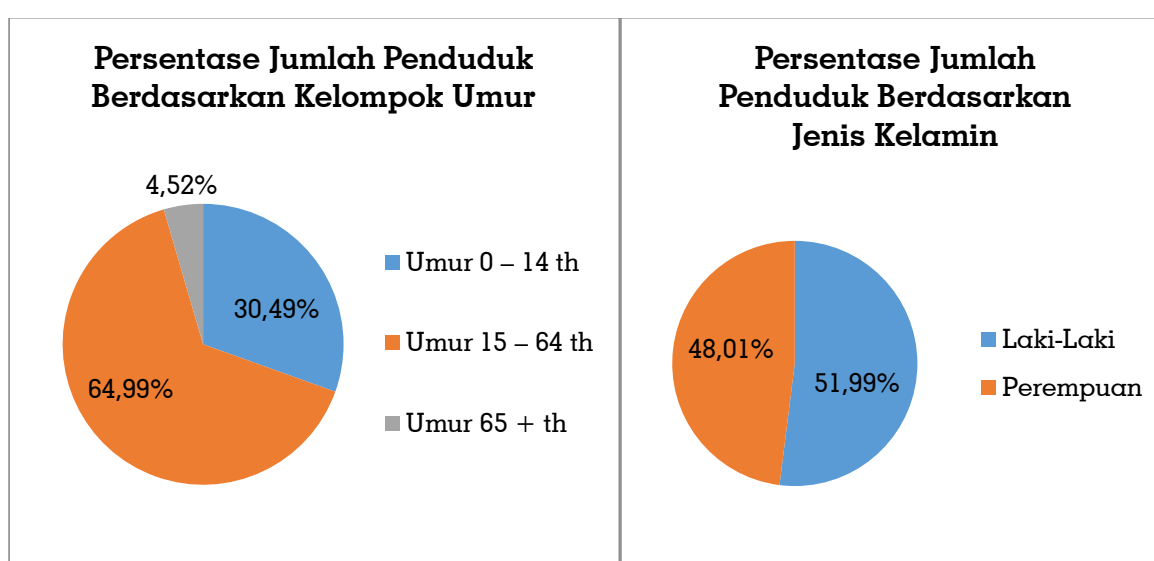
Dilihat dari kelompok umur selama tahun 2012, usia produktif (15 – 64 tahun) masih mendominasi rata-rata sebesar 64,99%, sedangkan usia 0 – 14 tahun mencapai 30,49% dan penduduk usia lebih dari 65 tahun sekitar 4,52%. Kepadatan penduduk dan jumlahnya berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Bagan 2.2.

Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk serta Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2012

Tahun		Kelompok Umur			Jenis Kelamin			Jmlh	Kepadatan Penduduk
		0 – 14	15 – 64	65 +	Laki-Laki	Perempuan	Rasio		(Jiwa/km ²)
2012	Jiwa	37.350	79.624	5.537	63.699	58.812	108	122.511	14
	%	30,49	64,99	4,52	51,99	48,01		100,00	

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013, diolah

Bagan 2.2 Persentase Penduduk Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin



Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013, diolah

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Pulang Pisau, ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup: masalah pertumbuhan ekonomi, perkembangan PDRB sektoral, struktur perekonomian, inflasi, perkembangan PDRB per kelompok sektor, pendapatan per kapita; produktifitas tenaga kerja, PDRB menurut penggunaan, dan gambaran singkat sektor.

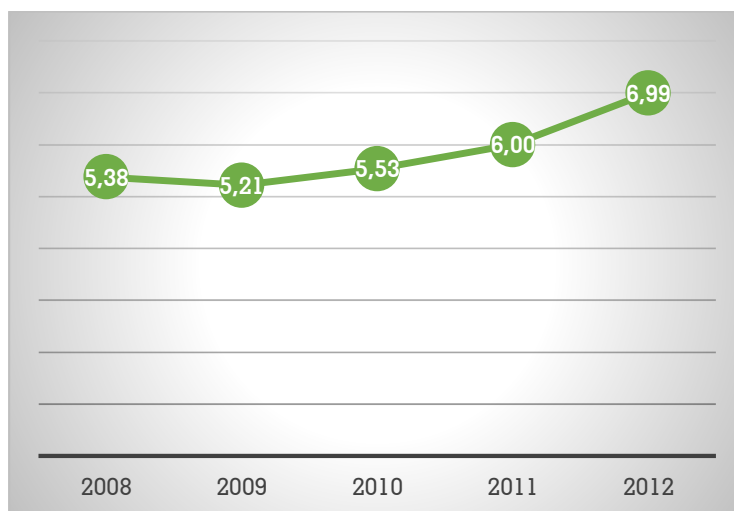
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB Regional

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder*, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Karena itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduknya merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambarkan melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi regional sangat erat hubungannya dengan masing-masing sektor yang membentuknya. Hal ini berkaitan erat dengan kontribusi masing-masing sektor yang berpotensi besar maupun sektor-sektor yang masih perlu mendapat perhatian lebih untuk dijadikan prioritas pengembangan sehingga diharapkan dapat menjadi sektor yang mempunyai peranan lebih besar dimasa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan pemerataan yang sebaik mungkin.

Seiring dengan membaiknya perekonomian nasional pasca krisis global tahun 2008, perekonomian Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2009-2012 tumbuh realtif stabil dan menunjukkan tren meningkat.

Bagan 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012



Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2012

Laju pertumbuhan PDRB tahun 2012 sebesar 6,99%. Sumbangan terbesar PDRB tahun 2012 atas dasar Harga Berlaku adalah dari sektor pertanian yaitu sebesar Rp 975.201,84 juta dan atas dasar Harga Konstan (tahun 2000) sebesar Rp 454.450,22 juta. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2008-2012 berfluktuasi dan ada kecenderungan meningkat dari 5,38% menjadi 6,99%. Akan tetapi pada tahun 2008-2009, laju pertumbuhan ekonomi turun dari 5,38% menjadi 5,21% (dampak krisis global).

Walaupun berfluktuasi, pertumbuhan ekonomi masih positif. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2008-2012 tingkat perekonomian di Kabupaten Pulang Pisau terus meningkat setiap tahun.

2.2.1.2. Pertumbuhan PDRB Sektoral

Indikator umum yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. PDRB ada dua macam, yaitu **PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga (ADH) Berlaku** dan **PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga (ADH) Konstan**.

PDRB Kabupaten Pulang Pisau dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Perkembangan PDRB secara sektoral tahun 2008 dan 2012 dilihat dari laju pertumbuhan sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.6, Tabel 2.7, dan Tabel 2.8 berikut.

**Tabel 2.6 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012
atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pulang Pisau (Jutaan Rupiah)**

No	Sektor	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Pertanian	578.014,89	650.073,06	743.337,42	841.621,96	975.201,84
2	Pertambangan & penggalian	2.736,77	3.082,16	3.453,97	3.918,33	4.360,33
3	Industri pengolahan	58.278,01	63.535,60	70.401,20	76.856,22	82.609,98
4	Listrik, gas & air bersih	3.879,79	4.330,40	4.837,56	5.383,79	6.036,79
5	Konstruksi	76.743,02	83.811,59	91.083,85	105.240,51	125.586,33
6	Perdagangan, hotel & restoran	162.864,39	174.780,20	199.946,63	226.168,45	251.814,40
7	Pengangkutan & komunikasi	27.597,41	29.586,82	32.287,99	34.870,30	38.582,07
8	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	22.081,90	22.489,68	23.020,50	24.498,98	26.745,85
9	Jasa-jasa	98.582,85	110.218,34	125.872,38	146.743,51	166.902,11
PDRB		1.030.779,03	1.141.907,85	1.294.241,50	1.465.302,05	1.677.839,70

Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2012

Analisis atas dasar harga berlaku (ADHB) berguna untuk mengetahui situasi perekonomian jangka pendek, misalnya pengaruh harga pada tahun tertentu. Dari pengamatan terhadap PDRB ADHB selama periode 2008-2012 pada masing-masing sektor (Tabel 2.6), terlihat bahwa nilai sektor pertanian selalu terbesar dibandingkan dengan nilai sektor lainnya. Nilai sektor ADHB terbesar kedua pada tahun 2012 adalah sektor perdagangan, hotel, & restoran. Sedangkan nilai terendah ADHB pada tahun 2012 adalah sektor pertambangan dan penggalian.

**Tabel 2.7 Persentase Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012
atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pulang Pisau (Jutaan Rupiah)**

Sektor	Tahun				
	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
Pertanian	56,08	56,93	57,43	57,44	58,12
Pertambangan & penggalian	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26
Industri pengolahan	5,65	5,56	5,44	5,25	4,92
Listrik,gas & air bersih	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36
Konstruksi	7,45	7,34	7,04	7,18	7,49
Perdagangan, hotel & restoran	15,80	15,31	15,45	15,43	15,01
Pengangkutan & komunikasi	2,68	2,59	2,49	2,38	2,30
Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	2,14	1,97	1,78	1,67	1,59
Jasa-jasa	9,56	9,65	9,73	10,01	9,95
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2012, diolah

Tabel 2.7 menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB ADHB Kabupaten Pulang Pisau selama kurun waktu tahun 2008-2012. Persentasenya terus mengalami peningkatan setiap tahun. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua yaitu sektor perdagangan, hotel, & restoran walaupun jumlahnya cenderung fluktuatif.

**Tabel 2.8 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012
atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Pulang Pisau (Jutaan Rupiah)**

No	Sektor	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Pertanian	362.466,38	381.200,38	403.357,64	423.194,09	454.450,22
2	Pertambangan & penggalian	1.512,66	1.600,05	1.677,69	1.794,02	1.942,37
3	Industri pengolahan	40.560,52	42.756,73	44.320,95	46.519,27	48.781,44
4	Listrik,gas & air bersih	1.681,67	1.713,20	1.771,18	1.841,36	1.980,06
5	Konstruksi	57.521,92	61.409,65	65.098,95	71.411,66	78.478,41
6	Perdagangan, hotel & restoran	118.961,92	125.714,78	132.839,59	142.856,90	151.101,18
7	Pengangkutan & komunikasi	13.365,99	13.577,92	13.874,75	14.090,82	14.563,63
8	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	14.446,22	14.590,51	14.790,04	15.558,40	15.848,98
9	Jasa-jasa	55.880,83	58.584,65	62.223,73	67.073,43	72.044,01
	PDRB	666.398,11	701.147,87	739.954,52	784.339,95	839.190,30

Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2012

Analisis atas dasar harga konstan (ADHK) 2000 memberikan gambaran mengenai pola perkembangan secara riil dan bermanfaat untuk memperkirakan kecenderungan perkembangan PDRB di masa mendatang. Dari

pengamatan terhadap PDRB ADHK selama kurun waktu 2008-2012 pada masing-masing sektor (Tabel 2.8), terlihat bahwa nilai sektor pertanian selalu terbesar dibandingkan dengan nilai sektor lainnya. Nilai sektor ADHK 2000 terbesar kedua pada tahun 2012 adalah sektor perdagangan, hotel, & restoran. Sedangkan nilai terendah ADHK 2000 pada tahun 2012 adalah sektor pertambangan dan penggalian.

**Tabel 2.9 Persentase Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012
atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Pulang Pisau (Jutaan Rupiah)**

Sektor	Tahun				
	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2013 (%)
Pertanian	54,39	54,37	54,51	53,96	54,15
Pertambangan & penggalian	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Industri pengolahan	6,09	6,10	5,99	5,93	5,81
Listrik,gas & air bersih	0,25	0,24	0,24	0,23	0,24
Konstruksi	8,63	8,76	8,80	9,10	9,35
Perdagangan, hotel & restoran	17,85	17,93	17,95	18,21	18,01
Pengangkutan & komunikasi	2,01	1,94	1,88	1,80	1,74
Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	2,17	2,08	2,00	1,98	1,89
Jasa-jasa	8,39	8,36	8,41	8,55	8,58
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2012, diolah

Demikian halnya dengan PDRB ADHK 2000, sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar selama kurun waktu tahun 2008-2012, walaupun jumlahnya cenderung fluktuatif. Sementara sektor perdagangan, hotel, & restoran berada di urutan kedua dalam memberikan kontribusi PDRB Kabupaten Pulang Pisau.

**Tabel 2.10 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Pulang
Pisau**

No	Sektor	2008		2009		2010		2011		2012	
		Hb %	Hk %	Hb %	Hk %	Hb %	Hk %	Hb %	Hk %	Hb %	Hk %
1	Pertanian	11,50	3,66	12,47	5,17	14,35	5,81	13,22	4,92	15,87	7,39
2	Pertambangan & penggalian	10,66	5,50	12,62	5,78	12,06	4,85	13,44	6,93	11,28	8,27
3	Industri pengolahan	10,84	6,93	9,02	5,41	10,81	3,66	9,17	4,96	7,49	4,86
4	Listrik, gas & air bersih	8,54	3,25	11,61	1,87	11,71	3,38	11,29	3,96	12,13	7,53
5	Konstruksi	9,87	9,07	9,21	6,76	8,68	6,01	15,54	9,70	19,33	9,90
6	Perdagangan, hotel, & restoran	11,07	8,08	7,32	5,68	14,40	5,67	13,11	7,54	11,34	5,77
7	Pengangkutan & komunikasi	6,81	1,58	7,21	1,59	9,13	2,19	8,00	1,56	10,64	3,36
8	Keuangan, sewa, & jasa perusahaan	7,65	1,04	1,85	1,00	2,36	1,37	6,42	5,20	9,17	1,87
9	Jasa-jasa	18,91	8,62	11,80	4,84	14,20	6,21	16,58	7,79	13,74	7,41
PDRB		11,71	5,38	10,78	5,21	13,34	5,53	13,22	6,00	14,50	6,99

Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2012

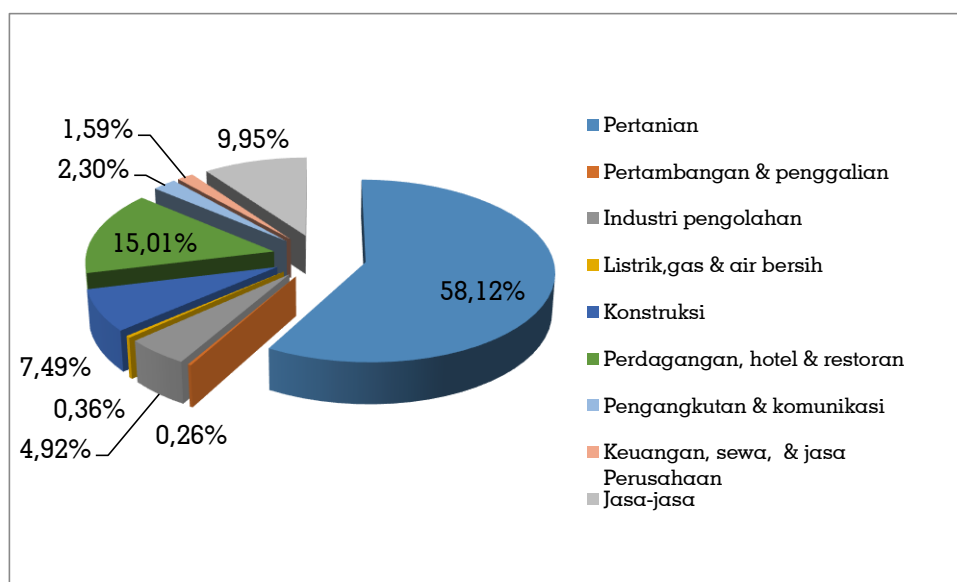
Berdasarkan Tabel 2.10 dapat diketahui bahwa sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi tahun 2012 terjadi pada sektor konstruksi sebesar 9,90%, diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 8,27% dan sektor listrik, gas & air bersih sebesar 7,53%. Pertumbuhan sektor konstruksi menjadi terbesar pada tahun 2012 dikarenakan pada tahun 2012 berlangsung kegiatan konstruksi berupa pelebaran dan penambahan Jembatan Tumbang Nusa, pembangunan pelabuhan Kahayan Kuala, dan kegiatan-kegiatan konstruksi lainnya.

2.2.1.3. Struktur Perekonomian

Beralihnya struktur lapangan usaha sebagian masyarakat dari suatu sektor ke sektor ekonomi lainnya dapat terlihat dari besarnya peranan masing-masing sektor terhadap PDRB. Perekonomian Indonesia sendiri telah mengalami pergerakan/pergeseran struktur selama beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari peranan sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian nasional mulai digeser peranannya oleh sektor industri pengolahan.

Namun hal ini tidak berlaku untuk Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Pulang Pisau, justru sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dan menjadi andalan utama dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Pulang Pisau. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB.

Bagan 2.4 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pulang Pisau 2012



Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2012

Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang mempunyai peranan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pulang Pisau tahun 2012, yaitu sebesar 58,12%. Kemudian sektor perdagangan, hotel, & restoran sebesar 15,01%, sektor jasa-jasa sebesar 9,95%, dan sektor konstruksi sebesar 7,49%. Sektor industri pengolahan 4,92%, sektor pengangkutan & komunikasi sebesar 2,30%, sektor keuangan, sewa, & jasa perusahaan sebesar 1,59%, sektor listrik, gas, & air bersih sebesar 0,36% dan sektor yang paling sedikit dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Pulang Pisau tahun 2012 yaitu sektor pertambangan & penggalian sebesar 0,26%.

2.2.1.4. Perkembangan PDRB per Kelompok Sektor

Indeks *Location Quotient* (LQ) merupakan salah satu analisis untuk mengetahui sektor unggulan di suatu wilayah. LQ dapat digunakan untuk melihat sektor-sektor yang berpotensi di suatu daerah untuk dikembangkan, yang memungkinkan dapat menjadi tumpuan perekonomian suatu daerah.

Tabel 2.11 *Location Quotient (LQ) PDRB Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012*

Sektor	Analisa LQ
1 Pertanian	1,86
2 Pertambangan & Penggalian	0,02
3 Industri Pengolahan	0,81
4 Listrik, Gas & Air Bersih	0,51
5 Bangunan/konstruksi	1,61
6 Perdagangan, Hotel & Restoran	0,95
7 Pengangkutan & Komunikasi	0,22
8 Keuangan, persewaan, & js. Prsh.	0,28
9 Jasa-Jasa	0,66
Total	1,00

Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2012

Sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Pulang Pisau yang mempunyai nilai *Location Quotient* (LQ) cukup besar yaitu sektor pertanian (1,86) dan sektor konstruksi (1,61). Hal ini berarti bahwa dua sektor tersebut merupakan sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten Pulang Pisau untuk dapat dioptimalkan pengelolaannya.

2.2.1.5. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Indikator ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan daerah dengan kata lain semakin tinggi/besar pendapatan perkapitanya maka semakin makmur daerah tersebut.

PDRB per kapita dapat diukur menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu PDRB atas harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk,

sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

Tabel 2.12 PDRB per Kapita Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007 – 2011

Tahun	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah)	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 (rupiah)
2007	7.373.445,02	5.053.184,75
2008	8.206.908,19	5.305.761,91
2009	9.538.154,47	5.856.564,31
2010	10.779.776,27	6.163.103,33
2011	12.003.489,99	6.425.171,54

Sumber: Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulang Pisau 2012

PDRB per kapita adalah salah satu pendekatan untuk pendapatan per kapita. Nilai PDRB per Kapita Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2007-2011 cenderung meningkat baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2000, yaitu untuk nilai atas dasar harga berlaku dari Rp 7.373.445,02 (tahun 2007) menjadi Rp 12.003.489,99 (tahun 2011) dan untuk nilai atas dasar konstan 2000 dari Rp 5.053.184,75 (tahun 2007) menjadi Rp 6.425.171,54 (tahun 2011). PDRB per Kapita yang meningkat dari tahun ke tahun memberikan gambaran bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan cukup berhasil dan mampu menghasilkan kemajuan perekonomian Kabupaten Pulang Pisau.

2.2.1.6. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Indikator persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah indikator yang menggambarkan rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku secara nasional. Proses pembangunan yang dinilai cukup berhasil dan mampu menghasilkan kemajuan perekonomian Kabupaten Pulang Pisau tentunya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Indikasi peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau.

**Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan
2009-2012**

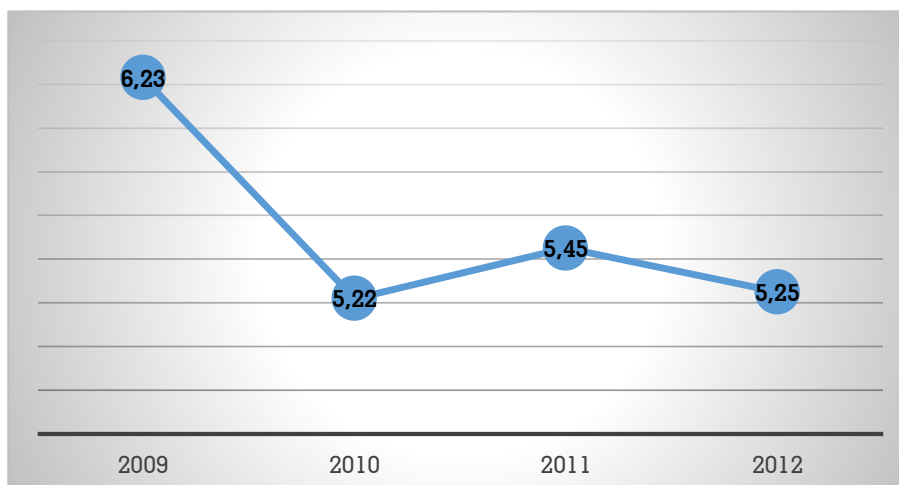
Tahun

Deskripsi	2009	2010	2011	2012
Jumlah Penduduk Miskin	8.669	7.419	6.690	6.340
Persentase Kemiskinan (%)	6,23	5,22	5,45	5,25

Sumber: *Profil Kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau 2013*

Berdasarkan Bagan 2.5 dan Tabel 2.13 tingkat kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2009-2012 berfluktuasi dan ada kecenderungan menurun, yaitu dari 6,23% tahun 2009 menjadi 5,25% tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan memberikan hasil yang positif, yaitu dengan menurunnya tingkat kemiskinan.

Bagan 2.5 Persentase (%) Penduduk dibawah Garis Kemiskinan



Sumber: *Profil Kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*

Tingkat kemiskinan pada tahun 2012 sebesar 2,25, yang artinya bahwa dari 100 penduduk Kabupaten Pulang Pisau tahun 2012 terdapat 5 orang yang berada di bawah garis kemiskinan.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Identifikasi/pemahaman tentang kondisi kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek. Dari berbagai macam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat

adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dalam konteks kesejahteraan sosial. Jika diperhatikan pada Tabel 2.12, selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, IPM Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan peningkatan, yakni dari 70,63 pada tahun 2008 meningkat menjadi 71,18 pada tahun 2009, 71,53 pada 2010, dan 72,37 pada tahun 2011. Meskipun memiliki trend meningkat, namun IPM Kabupaten Pulang Pisau jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Tengah ataupun dengan rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Tengah adalah yang paling rendah selama kurun waktu 2008-2011. Ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil pembangunan yang menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau belumlah maksimal.

Tabel 2.14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah Tahun 2008-2011

No	Wilayah	2008	2009	2010	2011
1	Kotawaringin Barat	72.86	73.30	73.79	74.19
2	Kotawaringin timur	73.36	73.97	74.34	74.74
3	Kapuas	72.89	73.22	73.60	74.00
4	Barito Selatan	72.96	73.29	73.60	74.01
5	Barito Utara	74.57	74.85	75.15	75.50
6	Sukamara	71.00	71.62	71.98	72.42
7	Lamandau	71.98	72.08	72.32	72.74
8	Seruyan	72.00	72.28	72.55	72.93
9	Katingan	72.06	72.33	72.65	73.32
10	Pulang Pisau	70.63	71.18	71.53	72.37
11	Gunung Mas	72.85	73.13	73.43	73.73
12	Barito Timur	72.17	72.72	73.00	73.33
13	Murung Raya	72.18	72.46	72.84	73.34
14	Kota Palangka Raya	77.90	78.02	78.30	78.78
15	KALTENG	73.88	74.36	74.64	75.06

Sumber: <http://kalteng.bps.go.id/ipm.html>

2.2.2.2. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Pada tingkat makro, ukuran yang sangat mendasar dari pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis yang lebih dikenal dengan Angka Melek Huruf. Manfaat perhitungan angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf.

Bagan 2.6 Angka Melek Huruf Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2010-2012



Sumber: Profil Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pulang Pisau 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

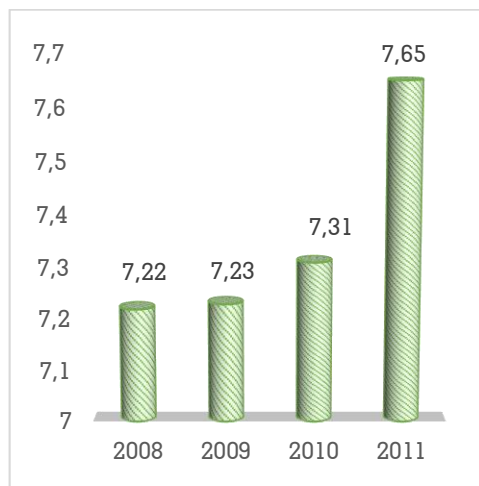
Angka melek huruf penduduk Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2010-2012 cenderung meningkat dari 94,32% pada tahun 2010 menjadi 96,23% pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa program wajib belajar di Kabupaten Pulang Pisau telah memberikan kontribusi dalam mengurangi angka buta huruf selama tahun 2010-2012.

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk

sekolah dasar diusia yang lebih muda atau lebih tua. Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang.

Bagan 2.7 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2011



Sumber: <http://kalteng.bps.go.id/ipm.html>

Berdasarkan Bagan 2.7, dapat diketahui bahwa angka rata-rata lama sekolah di Pulang Pisau selama kurun waktu 2008 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan, yaitu dari 7,22 pada tahun 2008 menjadi 7,65 pada tahun 2011. Nilai rata-rata lama sekolah menunjukkan tingginya tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah. Pada tahun 2011 nilai rata-rata lama sekolah sebesar 7,65 yang artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Pulang Pisau bersekolah sampai 7 tahun 7 bulan atau SMP. Meskipun angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan, namun rata-rata lama sekolah penduduk yang 7 tahun 7 bulan menunjukkan bahwa penduduk di Pulang Pisau belum memiliki kesadaran pendidikan yang tinggi.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) memberikan gambaran secara umum tentang banyak anak yang sedang/telah menerima pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan.

**Tabel 2.15 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Pulang Pisau 2008 - 2012**

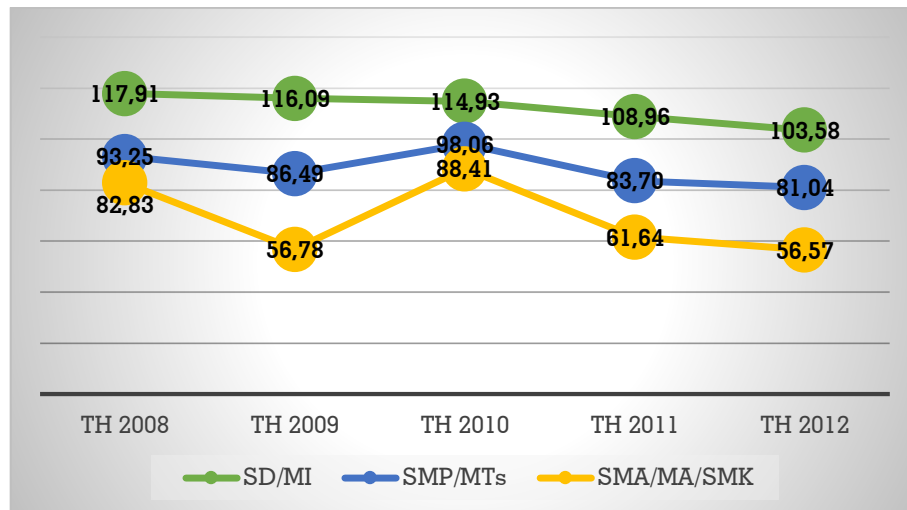
No	Jenjang Pendidikan	APK (%)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI	117,91	116,09	114,93	108,96	103,6
2	SMP/MTs	93,25	86,49	98,06	83,70	81,04
3	SMA/MA/SMK	82,83	56,78	88,41	61,64	56,57

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013 dan Profil Kesejahteraan Rakyat Pulang Pisau 2013

Dari Tabel 2.15 dan Bagan 2.8 menunjukkan nilai APK Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2008 sampai 2012 memiliki trend menurun. Nilai APK untuk jenjang SMA merupakan yang paling rendah diantara jenjang yang lain. Nilai APK pada jenjang pendidikan SD memiliki nilai APK yang paling tinggi, namun juga menurun dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2012 APK Kabupaten Pulang Pisau untuk tingkat SD sebesar 103,6%, artinya dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, ada 104 penduduk (tanpa memandang usia) yang sedang/telah mengikuti pendidikan SD di Kabupaten Pulang Pisau. APK Kabupaten Pulang Pisau tahun 2014 untuk jenjang SMP sebesar 81,04%, artinya dari 100 penduduk usia 13-15 tahun (tanpa memandang usia) yang sedang/telah mengikuti pendidikan SMP di Kabupaten Pulang Pisau. APK Kabupaten Pulang Pisau tahun 2014 untuk jenjang SMA sebesar 56,57%, artinya dari 100 penduduk usia 16-18 tahun (tanpa memandang usia) yang sedang/telah mengikuti pendidikan SMA di Kabupaten Pulang Pisau.

Bagan 2.8 APK Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau 2008 - 2012



Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013 dan Profil Kesejahteraan Rakyat Pulang Pisau 2013

Angka partisipasi murni adalah indikator yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Data mengenai angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 - 2012 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.16 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 - 2012

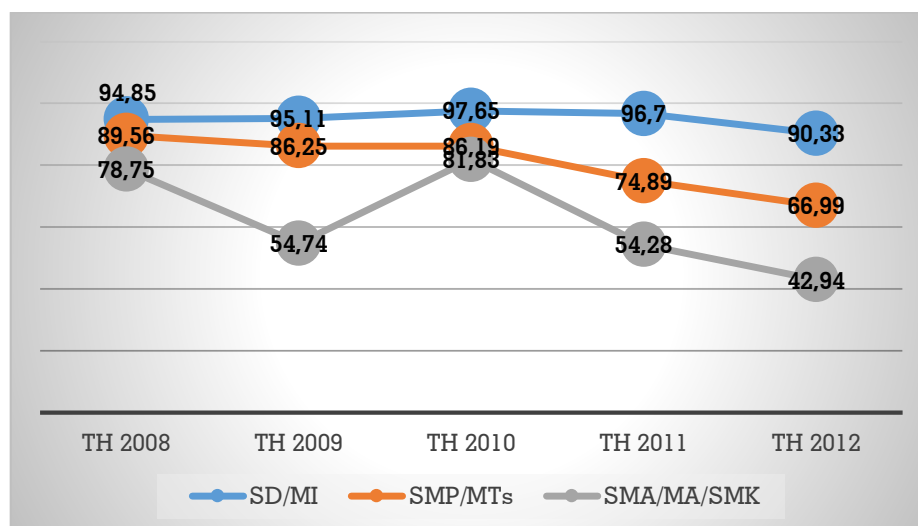
No	Jenjang Pendidikan	APM (%)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI	94,85	95,11	97,65	96,7	90,33
2	SMP/MTs	89,56	86,25	86,19	74,89	66,99
3	SMA/MA/SMK	78,75	54,74	81,83	54,28	42,94

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013 dan Profil Kesejahteraan Rakyat Pulang Pisau 2013

Dilihat dari segi tingkat pendidikan, Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SMA masih merupakan yang paling rendah diantara jenjang yang lain. Untuk tingkat

SD, APM mengalami peningkatan periode 2008-2011, namun menurun pada tahun 2012. (Lihat Tabel 2.16 dan Bagan 2.9). Untuk tingkat SMP, APM selalu menurun setiap tahunnya, yaitu dari 89,56% (2008) menjadi hanya 66,99% (2012). Sedangkan untuk APM tingkat SMA mengalami penurunan dari 78,75% (2008) menjadi 54,74% (2009), kemudian meningkat menjadi 81,83% (2010), dan turun kembali secara signifikan menjadi 54,28% (2011) dan 42,94% (2012).

Bagan 2.9 **APM Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau 2008 - 2012**



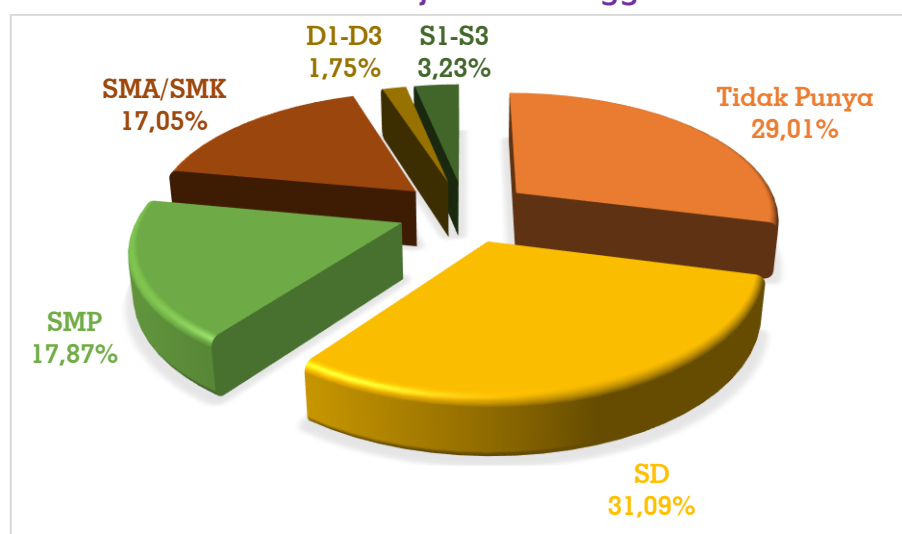
Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013 dan Profil Kesejahteraan Rakyat Pulang Pisau 2013

Kecenderungan penurunan APK dan APM di Kabupaten Pulang Pisau ini harus menjadi perhatian khusus. APK dan APM menggambarkan kondisi SDM suatu daerah di masa depan, dimana APK dan APM yang tinggi menunjukkan tingkat intelektualitas penduduk juga tinggi. Sebaliknya, APK dan APM yang rendah menunjukkan tingkat intelektualitas penduduk juga kurang.

4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Manfaat menghitung APT adalah untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan disuatu daerah, selain itu berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama melihat kualifikasi menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.

Bagan 2.10 Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Keatas Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2012



Sumber: *Profil Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pulang Pisau 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*

Pada tahun 2012, penduduk Kabupaten Pulang Pisau yang berumur 10 tahun keatas sebagian besar hanya memiliki ijazah SD yaitu sebanyak 31,09%. Sedangkan untuk penduduk yang menempuh pendidikan S1-S3 masih sangatlah minim, yaitu hanya berjumlah 3,23%.

2.2.2.3. Kesehatan

1. Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata lama hidup penduduk di suatu daerah. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat di suatu daerah terutama di sektor kesehatan. Angka harapan hidup juga dijadikan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain pendidikan dan ekonomi.

Data mengenai Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Pulang Pisau tidaklah lengkap. Namun data tersebut dapat disubstitusi dengan data yang bersumber dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau 2008-2013. Di dalam LKPJ AMJ disebutkan bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Pulang Pisau sebesar 67,65 tahun yang

artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Pulang Pisau akan mencapai umur 67,65 tahun.

2. Presentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah kondisi terparah dari kekurangan gizi menahun. Data mengenai balita gizi buruk dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.17 Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012

No	Status Gizi	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Balita Gizi Buruk (Jiwa)	1	1	0	0	1

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013

Dari data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2008 dan 2009 jumlah balita gizi buruk hanya 1 (satu) balita, dan pada tahun 2010 dan 2011 berhasil diturunkan menjadi nol. Namun pada tahun 2011 meningkat kembali menjadi 1 (satu) balita. Hal ini berarti angka balita gizi buruk di Kabupaten Pulang Pisau sangatlah rendah.

Rendahnya balita gizi buruk menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik dari pemerintah daerah/kualitas kesehatan masyarakat yang baik. Dengan melihat data gizi buruk Kabupaten Pulang Pisau, maka hal itu adalah hal yang positif dan baik bagi perkembangan Kabupaten Pulang Pisau. Penurunan nilai gizi buruk juga menggambarkan keberhasilan program pemerintah yang berkaitan dengan perbaikan gizi. Keberhasilan ini hendaknya dapat dipertahankan oleh aparat pemerintah daerah yang menangani urusan kesehatan dengan melanjutkan program terkait pelayanan kesehatan balita dan mendorong inisiatif kegiatan penyehatan di tingkat masyarakat.

2.2.2.4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Data pekerjaan penduduk menurut lapangan usaha/sektor dapat dilihat pada tabel berikut.

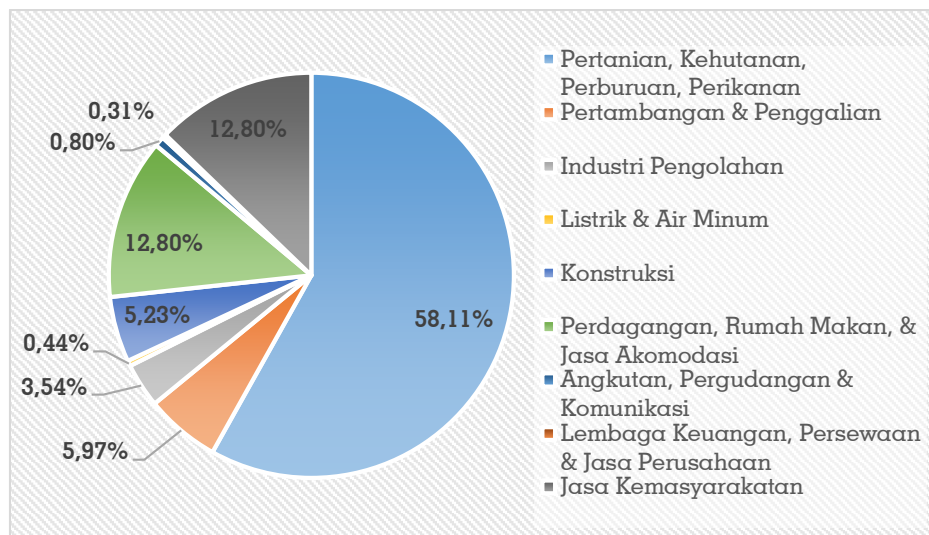
Tabel 2.18 Persentase Penduduk Kabupaten Pulang Pisau yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha/ Sektor Tahun 2012

No	Sektor	Tahun 2012	
		Penduduk (Jiwa)	%
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan	34.187	58,11
2	Pertambangan & Penggalian	3.511	5,97
3	Industri Pengolahan	2.083	3,54
4	Listrik & Air Minum	256	0,44
5	Konstruksi	3.078	5,23
6	Perdagangan, Rumah Makan, & Jasa Akomodasi	7.532	12,80
7	Angkutan, Pergudangan & Komunikasi	468	0,80
8	Lembaga Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	185	0,31
9	Jasa Kemasyarakatan	7.528	12,80
Total		58.828	100

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013

Jika dilihat berdasarkan lapangan usaha/sektor ekonomi dari persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha/sektor ekonomi, selama tahun 2012 sebagian besar penduduk Kabupaten Pulang Pisau bekerja pada sektor **Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan** yaitu mencapai 34.187 jiwa atau mencapai 58,11% dari total penduduk yang bekerja. Sedangkan penduduk yang bekerja di sektor Perdagangan, Rumah Makan, & Jasa Akomodasi dan Jasa Kemasyarakatan masing-masing sebanyak 12,80%. Sementara itu, untuk sektor Listrik & Air Minum dan Angkutan, Pergudangan & Komunikasi hanya mencapai kurang dari 1%.

Bagan 2.11 Persentase Penduduk Kabupaten Pulang Pisau yang Bekerja Menurut Sektor Tahun 2012



Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013, diolah

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan.

2.3.1. Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah Dasar dan Menengah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi sekolah memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda.

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Sekolah Kab. Pulang Pisau Tahun 2009-2012

Kategori Umur	Angka Partisipasi Sekolah			
	2009	2010	2011	2012
Usia 7-12 tahun	99,69	99,57	99,13	95,15
Usia 13-15 tahun	86,44	85,31	87,89	84,83
Usia 16-18 tahun	55,12	55,41	53,04	50,23

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013

Selama tahun 2009-2012, APS penduduk Kabupaten Pulang Pisau usia 7-12 tahun ada kecenderungan menurun dari 99,99% (tahun 2009) menjadi 95,15% (tahun 2012). APS penduduk Kabupaten Pulang Pisau usia 13-15 tahun ada kecenderungan meningkat dari 86,44% (tahun 2009) menjadi 84,83% (tahun 2012). Sedangkan APS penduduk Kabupaten Pulang Pisau 16-18 tahun ada kecenderungan menurun dari 55,12% (tahun 2009) menjadi 50,23% (tahun 2012). APS tahun 2012 untuk penduduk Kabupaten Pulang Pisa usia 7-12 tahun sebesar 95,15%, artinya dari 100 penduduk Kabupaten Pulang Pisau usia 7-12 tahun ada 95 penduduk yang bersekolah. Dari ketiga kelompok umur tersebut, APS penduduk usia 16-18 tahun adalah yang paling rendah dibandingkan kelompok umur lainnya, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran penduduk untuk berpendidikan tinggi masih rendah.

2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan menengah.

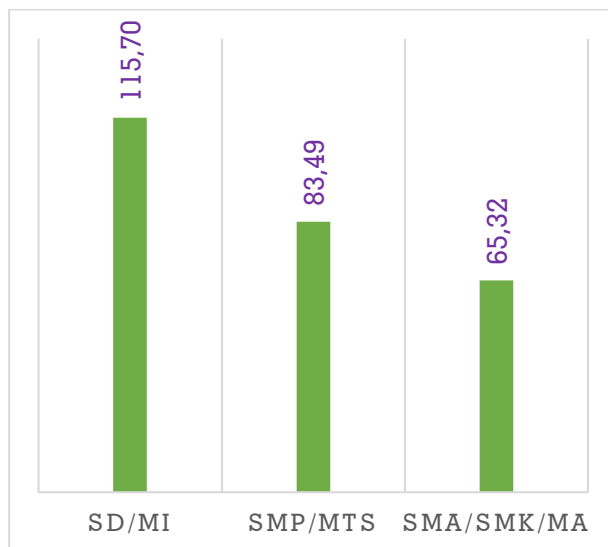
Tabel 2.20 Rasio Sekolah terhadap Murid Di Kabupaten Pulang Pisau 2011/2012

No	Indikator	Rasio
		2011/2012
1	Sekolah Dasar (SD/MI)	115,70
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	83,49
3	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	65,32

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2012, diolah

Rasio Sekolah-Murid di Kabupaten Pulang Pisau 2011/2012 paling tinggi adalah pada tingkat Sekolah Dasar yaitu sebesar 115,70 per 10.000 murid. Disusul dengan rasio pada tingkat Sekolah Menengah Pertama sebesar 83,49 dan yang paling rendah adalah pada tingkat Sekolah Menengah Atas sebesar 65,32 per 10.000 murid. Semakin rendah rasio berarti semakin tidak baik kondisi pelayanan pendidikan sebuah daerah.

Bagan 2.12 Rasio Sekolah terhadap Murid Di Kabupaten Pulang Pisau 2011/2012



Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2012, diolah

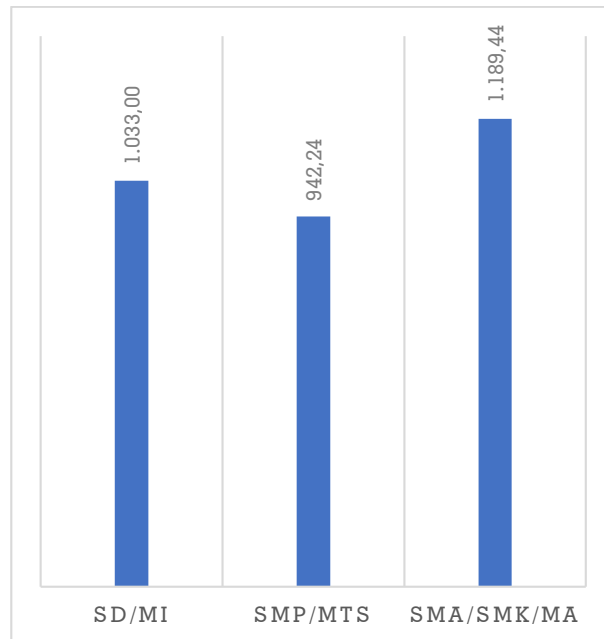
3. Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.21 Rasio Guru terhadap Murid Di Kabupaten Pulang Pisau 2011/2012

No	Indikator	Rasio
		2011/2012
1	Sekolah Dasar (SD/MI)	1.033,00
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	942,24
3	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	1.189,44

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2012, diolah

Bagan 2.13**Rasio Guru terhadap Murid Di Kabupaten Pulang Pisau
2011/2012**

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2012, diolah

Rasio Guru-Murid di Kabupaten Pulang Pisau 2011/2012 paling tinggi adalah pada tingkat Sekolah Menengah Atas yaitu sebesar 1.189,44 per 10.000 murid. Disusul dengan rasio pada tingkat Sekolah Dasar sebesar 1.033,00 dan yang paling rendah adalah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama sebesar 942,24 per 10.000 murid. Semakin rendah rasio berarti semakin tidak baik karena kurangnya guru atau siswa di tingkat tersebut. .

2.3.1.2. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar, semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Tujuan tersebut diharapkan akan mencapai derajat kesehatan yang baik, yang pada gilirannya akan memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

1. Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk

Rasio puskesmas dan pustu merupakan perhitungan untuk mengetahui suatu wilayah dalam cakupannya untuk memenuhi pelayanannya kepada penduduk. Tujuan agar pelayanan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan.

Tabel 2.22 Rasio Fasilitas Kesehatan Terhadap 1.000 penduduk Tahun 2010-2012

No	Fasilitas Kesehatan	2010	2011	2012
1	Puskesmas	0,09	0,09	0,09
2	Puskesmas pembantu	0,88	0,86	0,86

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013, diolah

Data diatas menunjukkan nilai rasio puskesmas tahun 2010 masih sama dengan tahun 2011 dan 2012. Sedangkan rasio puskesmas pembantu pada tahun 2010-2011 mengalami penurunan sebesar 0,02 dikarenakan jumlah penduduk yang semakin meningkat, sementara tahun 2012 sama dengan 2011.

Rasio puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk adalah mengukur ketersediaan puskesmas dan puskesmas berdasarkan jumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio fasilitas kesehatan maka semakin banyak penduduk yang dilayani oleh puskesmas ataupun puskesmas. Sedangkan semakin rendah nilai rasio fasilitas kesehatan maka semakin sedikit penduduk yang dilayani oleh puskesmas ataupun puskesmas. Penurunan nilai puskesmas ini diharapkan tidak terjadi secara menerus. Kesesuaian antara fasilitas kesehatan dengan penduduk yang dilayani akan memberikan hasil yang optimal pada pelayanannya.

2. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang bekesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Data mengenai Rasio Rumah Sakit terhadap 1000 penduduk di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23 Rasio Rumah Sakit Terhadap 1.000 penduduk Tahun 2010-2012

No	Fasilitas Kesehatan	2010	2011	2012
1	Rumah Sakit	0,01	0,01	0,01

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013, diolah

Sumber data Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2012 dapat diketahui jumlah penduduk di Kabupaten Pulang Pisau adalah 119.983 jiwa

pada tahun 2010, dan 122.511 jiwa pada tahun 2012, dengan jumlah rumah sakit di Kabupaten Pulang Pisau ada 1 rumah sakit. Dari data diatas dapat dihitung nilai rasio rumah sakit per satuan penduduk dan diketahui nilai rasio rumah sakit per satuan penduduk diketahui yaitu 0,01 setiap tahunnya.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 1000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk.

3. *Rasio Dokter dan Tenaga Medis Per Satuan Penduduk*

Menghitung rasio dokter dan rasio tenaga medis per satuan penduduk bermanfaat untuk mengetahui kebutuhan tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dibandingkan dengan jumlah penduduk. Data mengenai Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Terhadap 1.000 penduduk Tahun 2012

No	Tenaga Kesehatan	Rasio
		2011
1	Dokter	0,16
2	Paramedis lainnya	2,30

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013, diolah

Dari tabel diketahui bahwa rasio dokter di Kabupaten Pulang Pisau hanya 0,16 untuk setiap 1.000 penduduk, artinya rasio dokter sangatlah rendah. Sedangkan untuk rasio tenaga medis sudah cukup baik.

Berdasarkan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu setiap dokter melayani 2.500 penduduk. Berdasarkan fakta yang ada, di Indonesia jumlah dokter dan dokter spesialis belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter di Indonesia belum merata serta perlu ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu diperlukan penanganan agar pemenuhan tenaga kesehatan terpenuhi.

4. Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Cakupan puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) diperlukan karena bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan fasilitas kesehatan di masyarakat. Puskesmas biasanya cakupannya adalah Kecamatan, sedangkan pustu cakupannya adalah desa dan atau kelurahan tergantung jumlah penduduknya.

Tabel 2.25 Cakupan Puskesmas dan Pustu Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012

No	Fasilitas Kesehatan	Tahun 2012 (%)
1	Puskesmas	137,50
2	Puskesmas Pembantu	106,06

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013, diolah

Dari tabel, diketahui bahwa cakupan untuk puskesmas di Kabupaten Pulang Pisau adalah 137,50%, sedangkan cakupan untuk pustu adalah 106,06%. Semakin tinggi nilai cakupan pelayanan suatu fasilitas, maka daya layannya semakin baik. Cakupan puskesmas bernilai 137,50%, yang berarti menunjukkan bahwa puskesmas mampu melayani wilayah pelayanannya secara maksimum. Pada puskesmas pembantu nilai cakupannya 106,06%. hal ini menunjukkan bahwa puskesmas pembantu juga mampu secara maksimal dalam melayani wilayah pelayanannya.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum

1. Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Berdasarkan data BPS tahun 2011-2012 dapat diketahui kondisi jalan dan status jalan sebagai saran pendukung peningkatan investasi dan perdagangan di Kabupaten Pulang Pisau.

Tabel 2.26 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Status Jalan di Kabupaten Pulang Pisau (km) tahun 2011-2012

Jenis Permukaan	Jalan Negara		Jalan Provinsi		Jalan Kabupaten	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Baik	119,50	119,50	97,00	97,00	330,84	347,48
Sedang	0,00	0,00	40,00	40,00	215,88	263,51
Rusak	0,00	0,00	30,00	30,00	218,00	218,11
Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	119,94	113,63
Jumlah (km)	119,50	119,50	167,00	167,00	884,66	942,73

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2012, diolah

Dari tabel, diketahui panjang jalan di Kabupaten Pulang Pisau dalam kondisi baik adalah 119,50 km untuk jalan negara, 97 km untuk jalan provinsi, dan 347,48 km untuk jalan kabupaten. Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa pada tahun 2012 untuk jalan negara sebanyak 100% jalan dalam kondisi baik. Sedangkan untuk jalan provinsi sebanyak 58,08% dalam kondisi baik. Sementara itu, untuk jalan kabupaten hanya sebanyak 36,86% dari panjang jalan kabupaten yang berada dalam kondisi baik.

Semakin tinggi nilai proporsi panjang jaringan jalan akan memberikan dampak yang baik bagi penduduknya ataupun bagi daerah itu sendiri. Pembangunan wilayah akan terhambat karena tidak didukung oleh infrastruktur jaringan jalan yang memadai/dipengaruhi oleh akses jaringan jalan yang rusak.

2. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran untuk kebutuhan budidaya pertanian.

Data mengenai jaringan irigasi saat ini yang dimiliki kurang lengkap untuk menggambarkan rasio jaringan irigasi. Dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013, hanya diketahui Dinas Pekerjaan Umum melakukan

pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

3. *Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat*

Drainase berfungsi untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Drainase merupakan salah satu cara untuk membuang kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah. Selain itu tujuan dari drainase adalah salah satu unsur dari prasarana kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat.

Data untuk menghitung drainase dalam kondisi baik tidak cukup lengkap. Dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013, hanya diketahui Dinas Pekerjaan Umum melakukan pembangunan dan peningkatan sarana/prasarana drainase.

2.3.1.4. Perumahan

1. *Rumah Tangga Pengguna Air Bersih*

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Fasilitas air minum merupakan hal penting karena sangat menentukan kualitas air minum itu sendiri.

**Tabel 2.27 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Air Minum
Kabupaten Pulang Pisau 2009-2012**

Tahun	Fasilitas Air Minum			
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada
2009	66,31	9,13	8,15	16,41
2010	58,89	11,15	4,65	25,31
2011	52,16	23,23	12,87	11,74
2012	59,15	27,23	11,16	2,46

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013

Selama tahun 2009-2012, persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas air minum cenderung menurun dari 16,41% (tahun 2009) menjadi 2,46% (tahun 2012). Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat

akan pentingnya penggunaan air bersih bagi kesehatan. Pada tahun 2012 persentase rumah tangga pengguna fasilitas air minum sendiri sebesar 59,15% yang artinya bahwa 100 rumah tangga Kabupaten Pulang Pisau tahun 2012, ada 59 rumah tangga yang menggunakan air minum sendiri.

2. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Rumah tangga pengguna listrik adalah persentase rumah tangga yang memanfaatkan listrik sebagai penerangannya.

Tabel 2.28 Rumah Tangga Pengguna Listrik

Tahun	Sumber Penerangan		
	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Lainnya
2009	75,04	8,69	16,27
2010	80,93	5,66	13,41
2011	71,83	15,67	12,50
2012	78,14	12,17	9,69

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa daerah di Kabupaten Pulang Pisau yang belum mendapatkan fasilitas penerangan yang berasal dari PLN. Selama tahun 2009-2012, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik berfluktuasi dan ada kecenderungan meningkat dari 75,04% (tahun 2009) menjadi 78,14% (tahun 2012). Karena sering matinya jaringan listrik PLN pada tahun 2012, sehingga sebagian masyarakat yang menggunakan listrik non PLN selama tahun 2009-2012 meningkat dari 8,69% (tahun 2009) menjadi 12,17%.

Sedangkan persentase rumah tangga di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2012 yang masih belum menggunakan listrik sebesar 9,69%, yang artinya dari 100 rumah tangga di Kabupaten Pulang Pisau, ada 10 rumah tangga yang masih mendapatkan fasilitas listrik sebagai sumber penerangan. Selama tahun 2009-2012 persentase penduduk yang tidak menggunakan listrik kecenderungan menurun dari 16,27% (tahun 2009) menjadi 9,69% (tahun 2010).

3. Rumah Tangga Ber-Sanitasi

Fasilitas perumahan yang tidak kalah penting adalah tempat buang air besar atau jamban/kakus. Fasilitas buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan adalah jamban/kakus dengan tangki septik. Keadaan jamban keluarga sangat erat hubungannya dengan kesehatan itu sendiri. Dengan demikian tersedianya fasilitas ini menandakan status dan kondisi tempat tinggal memenuhi syarat kesehatan lingkungannya.

Rumah tangga ber-sanitasi merupakan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi/jamban sendiri disetiap rumah atau dengan kata lain tidak menggunakan jamban bersama serta memiliki tangki septik sendiri.

Tabel 2.29 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Buang Air Besar

Tahun	Air Besar Fasilitas Buang Air Besar			
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada
2009	50,97	21,75	6,04	21,24
2010	60,31	19,92	6,07	13,70
2011	51,84	28,45	6,00	13,71
2012	47,75	33,46	11,80	6,99

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013

Selama tahun 2009-2012, persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar cenderung menurun dari 21,24% (tahun 2009) menjadi 11,80% (tahun 2012). Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan fasilitas buang air besar sendiri sebesar 47,75% yang artinya dari 100 rumah tangga di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2012 ada 48 rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar sendiri.

2.3.1.5. Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Rasio Penduduk Ber- KTP per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk merupakan kartu identitas di Indonesia. Saat ini di Indonesia mulai diganti KTP yang lama dengan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik). Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2012 disebutkan mengenai pencapaian pelayanan KTP (jumlah lembar KTP).

Tabel 2.30 Daftar Wajib KTP, Yang Sudah Perekaman e-KTP, Yang Sudah Dicetak Per-Kecamatan di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau

No.	Kecamatan	Wajib KTP	Yang Sudah Perekaman	E-KTP Yang Sudah Dicetak
1.	Pandih Batu	15.601	10.702	9.617
2.	Kahayan Kuala	13.862	7.868	6.015
3.	Kahayan Tengah	5.360	4.510	4.153
4.	Banama Tingang	5.278	4.115	3.373
5.	Kahayan Hilir	17.169	13.105	11.951
6.	Maliku	17.091	13.681	10.844
7.	Jabiren Raya	5.500	4.075	2.495
8.	Sebangu Kuala	6.134	3.316	1.864
	JUMLAH	85.995	61.372	50.312
	Rata-Rata		71,36%	

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013

Semakin banyak penduduk yang memiliki KTP, maka semakin tinggi capaian Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Banyaknya penduduk Ber-KTP akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pencatatan penduduk serta memudahkan pemerintah dalam merencanakan perencanaan yang akan dibuat.

2. Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk

Pentingnya akta kelahiran adalah akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam-puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi. Akta kelahiran mempunyai manfaat yang besar serta kegunaan dari sebuah akte kelahiran ini di kemudian hari.

Dalam LKPJ AMJ Kabupaten Pulang Pisau tahun 2008-2013 mengenai data kepemilikan akta kelahiran disebutkan capaian kinerja untuk jumlah penerbitan Akta Kelahiran sampai pada tahun 2012 adalah sebesar sebesar 85,80%. Pencapaian pelayanan akta kelahiran di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012 tergantung dengan angka kelahiran pada tahun tersebut. Melihat pentingnya akta kelahiran dimasa mendatang, penduduk sudah semakin cerdas untuk membuat akta kelahiran bagi anak-anaknya. Sosialisasi ke daerah-

daerah perdesaan menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar setiap penduduk memiliki akta kelahiran.

2.3.1.6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Akseptor KB

Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Berikut data mengenai akseptor KB Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012, dengan sumber data Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka Tahun 2013.

Tabel 2.31 Akseptor KB Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012

Tahun	Jumlah Klinik	Akseptor Aktif	Akseptor Baru
2009	88	8.277	3.782
2010	88	14.942	5.634
2011	115	17.941	3.593
2012	102	8.971	4.516

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa jumlah klinik KB di Kabupaten Pulang Pisau selama 2009-2011 mengalami peningkatan menjadi 115, namun menurun kembali pada tahun 2012 menjadi hanya 102 klinik. Sementara itu untuk akseptor KB aktif di Kabupaten Pulang Pisau hanya meningkat selama periode 2009-2011 menjadi 17.971 akseptor aktif, dan menurun sangat signifikan pada tahun 2012 menjadi hanya 8.971 akseptor. Semakin rendahnya akseptor KB dapat menunjukkan semakin rendahnya jumlah penduduk pengguna KB dibandingkan dengan pasangan usia subur. Pemerintah dalam hal ini Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pulang Pisau, mulai gencar dalam promosi KB melalui *workshop* atau seminar sehingga langsung bertemu dengan calon akseptor KB. Saat ini pemerintah pusat sudah banyak melakukan banyak promosi tentang KB melalui iklan di televisi, akan lebih baik apabila program ini di teruskan ke daerah.

2. Target dan Realisasi Peserta KB Aktif

Tujuan dari Keluarga Berencana adalah Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Data peserta KB Aktif diperoleh dari Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka Tahun 2013 sebagai berikut.

Tabel 2.32 Target dan Realisasi Peserta KB Aktif Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012

Tahun	Akseptor Aktif		Persen (%)
	Target	Realisasi	
2009	14.538	8.277	56,93
2010	7.743	14.942	192,97
2011	12.667	17.941	141,64
2012	15.738	8.971	57,00

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013

Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan bahwa realisasi peserta KB aktif mengalami peningkatan dan penurunan. Tahun 2009 realisasi mencapai 56,93% dari target, tahun 2010 meningkat menjadi sebesar 192,97% dari target, kemudian mengalami penurunan menjadi 141,64% dari target. Sedangkan pada tahun 2012 hanya mencapai 57,00% dari target, artinya tahun 2012 Kabupaten Pulang Pisau belum mencapai target terhadap jumlah akseptor KB.

2.3.1.7. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah modal dasar bagi bergeraknya roda pembangunan. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk. Pada urusan Ketenagakerjaan indikator yang dijelaskan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan

perbandingan antara jumlah penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Data dari Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013 mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2010-2012 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.33 **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Pulang Pisau Tahun 2010-2012**

Keterangan	Tahun		
	2010	2011	2012
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,11	73,36	69,51

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2010-2012 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2010 TPAK sebesar 68,11% meningkat menjadi 73,36% pada tahun 2011, dan menurun kembali pada tahun 2012 menjadi 69,51%. TPAK Kabupaten Pulang Pisau sebesar 69,51% berarti dari 100 penduduk usia kerja, sekitar 70 orang diantaranya termasuk angkatan kerja aktif secara ekonomis baik bekerja maupun menganggur.

Penurunan TPAK mengindikasikan bahwa di Tahun 2012 semakin sedikit bagian dari penduduk usia kerja. Semakin berkurang nilai angkatan kerja menunjukkan bahwa semakin sedikit penduduk di Kabupaten Pulang Pisau yang berpartisipasi dalam pergerakan aktivitas ekonomi. Penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja sebaiknya menjadi perhatian bagi Pemertintah Daerah agar menjamin ketersediaan lapangan kerja yang memadai.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik atau penduduk yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Data tingkat pengangguran terbuka bersumber dari Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka tahun 2013.

Tabel 2.34 **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pulang Pisau**
Tahun 2010 – 2012

Keterangan	Tahun		
	2010	2011	2012
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,11	2,62	2,59

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2010-2011 terus mengalami peningkatan dan juga penurunan, yaitu dari 2,11% (2010) menjadi 2,62% (2011), dan 2,59% (2012). Semakin rendah nilai pengangguran terbuka, akan semakin rendah beban bagi daerah.

2.3.1.8. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

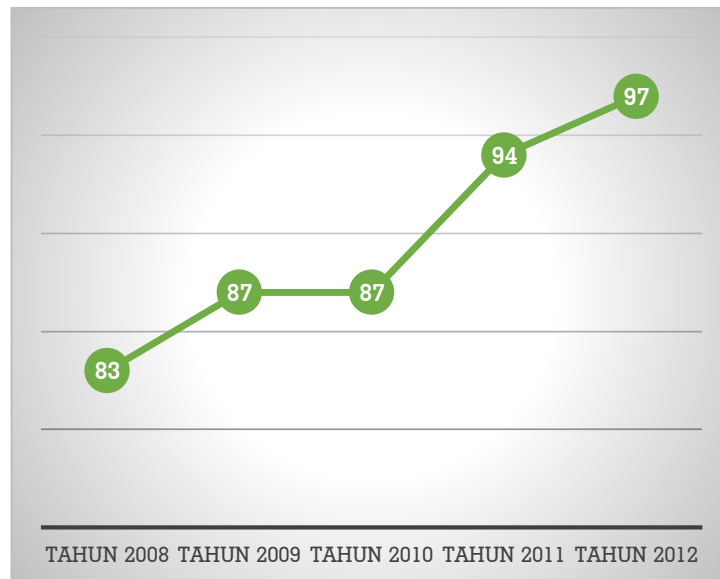
1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Data persentase Koperasi Aktif yang bersumber dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35 **Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012**

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Persentase Koperasi Aktif	66,94	67,97	67,97	69,63	70,29

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013



Persentase koperasi aktif di Kabupaten Pulang Pisau setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2008 hingga 2012. Peningkatan cukup tinggi terjadi pada tahun 2009 ke 2010, nilai peningkatan sebesar 1,66%. Peningkatan persentase koperasi aktif menunjukkan bahwa peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi daerah kabupaten menjadi penting.

Semakin besar nilai persentase koperasi aktif, maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Saat ini ekonomi daerah sudah banyak yang berazaskan koperasi. Azas koperasi dipilih karena tujuan dari koperasi yang bertujuan untuk kesejahteraan anggota. Dengan demikian keberadaan koperasi harus didukung oleh pemerintah, sehingga terjadi simbiosis mutualisme antara pemerintah dan koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah.

2. Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

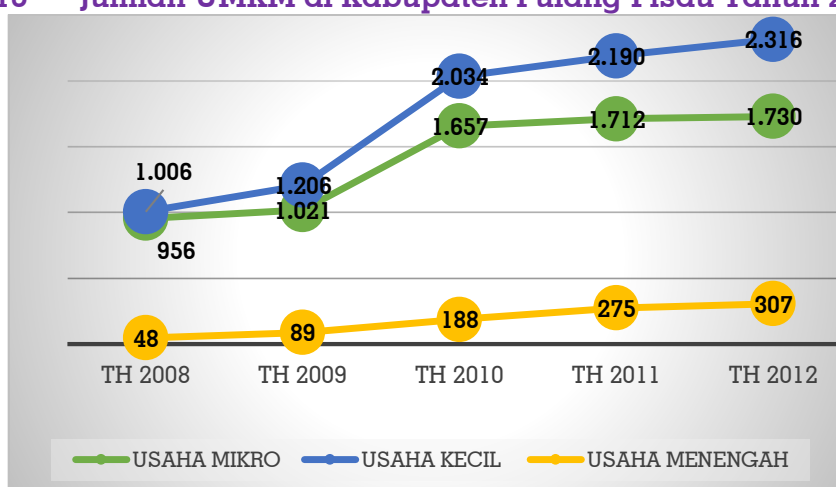
Data mengenai Jumlah UMKM di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36 Jumlah UMKM di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012

Tahun	Usaha Mikro (Unit)	Usaha Kecil (Unit)	Usaha Menengah (Unit)
2008	956	1.006	48
2009	1.021	1.206	89
2010	1.657	2.034	188
2011	1.712	2.190	275
2012	1.730	2.316	307

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013

Bagan 2.15 Jumlah UMKM di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012



Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah UMKM setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2009 ke 2010, baik Usaha Mikro, Kecil, maupun Menengah. Pada tahun 2008 ke 2012 dalam satu tahun peningkatan usaha kecil meningkat

Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. Jumlah UKM non BPR/LKM yang berjumlah ribuan dirasa dapat menggerakkan ekonomi daerah, sehingga dalam pelayanannya terhadap penduduk dapat dioptimalkan dan meminimalisir barang-barang yang didatangkan dari luar daerah. Peran pemerintah sebagai pemegang kendali diperlukan dalam rangka pengembangan UKM melalui berbagai penyaluran dana pengembangan UKM dan promosi ke berbagai daerah melalui acara-acara yang diselenggarakan daerah.

2.3.1.9. Penanaman Modal

Jumlah Investor Berskala Nasional dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013 menyebutkan capaian kinerja yang diperoleh urusan penanaman modal dari tahun 2008 hingga 2012. Capaian kinerja urusan penanaman modal adalah jumlah investasi dalam tahun 2012 di Kabupaten Pulang Pisau telah memberi ijin investasi sebanyak 62 perizinan

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Jumlah investasi di Kabupaten Pulang Pisau diharapkan dapat terus meningkat dengan demikian

pendapatan daerah juga terus meningkat, namun peningkatan investasi diiringi dengan menjaga kelestarian alam terutama investasi penambangan.

2.3.1.10. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah, mudah memperoleh, aman dikonsumsi dan harga yang terjangkau. Hal ini diwujudkan dengan adanya sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi.

Berikut adalah data produksi dan kebutuhan beras yang merupakan bagian terpenting untuk ketersediaan bahan pangan.

Tabel 2.37 Data Produksi dan Kebutuhan Beras Tahun 2008-2012

No	Tahun	Produksi Beras (Ton)	Kebutuhan Beras (Ton)	Selisih
1.	2008	32.220	16.827	15.394
2.	2009	32.337	17.155	15.182
3.	2010	45.927	17.264	28.663
4.	2011	35.411	17.090	18.320
5.	2012	37.136	18.665	18.471

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa selisih produksi beras dengan kebutuhan beras pada tahun 2008 dan 2009 adalah 2:1, dimana jumlah produksi lebih besar dibanding kebutuhan akan beras, sehingga selisihnya lebih kurang (\pm) setengah dari dari kebutuhan beras. Sedangkan pada tahun 2010 produksi beras semakin meningkat, dimana selisih produksi beras lebih besar dibanding kebutuhan beras, dan pada tahun 2010 dan 2011, kembali selisih berbanding 2:1 seperti pada tahun 2008 dan 2009.

Program yang dapat dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan adalah dengan menggunakan bibit unggul dalam penanaman tanaman pangannya.

2.3.1.11. Statistik

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan statistik berdasarkan lampiran Permendagri No 54 tahun 2010 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti.

- Buku "Kabupaten Dalam Angka"
- Buku "PDRB Kabupaten"

Kedua dokumen diatas ada di Kabupaten Pulang Pisau, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

2.3.1.12. Komunikasi dan Informatika

Komunikasi merupakan hal penting akhir-akhir ini, komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai media. Begitu pula dengan informasi, semakin majunya teknologi berdampak pada kemudahan penduduk memperoleh informasi. Memudahkan penduduknya memperoleh informasi, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau memiliki situs resmi dengan alamat www.pulangpisaukab.go.id.

Website yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau ini dari segi tampilan sudah interaktif dan menarik, dan dari segi *update* informasi sudah *up to date*. Diharapkan kedepannya website semakin interaktif dan informatif dalam menyampaikan informasi mengenai Kabupaten Pulang Pisau. Adanya situs pemerintahan memudahkan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dan seluruh dunia dengan mudah mengakses situs Kabupaten Pulang Pisau.

2.3.1.13. Perpustakaan

Perpustakaan adalah tempat di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan

perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPI AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013 hanya disebutkan terlaksananya pembangunan gedung perpustakaan dan perlengkapan serta pengadaan buku-buku perpustakaan di sekolah-sekolah dari tingkat SD sampai SLTA tersebar di 8 Kecamatan (17 desa).

2.3.2. Urusan Pilihan

2.3.2.1. Pertanian dan Kehutanan

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui urusan pilihan bagian pertanian salah satunya dengan melihat Kontribusi sektor pertanian dari PDRB. Dalam hal ini yang termasuk sektor pertanian adalah tanaman pangan, palawija, kehutanan & perkebunan. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Pulang Pisau diperoleh dari Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013 seperti ditunjukkan oleh tabel dibawah ini.

**Tabel 2.38 Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012**

Sektor	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Rata- rata
Pertanian	56,08	56,93	57,43	57,44	58,12	57,20

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari tahun 2008 hingga 2012 mengalami peningkatan. Rata-rata dari tahun 2008-2012 kontribusi sektor pertanian sebesar 57,20%. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Pulang Pisau cenderung stabil, ini menunjukkan ketahanan pangan serta kestabilan wilayah terjaga.

**Tabel 2.39 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012 (jutaan rupiah)**

Sektor	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	578.014,89	650.073,06	743.337,42	841.621,96	975.201,84
a. Tanaman Bahan Makanan	193.510,14	208.110,11	233.582,99	250.082,96	280.424,83
b. Tanaman Perkebunan	212.124,47	246.908,04	293.086,59	349.293,74	419.977,47
c. Peternakan dan Hasil-Hasilnya	39.100,96	46.281,39	53.116,33	61.838,85	71.448,43
d. Kehutanan	47.304,59	49.427,58	51.212,08	54.874,83	58.315,31
e. Perikanan	85.974,73	99.345,95	112.339,42	125.531,58	145.035,79

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013

Sumbangan terbesar PDRB Kabupaten Lamandau adalah dari sektor pertanian yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya selama kurun waktu tahun 2008-2012 (Tabel 2.39). Sub sektor yang menyumbang terbesar adalah Tanaman Perkebunan sebesar Rp.212.124,47 juta pada tahun 2008 dan menjadi Rp.419.977,47 juta pada tahun 2012. Ini menunjukkan bahwa Tanaman Perkebunan merupakan potensi terbesar di Kabupaten Lamandau. Sub sektor penyumbang terbesar kedua adalah Tanaman Bahan Makanan, Sub Sektor penyumbang terbesar ketiga adalah Perikanan. Sementara Sub Sektor Peternakan dan Sub Sektor Kehutanan berada di urutan keempat dan kelima

2.3.2.2. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian seperti mineral, batubara, panas bumi, migas. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Pulang Pisau diperoleh dari Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013 seperti ditunjukkan tabel berikut.

**Tabel 2.40 Kontribusi Sektor Pertambangan & Penggalian Terhadap
PDRB Pulang Pisau Tahun 2008-2012**

Sektor	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Rata- rata
Pertambangan & penggalian	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,27

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013

Kontribusi pertambangan terhadap PDRB dari tahun 2008 hingga 2012 tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar 0,27%, sehingga rata-rata kontribusinya tetap 0,27%. Kontribusi sektor pertambangan tidak cukup besar menyumbang PDRB jika dibandingkan dengan sektor pertanian. Peningkatan sektor pertambangan sebaiknya didukung oleh pemerintah namun dengan mempertimbangkan aspek lingkungan agar sektor pertambangan menyumbang lebih banyak kepada sektor PDRB.

2.3.2.3. Perdagangan dan Pariwisata

Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Pariwisata adalah industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata menawarkan tempat istirahat, budaya, petualangan. Kontribusi sektor perdagangan dan pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Pulang Pisau diperoleh dari Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013 seperti ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 2.41 Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel, & Restoran Terhadap PDRB Pulang Pisau Tahun 2008-2012

Sektor	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Rata-rata
Perdagangan, hotel & restoran	15,80	15,31	15,45	15,43	15,01	15,40

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013

Kontribusi sektor perdagangan dan pariwisata terhadap PDRB dari tahun 2008-2012 fluktuatif. Pada tahun 2009 mengalami penurunan dari 15,80% (2008) menjadi 15,31%. Kemudian meningkat pada tahun 2010 dan 2011. Rata-rata dari tahun 2008-2012 kontribusi sektor perdagangan dan pariwisata sebesar 15,40%. Penurunan kontribusi sektor perdagangan dan pariwisata sebaiknya menjadi perhatian khusus dalam hal perbaikan infrastruktur perdagangan dan pariwisata, sehingga warga dan wisatawan yang datang semakin banyak dan sektor perdagangan dan pariwisata menyumbang PDRB lebih besar.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah.

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari tingkat PDRB, semakin tinggi tingkat PDRB per kapita maka semakin tinggi kemampuan ekonomi suatu daerah tersebut. PDRB perkapita penduduk Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan harga konstan 2000 mengalami peningkatan terus menerus sejak tahun 2008 hingga tahun 2012. Pada tahun 2008 PDRB ADHK Kabupaten Pulang Pisau hanya sebesar 666.398,11 Juta Rupiah meningkat menjadi 839.190,30 Juta Rupiah pada tahun 2009.

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur adalah fokus pertama dari 3 fokus yang dibahas pada aspek daya saing daerah. Fokus ini berusaha melihat sejauh mana upaya penyediaan sarana-prasarana yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk menarik sektor usaha agar mau menyelenggarakan kegiatan ekonomi di Pulang Pisau. Kesiapan tersebut diukur dari sub fokus sebagai berikut

2.4.2.1. Perhubungan

Berdasarkan data BPS tahun 2011-2012 dapat diketahui kondisi jalan dan status jalan sebagai saran pendukung peningkatan investasi dan perdagangan di Kabupaten Pulang Pisau.

Tabel 2.42 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Status Jalan di Kabupaten Pulang Pisau (km) tahun 2011-2012

Jenis Permukaan	Jalan Negara		Jalan Provinsi		Jalan Kabupaten	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Baik	119,50	119,50	97,00	97,00	330,84	347,48
Sedang	0,00	0,00	40,00	40,00	215,88	263,51
Rusak	0,00	0,00	30,00	30,00	218,00	218,11
Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	119,94	113,63
Jumlah (km)	119,50	119,50	167,00	167,00	884,66	942,73

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013

2.4.3. Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan perkara pidana oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang diselesaikan merupakan jumlah perkara pidana yang diselesaikan selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Jumlah perkara pidana yang terselesaikan di Kabupaten Pulang Pisau dapat diinformasikan sebagai berikut:

Tabel 2.43 Persentase Perkara Pidana yang Tertangani Tahun 2010-2012

Tahun	Perkara Pidana (Kriminal)		Persentase yang Diselesaikan
	Yang Diterima	Yang Diselesaikan	
2010	109	86	78,90
2011	102	82	80,39
2012	160	123	76,88

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013

Jumlah perkara pidana di Kabupaten Pulang Pisau dari tahun 2010 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan, yaitu dari 109 kasus pada tahun 2010 menjadi 160 kasus pada tahun 2012. Jika dilihat dari persentase yang terselesaikan cenderung fluktuatif, yaitu 78,90% pada tahun 2010, meningkat menjadi 80,39% pada tahun 2011, dan mengalami penurunan pada tahun 2012 (76,88%).

2.4.4. Sumber Daya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Fokus ini berfungsi untuk melihat kesiapan sumber daya manusia dalam rangka mendukung agenda pembangunan daerah. Indikator yang digunakan dan tersedia untuk mengukur hal tersebut adalah indikator rasio ketergantungan.

Tabel 2.44 Rasio Ketergantungan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012

No	Uraian	2012
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	37.350
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	5.537
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)	42.887
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	79.624
5.	Rasio ketergantungan (3)/(4)	53,86

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Berdasarkan data tahun 2012 nilai angka ketergantungan di Kabupaten Pulang Pisau nilainya diatas 53,86%. Ini menunjukkan bahwa usia produktif di Kabupaten Pulang Pisau menanggung usia yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dengan nilai angka ketergantungan yang cukup tinggi diharapkan pemerintah membantu penduduknya dengan membuka lapangan kerja baru sehingga pembangunan daerah tidak terhamabat oleh angka ketergantungan yang tinggi.

2.5 Kinerja Pembangunan Daerah

Selain gambaran yang disajikan pada tiga aspek dalam Sub Bab 2.1 Aspek Geografi dan Demografi, Sub Bab 2.2 Aspek kesejahteraan Masyarakat, Sub Bab 2.3 Aspek Pelayanan Umum, dan Sub Bab 2.4 Aspek Daya Saing Daerah, pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau menggambarkan capaian kinerja daerah sesuai dengan kinerja yang tersedia pada lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 yang terlihat dalam tabel 2.42 dibawah ini:

Tabel 2.45 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
I	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1	Pertumbuhan PDRB							
-	Atas Harga Berlaku	%	11,71	10,78	13,34	13,22	14,50	13,30
-	Atas Harga Konstan	%	5,38	5,21	5,53	6,00	6,99	7,00
1.2	Laju Inflasi	%						
1.4	Persentase penduduk miskin	%	9,26	6,23	5,22	5,45	5,25	4,80
1.5	Angka Pengangguran	jiwa	3,72	2,26	2,11	2,62	2,59	2,20
II	Fokus Kesejahteraan Sosial							
2.1	Pendidikan							
2.1.1	APK SD/SDLB/MI	%	95,73	117,91	98,73	114,93	108,32	104,14
2.1.2	APK SMP/MTs	%	93,25	92,81	87,00	98,06	82,23	88,07
2.1.3	APK SMA/SMK/MA	%	79,44	82,83	74,89	88,41	60,56	58,44
2.1.4	APM SD/SDLB/MI	%	79,44	94,85	95,11	97,65	95,00	88,02
2.1.5	APM SMP/MTs	%	89,56	91,02	84,60	86,19	73,57	65,47
2.1.6	APM SMA/SMK/MA	%	68,93	78,75	54,74	81,83	53,33	40,86
2.2	Kesehatan							
2.2.1	Angka Kematian Bayi	jiwa	115,00	35,00	140,00	161,00	227,00	209,00
2.2.2	Angka Harapan Hidup	tahun	60,2	62,5	64,6	65,3	67,74	71,00
2.2.3	Persentase Balita Gizi buruk	%	9,00	5,00	5,00	6,00	6,00	5,00
2.2.4	Angka Kematian Ibu	%	0,007	0,00	0,00	0,00	0,009	0,05
2.2.5	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (dilaporkan)	Persen	-	-	-	-	-	-
III	Fokus Budaya dan Olahraga							

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Jumlah Grup Kesenian	buah	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
3.2	Jumlah Gedung Olahraga	buah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3.3	Jumlah Sarana Peribadatan	buah	477,00	506,00	516,00	525,00	470,00	500,00
ASPEK PELAYANAN UMUM								
I	Fokus Layanan Urusan Wajib							
1.1	Pendidikan							
1.1.1	Pendidikan Dasar							
1.1.1a	Angka partisipasi sekolah SD	persen	-	99,69	99,57	949,07	966,99	880,23
1.1.1b	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dasar	rasio	-	-	-	129,59	128,30	128,58
1.1.1c	Rasio Guru terhadap murid	rasio	-	-	-	793,70	723,93	836,27
1.1.1d	Rasio Guru terhadap murid per kelas rata-rata	rasio	-	-	-	79,37	72,39	83,63
1.1.2	Pendidikan Menengah							
1.1.2a	Angka partisipasi sekolah SMP	persen	-	-	-	833,15	748,89	654,75
1.1.2b	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah pertama	rasio	-	-	-	69,41	69,41	68,18
1.1.2c	Rasio Guru terhadap murid	rasio	-	-	-	345,59	576,95	630,23
1.1.2d	Rasio Guru terhadap murid per kelas rata-rata	rasio	-	-	-	34,56	57,70	63,02
1.1.2e	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	persen	93,80	94,91	98,24	98,81	98,83	98,85
1.1.2f	Angka Partisipasi Sekolah SMA	persen	366,06	430,66	506,67	563,01	542,78	410,18
1.1.2g	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah atas	Rasio	-	-	-	37,20	38,68	39,62
1.1.2h	Rasio guru terhadap murid	Rasio	-	-	-	643,35	579,29	662,83
1.1.2i	Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata	Rasio	-	-	-	64,33	57,93	66,28

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
1.1.3a	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	persen	26,98	32,03	37,08	42,23	43,28	43,43
1.1.4	Angka Putus Sekolah							
1.1.4a	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	persen	0,70	0,48	0,46	0,44	0,25	0,41
1.1.4b	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	persen	-	-	-	1,13	0,70	0,74
1.1.4c	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	persen	0,99	0,95	1,01	0,88	1,45	0,85
1.1.4d	penurunan angka putus sekolah	persen	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Angka Kelulusan							
1.1.5a	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.5b	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	persen	-	-	-	88,97	99,77	99,96
1.1.5c	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	persen	-	-	-	99,35	99,27	99,87
	Angka melanjutkan sekolah							
1.1.5d	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	persen	75,92	78,27	76,74	77,52	80,90	90,85
1.1.5e	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	persen	55,18	56,89	59,88	63,04	80,60	83,46
1.1.5f	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	orang	57,36	61,03	64,93	69,08	73,65	77,72
1.2	Kesehatan							
1.2.1	Rasio Posyandu per satuan balita	rasio	1,2	1,4	1,2	1,6	1,5	1,7
1.2.2	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	rasio	0,73	0,76	0,8	0,79	0,83	0,8
1.2.3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	rasio	0,53	0,58	0,6	0,6	0,7	0,7
1.2.4	Rasio dokter persatuan penduduk	rasio	15,00	20,00	19,00	17,00	16,00	15,00
1.2.5	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	rasio	81,00	118,00	103,00	93,00	80,00	85,00
1.2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen	95,25	81,54	70,56	80,2	75,00	75,00
1.2.7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	63,2	67,00	70,5	68,5	72,00	90,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.8	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	persen	13,00	13,15	20,6	29,00	32,5	35,00
1.2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	78,00	83,74	92,52	100,00	100,00	100,00
1.2.11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	persen	80,6	87,4	91,61	95,21	96,52	100,00
1.2.12	Cakupan puskesmas	persen	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00
1.2.13	Cakupan Puskesmas Pembantu	persen	58,00	64,00	66,00	68,00	70,00	74,00
1.2.14	Cakupan kunjungan bayi	persen	98,85	76,79	76,79	15.485,0 0	74,65	90,00
1.2.15	Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization	persen	94,00	100,00	100,00	98,00	98,00	94,00
1.3	Pekerjaan Umum							
1.3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	18,00	26,00	37,00	37,00	37,00	65,00
1.3.2	Rasio Jaringan Irigasi	rasio	0,40	0,54	0,54	0,54	0,64	0,64
1.3.3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	rasio						
1.3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	persen	-	-	-	43,77	48,12	51,56
1.3.5	Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk	rasio	-	-	-	-	-	-
1.3.6	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	rasio						
1.3.7	Rasio Rumah Layak Huni	rasio	-	-	-	-	0,83	0,83
1.3.8	Rasio Permukiman Layak Huni	rasio	-	-	-	-	-	0,30
1.3.9	Panjang Jalan dilalui roda empat	rasio	0,80	0,26	0,37	0,37	0,37	0,65

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.10	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	persen	-	-	-	-	-	-
1.3.11	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	persen	0,18	0,26	0,37	0,37	0,37	0,65
1.3.12	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	persen	-	-	-	3,50	3,50	3,50
1.3.13	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	persen	-	-	-	-	-	-
1.3.14	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	persen	-	-	-	-	-	-
1.3.15	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	persen	-	-	3,50	4,00	4,00	8,00
1.3.16	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kabupaten	persen	-	-	-	-	-	-
1.3.17	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	45,00	50,00	52,00	53,00	52,00	54,00
1.3.18	Lingkungan Pemukiman	Persen	-	-	-	-	-	-
1.4	Perumahan							
1.4.1	Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih	Persen	4,74	5,22	5,61	5,51	7,17	7,17
1.6	Perencanaan Pembangunan							
1.6.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.6.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.6.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.6.4	Persentase keselarasan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7	Perhubungan							
1.7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	jumlah	3.600,00	3.500,00	4.500,00	2.000,00	1.800,00	1.400,00
1.7.2	Rasio ijin trayek	rasio	-	-	-	-	-	-
1.7.3	Jumlah uji kir angkutan umum	jumlah	199,00	149,00	228,00	336,00	540,00	489,00
1.7.4	Jumlah terminal angkutan umum	jumlah	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.7.5	Jumlah angkutan darat	jumlah	100,00	100,00	100,00	151,00	173,00	175,00
1.7.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	0,07	0,07	0,07	0,15	0,16	0,17
1.7.7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
1.7.8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Harga (Rp)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.7.9	Pemasangan rambu-rambu	Unit	0,00	154,00	48,00	98,00	209,00	0,00
1.8	Lingkungan Hidup							
1.8.1	Persentase penanganan sampah	persen	-	-	8,90	10,00	20,00	16,40
1.8.2	Persentase penduduk berakses air minum	persen	-	-	-	28,20	31,00	32,40
1.8.3	Persentase Luas pemukiman yang tertata	persen	-	-	-	-	-	-
1.8.4	Pencemaran status mutu air	persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
1.8.5	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	persen	-	-	-	-	-	-
1.8.6	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	persen	-	-	-	-	-	-
1.8.7	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal	persen	-	-	-	-	-	-
1.8.8	Penegakan hukum lingkungan	Persen	-	-	-	-	-	-
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil							
1.10.1	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	Persen	62,10	63,15	65,05	70,02	71,15	74,00
1.10.2	Persentase bayi berakte kelahiran	Persen	45,00	47,00	49,00	50,80	52,13	53,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.10.3	pasangan berakte nikah	Pasang	74,00	76,43	78,11	80,15	81,90	83,00
1.10.4	Persentase kepemilikan KTP	Persen	45,00	46,88	49,12	51,11	53,09	55,00
1.10.5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Persen	20,00	20,16	22,33	23,16	24,11	25,00
1.10.6	Ketersediaan database kependudukan skala propinsi	ada/tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
1.10.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Sudah	Sudah
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak							
1.11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	-	4,20	4,34	4,39	4,95	5,00
1.11.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	-	95,60	95,66	95,61	95,05	95,00
1.11.3	Rasio KDRT	Rasio	-	0,04	0,01	0,01	0,08	0,08
1.11.4	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (Dinsostran)	Persen	-	-	-	-	-	-
1.11.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	-	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
1.11.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	persen	-	75,00	75,00	80,00	80,00	80,00
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera							
1.12.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	rata-rata	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.12.2	Persentase Akseptor KB	persen	-	65,82	81,37	82,05	82,50	76,21
1.12.3	Cakupan peserta KB aktif	persen	-	64,30	75,85	82,00	80,20	51,09
1.12.4	Persentase keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	persen	-	50,56	42,29	36,79	37,16	15,41
1.12.5	Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	persen	-	12,50	12,42	12,35	12,21	12,00
1.12.6	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif	persen	-	64,30	75,85	82,00	80,20	51,09

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.12.7	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet need)	Persen	-	23,13	15,89	14,13	14,57	20,02
1.12.8	Cakupan bina keluarga balita (BKB) ber KB)	Persen	-	82,00	82,50	83,70	77,79	98,94
1.12.9	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB	Persen	-	85,00	89,00	100,00	88,41	90,91
1.12.10	Cakupan PLKB/PKB disetiap desa/kelurahan	Persen	-	-	-	16,50	16,50	16,70
1.12.11	Keluarga pra sejahtera dan KS I	Persen	-	20,00	22,00	22,00	23,00	23,00
1.12.12	Cakupan PPKBD di setiap desa/kelurahan	persen	-	1,03	1,09	1,01	1,04	1,04
1.12.13	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	persen	-	96,77	91,84	98,99	97,98	95,96
1.13	Sosial							
1.13.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi	jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.2	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	orang		1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00
1.13.3	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	persen						
1.14	Ketenagakerjaan							
1.14.1	Angka Partisipasi angkatan kerja	jiwa	-	82,81	84,25	85,25	70,92	70,92
1.14.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	angka	-	-	4,30	4,30	8,60	8,60
1.14.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	-	82,21	84,25	85,29	84,97	106,95
1.14.4	Pencari kerja yang ditempatkan	Persen	-	10,00	11,00	11,00	12,00	12,00
1.14.5	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	-	2,30	2,32	2,46	2,84	2,59
1.14.6	Persentase keselamatan dan perlindungan	Persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
1.14.7	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
1.15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							

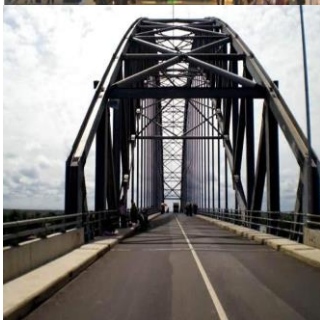
No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.15.1	Persentase koperasi aktif	persen	66,94	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97
1.17	Kebudayaan							
1.17.1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	jumlah	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	4,00
1.17.2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	jumlah	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	4,00
1.17.3	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	persen	0,00	0,00	11,49	11,49	11,49	13,79
1.18	Kepemudaan dan Olahraga							
1.18.1	Jumlah organisasi pemuda	jumlah	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00
1.18.2	Jumlah Orgasnisasi olahraga	jumlah	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00
1.18.3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	jumlah	5,00	5,00	2,00	7,00	5,00	4,00
1.18.4	Jumlah Kegiatan Olahraga	jumlah	2,00	8,00	6,00	8,00	10,00	7,00
1.18.5	Gelanggang/balai remaja	jumlah	0,66	0,69	0,75	0,81	0,97	0,84
1.18.6	Lapangan Olahraga	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
1.19.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP	jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
1.19.2	Kegiatan pembinaan politik daerah	jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.20.1	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	Rasio	2,32	2,28	2,33	2,29	2,28	2,29
1.20.7	Persentase penegakan PERDA	persen	0,05	15,00	25,00	30,00	40,00	65,00
1.20.8	Cakupan patrol petugas Satpol PP	jumlah	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	39,00
1.20.9	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketrentaman, keindahan) di kabupaten	persen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.10	Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten	persen						
1.20.11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	persen	3 Kecamatan	3 Kecamatan	3 Kecamatan	3 Kecamatan	3 Kecamatan	3 Kecamatan
1.20.12	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (wmk)	persen	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam
1.20.13	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	persen						
1.20.14	Sistem Informasi Manajemen Pemda	jumlah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.20.15	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada/tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
1.21	Ketahanan Pangan							
1.21.1	Regulasi Ketahanan Pangan	Ada/tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
1.21.2	Ketersediaan pangan utama							
	Beras	persen	121,70	121,70	121,70	121,70	121,70	121,70
	Daging	persen	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
	Telur	persen	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32
	Ikan	persen	33,90	33,90	33,90	33,90	33,90	33,90
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1.22.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	rata-rata	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
1.22.2	Rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK	rata-rata	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
1.22.3	Jumlah LSM yang aktif	jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.22.4	LPM berprestasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.22.5	Persentase PKK aktif	persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.22.6	Persentase posyandu aktif	persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23	Statistik							
1.23.1	Buku Kabupaten Dalam Angka	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.23.2	Buku PDRB Kabupaten	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.24	Kearsipan							
1.24.1	Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku	persen	0,00	0,00	11,11	13,88	13,88	13,88
1.24.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	jumlah kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.26	Perpustakaan							
1.26.1	Jumlah perpustakaan	buah	1,00	1,00	5,00	22,00	30,00	40,00
1.26.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	264,00	264,00	685,00	700,00	850,00	2.815,00
1.26.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	jumlah buku	500,00	500,00	702,00	1.402,00	2.142,00	2.617,00
2,00	Fokus Layanan Urusan Pilihan							
2.1	Pertanian							
2.1.1	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	kuintal per hektar	26,94	29,92	28,90	31,80	32,20	36,05
2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	persen		56,93	57,43	57,44	58,12	58,75
2.1.3	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	persen	20,58	21,62	22,65	23,84	25,03	25,03
2.1.4	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	persen	18,05	18,05	18,05	18,05	17,07	16,71
2.1.5	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	persen	20,58	21,62	22,65	23,84	25,03	25,03

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.5	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	persen	20,58	21,62	22,65	23,84	25,03	25,03
2.2	Kehutanan							
2.2.1	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	persen	0,74	2,58	2,18	0,07	1,04	1,04
2.2.2	Persentase kerusakan kawasan hutan	persen	0,01	0,01	5,12	0,01	0,01	0,01
2.2.3	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	persen	4,59	4,33	3,96	3,74	3,48	3,48
2.3	Energi dan Sumberdaya Mineral							
2.3.1	Persentase pertambangan tanpa izin	persen	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	12,50
2.3.2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	persen	0,27	0,27	0,27	0,27	0,43	0,01
2.4	Pariwisata							
2.4.1	Kunjungan wisata	Persen	2,47	2,27	2,06	1,88	1,73	1,73
2.4.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Kelautan dan Perikanan							
2.5.1	Produksi Perikanan	ton per tahun	15.453,6	22.083,15	18.143,42	14.098,36	17.848,01	20.600,86
2.5.2	Konsumsi ikan	Kg/kapita/thn	21,71	23,91	27,35	30,16	32,93	35,96
2.5.3	Cakupan bina kelompok nelayan	persen	10,00	12,29	18,01	20,39	24,32	27,16
2.5.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	persen	98,86	99,06	95,76	91,38	89,81	87,44
2.5.5	Produksi perikanan kelompok budidaya	persen	1,13	0,94	4,23	8.098	10,18	12,58
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
2.00	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
2.1	Perhubungan							
2.2.1	Ketaatan terhadap RTRW	persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Lingkungan Hidup							

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.1	Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih	persen	2.243,00	2.243,00	2.243,00	2.243,00	2.243,00	2.243,00
3.	Fokus Iklim Berinvestasi							
3.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.1.2	Jumlah demo	kali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Lama proses perizinan	hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari
3.1.6	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	Persen	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
4.	Fokus Sumber Daya Manusia							
4.1.	Ketenagakerjaan							
4.1.1	Rasio lulusan S1/S2/S3	rasio	412,00	412,00	426,00	422,00	422,00	422,00
4.1.2	Rasio ketergantungan	rasio	46,00	54,30	43,38	43,38	43,38	43,00



BAB III

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



RPJMD KABUPATEN
PULANG PISAU
TAHUN 2013-2018

BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidaktersedianya pendanaan pada suatu urusan pemerintahan.

Gambaran kinerja pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pulang Pisau, diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi APBD, perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah, permasalahan yang muncul serta potensi tantangan ke depan. Gambaran secara umum kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Pulang Pisau tersebut adalah sebagai berikut:

α. Pendapatan Daerah

Gambaran umum tentang Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang disajikan secara *series* menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2008-2012 tertuang pada Tabel 3.1.a.i.1.a.i.1.Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun Anggaran 2010-2012

(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI-			PERTUM B (%)
		2010	2011	2012	
4	PENDAPATAN	437.539,45	521.177,96	538.017,39	11,17
4.1	Pendapatan Asli Daerah	8.213,75	13.253,62	17.475,40	46,61
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	799,97	1.109,99	2.089,53	63,50
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.371,86	4.857,74	6.285,30	36,73
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	667,30	794,28	1.253,14	38,40
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.374,62	6.491,62	7.847,43	56,63
4.2	Dana Perimbangan	382.506,65	429.389,43	488.251,76	12,98
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	36.871,00	38.159,31	47.142,23	13,52
4.2.2	Dana Alokasi Umum	307.832,46	339.139,32	397.465,99	13,68
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	37.803,20	52.090,80	43.643,54	10,79
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	46.819,04	78.534,91	32.290,23	4,43
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Pendapatan Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	7.278,08	10.143,03	13.275,28	35,12
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	39.540,97	68.391,89	19.014,95	0,38
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Pulang Pisau TA 2010– 2012, diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa pertumbuhan rata-rata selama tahun 2010 – 2012 mencapai 11,7%. Struktur pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Dana Perimbangan yaitu sejumlah Rp382,5 Milyar pada tahun 2010 dan meningkat menjadi Rp488,2 Milyar pada tahun 2012, dengan rata-rata pertumbuhan 12,98% selama periode tahun 2010 -2012.

Untuk Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan rata-rata mencapai 46,61% untuk periode 2010 -2012. Dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi tersebut, perlu diketahui potensi riil Pendapatan Asli Daerah yang sebenarnya. Apabila Pendapatan Asli Daerah bisa diprediksi secara lebih pasti akan sangat berguna untuk pembangunan Kabupaten Pulang Pisau.

b. Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah secara umum akan disajikan secara series untuk menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang tertuang pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun Anggaran 2010-2012

(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI			PERTUM B (%)
		2010	2011	2012	
5	BELANJA	406.850,63	487.916,52	530.714,85	14,35
5.1	Belanja Tidak Langsung	203.429,38	212.275,84	242.516,13	9,30
5.1.1	Belanja Pegawai	174.624,67	192.157,30	214.440,82	10,82
5.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	4.638,79	2.550,41	8.322,00	90,64
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.966,13	3.860,74	3.506,80	(26,87)
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	250,00	0,00	0,00	0,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	16.548,58	13.643,05	14.511,27	(5,60)
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	401,21	64,34	1.735,24	1.256,53
5.2	Belanja Langsung	203.421,25	275.640,69	288.198,72	20,03
5.2.1	Belanja Pegawai	8.464,99	10.568,89	14.238,91	29,79
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	60.639,58	69.657,06	87.235,50	20,05
5.2.3	Belanja Modal	134.316,67	195.414,74	186.724,31	20,52

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Pulang Pisau TA 2010 – 2013, diolah

Dari Tabel 3.2 di atas terlihat bahwa pertumbuhan belanja daerah rata-rata selama tahun 2010-2012 mencapai 14,35% meningkat dari Rp406,9 Milyar pada tahun 2010 menjadi Rp530,7 Milyar pada tahun 2012. Rata-rata pertumbuhan belanja langsung sebesar 20,03% lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung yang hanya sebesar 9,3%, hal ini menunjukkan bahwa selama periode tahun anggaran 2010-2012 alokasi APBD Kabupaten Pulang Pisau untuk belanja program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat cenderung lebih besar dibanding dengan alokasi belanja lainnya.

c. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah akan disajikan secara series untuk menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang tertuang pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun Anggaran 2010-2012

(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI			PERTUMB (%)
		2010	2011	2012	
6	PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	8.221,55	30.900,23	58.564,19	182,69
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	8.160,87	30.900,23	58.564,19	184,08
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	60,68	0,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.031,77	5.598,98	7.893,73	5,35
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.250,00	800,00	1.500,00	25,75
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	6.781,77	4.798,98	6.393,73	2,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Pulang Pisau TA 2010– 2012, diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah mengalami pertumbuhan sangat tinggi yaitu sebesar 182,69% selama periode tahun 2010 -2012. Komponen Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). yaitu sejumlah Rp8,2 Milyar pada tahun 2010 dan meningkat menjadi Rp58,6 Milyar pada tahun 2012 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 184,08%. Sebaiknya SiLPA bisa ditekan seminimal mungkin sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

3.1.2 Neraca Daerah

Tujuan dari Analisis neraca daerah adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan

rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Gambaran mengenai neraca Kabupaten Pulang Pisau dalam kurun waktu tahun 2008-2012 disajikan pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2010-2012

(dalam juta rupiah)

URAIAN	2010	2011	2012
ASET/ AKTIVA			
ASET LANCAR			
Kas	31.359,50	58.678,84	58.086,77
Kas dan Bank	30.516,31	58.118,52	57.736,91
Kas di Bendahara Pengeluaran	383,91	444,17	236,09
Kas di Bendahara Penerimaan	459,27	10,36	7,98
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	105,79	105,78
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Deposito	0,00	0,00	0,00
Piutang	367,57	562,59	562,59
Piutang Pajak	7,35	7,35	7,35
Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00
Piutang TP / TGR	112,09	112,09	112,09
Piutang Lain-Lain Kepada Pihak Ketiga	148,70	343,72	343,72
Piutang lain-lain	99,43	99,43	99,43
Persediaan	2.344,92	2.235,34	1.970,92
JUMLAH ASET LANCAR	34.072,00	61.476,76	60.620,28
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Permanen	4.850,00	5.650,00	7.150,00
Penyertaan pada PDAM	1.250,00	1.250,00	1.750,00
Penyertaan pada BPD Kal-Teng	3.600,00	4.400,00	5.400,00
Investasi Non Permanen	532,92	532,92	532,92
Investasi Dana Bergulir	532,92	532,92	532,92
Dana bergulir diragukan tertagih	0,00	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	5.382,92	6.182,92	7.682,92
ASET TETAP			
Tanah	61.701,03	67.333,86	67.701,30
Peralatan dan Mesin	118.404,52	139.316,17	163.897,41
Gedung dan Bangunan	362.251,31	405.262,87	470.778,30

URAIAN	2010	2011	2012
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.068.661,32	1.187.010,33	1.284.797,92
Aset Tetap Lainnya	11.012,37	16.016,97	16.879,91
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.362,02	10.070,72	13.273,29
JUMLAH ASET TETAP	1.626.392,57	1.825.010,92	2.017.328,13
ASET LAINNYA			
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	662,83	669,98	669,98
Aset Lain-Lain	7.174,64	7.540,39	8.233,86
JUMLAH ASET LAINNYA	7.837,47	8.210,36	8.903,84
JUMLAH AKTIVA	1.673.684,95	1.900.880,96	2.094.535,17
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.691,05	6.496,68	1.534,10
Hutang kepada pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
Hutang Pemotongan Pajak Pusat PPh	0,00	105,41	105,41
Hutang Retensi	5.691,05	6.391,27	1.428,69
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00
Hutang Jangka Panjang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	5.691,05	6.496,68	1.534,10
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar			
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	30.900,23	58.562,69	57.973,00
Pendapatan yang Ditangguhkan	459,27	10,73	8,35
Cadangan Piutang	106,78	301,80	301,80
Cadangan Persediaan	2.344,92	2.235,34	1.970,92
Cadangan Piutang pada Pihak Ketiga	260,79	260,79	260,79
Dana Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(5.691,05)	(6.391,27)	(1.428,69)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	28.380,94	54.980,08	59.086,18
Ekuitas Dana Diinvestasikan			
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Pendek	0,00	532,92	532,92
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	5.382,92	5.650,00	7.150,00
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.626.392,57	1.825.010,92	2.017.402,89

URAIAN	2010	2011	2012
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	7.837,47	8.210,36	8.829,08
JUMLAH EKUITAS DANA DIINVESTASIKAN	1.639.612,95	1.839.404,20	2.033.914,89
Ekuitas Dana Cadangan			
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA Cadangan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA	1.667.993,90	1.894.384,28	2.093.001,07
JUMLAH PASIVA	1.673.684,95	1.900.880,96	2.094.535,17

Selanjutnya akan disajikan analisis terhadap neraca keuangan Kabupaten Pulang Pisau untuk periode tahun 2010-2012 yang mencakup rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas disajikan sebagai berikut:

RASIO LIKUIDITAS

Rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar dan rasio *quick*. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek yang dimilikinya.

Rumus yang digunakan adalah dengan membagi aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek

Kemudian *quick rasio* diperoleh dengan jalan mengurangi aset lancar dengan persediaan kemudian dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

Rasio quick = (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek

RASIO SOLVABILITAS

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

Rasio solvabilitas juga merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang ditanggung Pemerintah Daerah dibandingkan dengan aset yang

dimiliki atau untuk mengukur sejauh mana aset Pemerintah Daerah dibiayai dari hutang. Rumus rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah adalah:

Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset

Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas

Hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk Tahun 2010-2012 berdasarkan formulasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Analisis Rasio Keuangan
Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2010-2012

No	Uraian	2010	2011	2012
A	Rasio Likuiditas			
1	Rasio lancar (current ratio)	5,99	9,46	39,52
2	Rasio quick (quick ratio)	5,57	9,12	38,23
B	Rasio Solvabilitas			
1	Rasio total hutang terhadap total asset	0,00340	0,00342	0,00073
2	Rasio hutang terhadap modal	0,00341	0,00343	0,00073

Berdasarkan data neraca Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tersaji pada Tabel 3.4 dan hasil perhitungan rasio keuangan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.5 menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuditas yang digunakan dalam analisis yaitu :

1. Rasio Lancar

Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada Tahun 2012 adalah sebesar 39,52. Hal ini berarti kemampuan membayar hutang Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sebesar 39,52 kali lebih.

2. Rasio Quick

Rasio *Quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel diatas, Rasio *Quick* pada Tahun 2012 adalah sebesar 38,23. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

Sedangkan Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas :

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada Tahun 2012 sebesar 0,00073. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2012 Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sebesar 0,00073. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Pulang Pisau, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kurun waktu lima tahun mulai dari 2008 sampai dengan tahun 2012 pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

1) Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah melakukan berbagai upaya berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah Tahun 2008-2012 meliputi:

- a). Penggalan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah, meningkatkan pendataan potensi pajak/retribusi daerah serta meningkatkan pemungutan pajak/retribusi daerah.
- b). Melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak dan retribusi daerah, menyiapkan sarana untuk pemasangan iklan, pekan panutan pembayaran PBB, pemberian penghargaan bagi petugas pemungut yang berprestasi, penegakan sanksi bagi wajib pajak/wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
- c). Meningkatkan koordinasi dengan para pengusaha serta memberi kesempatan kepada pengusaha berpartisipasi dalam mengelola dan melaksanakan pembangunan khususnya bagi yang telah memenuhi kewajiban pajak/retribusi.

- d). Mengutamakan produksi lokal dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan memenuhi kewajiban pajak/retribusi.
- e). Memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran membayar pajak/retribusi.
- f). Melakukan pendataan ulang terhadap aset atau kekayaan daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah serta mengoptimalkan penggunaannya dalam memaksimalkan pendapatan daerah.
- g). Mengintensifkan dan mengevaluasi semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan memfungsikan tupoksi masing-masing Dinas/Badan sampai ketingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- i). Meningkatkan koordinasi, konsultasi maupun rekonsiliasi khususnya bagi pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan maupun Bantuan Keuangan dari Provinsi, sehingga diharapkan realisasi pendapatan tersebut dapat terlaksana secara transparan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menetapkan kebijakan terkait pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat jenis, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam; Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain – lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya.

2). Kebijakan Umum Belanja Daerah

Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang belanja daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
- c. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:
 1. Dana alokasi umum diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat;
 2. Dana alokasi khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah;

e. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Pulang Pisau, termasuk gaji, uang refresentasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk penghasilan/penerimaan lainnya ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai yakni memberikan tambahan penghasilan berdasarkan kemampuan daerah.

f. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

g. Belanja Modal

Belanja Modal dominan digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi/jaringan, peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi secara umum dari kebijakan belanja daerah Kabupaten Pulang Pisau pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Secara umum tentang belanja daerah yang disajikan secara series menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Pulang Pisau yang tertuang pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2010-2012

(dalam jutaan)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2010			Tahun Anggaran 2011			Tahun Anggaran 2012		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
5.1	Belanja Tidak Langsung	205.104,67	203.429,38	99,18	224.501,14	212.275,84	94,55	256.991,61	242.516,13	94,37
5.1.1	Belanja Pegawai	175.997,87	174.624,67	99,22	198.719,39	192.157,30	96,70	223.433,91	214.440,82	95,98
5.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	4.667,54	4.638,79	99,38	2.994,97	2.550,41	85,16	8.742,95	8.322,00	95,19
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.234,53	6.966,13	96,29	5.429,49	3.860,74	71,11	3.606,54	3.506,80	97,23
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	16.554,73	16.548,58	99,96	13.806,25	13.643,05	98,82	14.659,84	14.511,27	98,99
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	400,00	401,21	100,30	3.301,04	64,34	1,95	6.298,37	1.735,24	27,55
5.2	Belanja Langsung	233.819,42	203.421,25	87,00	319.672,83	275.640,69	86,23	325.847,10	288.198,72	88,45
5.2.1	Belanja Pegawai	9.123,80	8.464,99	92,78	11.307,42	10.568,89	93,47	15.585,02	14.238,91	91,36
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	67.884,80	60.639,58	89,33	77.205,10	69.657,06	90,22	98.436,63	87.235,50	88,62
5.2.3	Belanja Modal	156.810,82	134.316,67	85,66	231.160,32	195.414,74	84,54	211.825,45	186.724,31	88,15

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Pulang Pisau TA 2010– 2012, diolah

2. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

Secara umum tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Pulang Pisau tertuang pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2011-2012

(dalam juta rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012
		Realisasi	Realisasi
5	BELANJA	253.640,35	283.300,57
5.1	Belanja Tidak Langsung	192.157,30	214.440,82
5.1.1	Belanja Pegawai	192.157,30	214.440,82
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	175.403,30	193.969,57
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	14.505,00	18.969,50
5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.692,05	1.501,74
5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	556,96	-
5.2	Belanja Langsung	61.483,05	68.859,75
5.2.1	Belanja Pegawai	10.568,89	14.238,91
5.2.1.01	Honorarium PNS	3.069,39	3.857,11
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.418,14	6.879,64
5.2.1.03	Uang Lembur	325,35	449,58
5.2.1.04	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.756,01	-
5.2.1.05	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-	3.052,58
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	35.656,47	45.174,95
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.961,11	7.253,20
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	109,01	231,63
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.402,39	2.589,04
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.598,70	4.460,60
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	146,46	246,78
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	132,26	256,94
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	186,62	101,07
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.170,05	7.628,17
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	344,51	402,56
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	194,78	154,68
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	215,94	537,72
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	33,00	-
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.855,02	4.311,49
5.2.2.18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	45,75	49,15
5.2.2.19	Belanja Pemulangan Pegawai	263,00	112,50
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.208,80	5.820,48
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.996,31	3.086,32
5.2.2.22	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	6.792,77	-
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	7.932,61

Nomor Urut	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012
		Realisasi	Realisasi
5.2.3	Belanja Modal	15.257,68	9.445,89
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	3.121,07	1.269,11
5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	184,09	567,27
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	295,46	108,88
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	628,24	1.206,29
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.219,92	2.077,34
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.649,70	1.647,80
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	44,18	170,88
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	565,28	813,70
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	281,64	229,91
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	357,49	836,70
5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	76,37	123,59
5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	2.200,22	393,47
5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	-	0,95
5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	2.634,01	-

Berdasarkan Tabel 3.8, diperoleh gambaran Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dari tahun anggaran 2011-2012, sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR (RP)	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN) (RP)	PROSENTASE
		(a)	(b)	(a) / (b) X 100%
1	Tahun Anggaran 2011	253.640,35	513.217,77	49,42%
2	Tahun Anggaran 2012	283.300,57	581.385,32	48,73%

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pulang Pisau alokasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur selama tahun anggaran 2011-2012 cenderung lebih kecil dibandingkan dengan total pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pulang Pisau lebih mengutamakan alokasi untuk pemenuhan kebutuhan non-aparatur (publik) dan harus ditingkatkan untuk alokasi tahun-tahun berikutnya.

3. Pengeluaran wajib dan mengikat serta Prioritas Utama

Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

Secara umum tentang realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Pulang Pisau pada 2 (dua) tahun terakhir, tertuang pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2011-2012

(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	2011	2012	KENAIKAN
		(Rp)	(Rp)	%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	177.652,30	195.471,31	10,03
	Gaji dan Tunjangan	175.403,30	193.969,57	10,58
	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.692,05	1.501,74	(11,25)
	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	556,96	-	(100,00)
B	BELANJA LANGSUNG	6.140,57	7.499,98	22,14
	Belanja Jasa Kantor	5.961,11	7.253,20	21,68
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	146,46	246,78	68,50
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	33,00	-	(100,00)
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.598,98	7.893,73	40,99
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	800,00	1.500,00	87,50
	Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga	4.798,98	6.393,73	33,23
	JUMLAH (A+B+C)	189.391,84	210.865,02	11,34

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan Kabupaten Pulang Pisau dalam kurun waktu tahun 2010-2012 akan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.10.
Defisit Riil dan Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2010-2012

(dalam juta rupiah)

NO	Uraian	2010	2011	2012	PERTUM B (%)
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	PENDAPATAN DAERAH	437.539,45	521.177,96	538.017,39	11,17
2	BELANJA DAERAH	406.850,63	487.916,52	530.714,85	14,35
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.031,77	5.598,98	7.893,73	5,35
A.	Defisit Riil	22.657,05	27.662,46	-591,19	(40,02)
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	8.160,87	30.900,23	58.564,19	184,08
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
B.	Total Realisasi Penerimaan	8.160,87	30.900,23	58.564,19	184,08
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		30.817,93	58.562,69	57.973,00	44,51

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Pulang Pisau TA 2010– 2012, diolah

Tabel 3.11.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) riil
Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2010-2012

NO	URAIAN	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	RATA-RATA PERTUMBUHAN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
A	Jumlah SiLPA	8.160,87	30.900,23	58.564,19	184,08
1	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	
2	Kegiatan lanjutan	0	0	0	
SiLPA riil (A-1-2)		8.160,87	30.900,23	58.564,19	184,08

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Pulang PisauTA 2010– 2012, diolah

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan

di bidang pinjaman daerah.

- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

3.3 Kerangka Pendanaan

Tujuan dari Analisis kerangka pendanaan adalah untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Tahap awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan Kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Dalam menghitung proyeksi pendapatan daerah menggunakan data rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan kurunwaktu 2010-2012, yakni 11,17% per tahun. Dengan menggunakan data Perubahan APBD Tahun 2013 sebagai tahun dasar proyeksi dan mempertimbangkan bahwa perilaku serta karakteristik pertumbuhan masing-masing rincian obyek pendapatan yang bervariasi, maka diperoleh proyeksi

pendapatan daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk tahun anggaran 2014-2018 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12.
Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2014-2018

(dalam juta rupiah)

No.	URAIAN	PERUBAHAN	PROYEKSI					RATA-RATA PERTUMB (%)
		APBD 2013	APBD 2014	APBD 2015	APBD 2016	APBD 2017	APBD 2018	
1	PENDAPATAN DAERAH	637.640,70	693.553,01	770.296,48	855.741,94	951.012,57	1.057.376,94	10,65
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	21.500,00	22.000,00	24.200,00	26.532,89	29.011,96	31.651,82	8,08
1.1.1	Pajak Daerah	5.889,00	6.189,00	6.807,90	7.488,69	8.237,56	9.061,31	9,02
1.1.2	Retribusi Daerah	8.611,00	8.711,00	9.582,10	10.453,20	11.324,30	12.195,40	7,26
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.400,00	1.450,00	1.595,00	1.754,50	1.929,95	2.122,95	8,71
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.600,00	5.650,00	6.215,00	6.836,50	7.520,15	8.272,17	8,18
1.2.	Dana Perimbangan	541.115,89	595.951,39	669.296,95	751.160,34	842.648,86	945.013,79	11,80
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	44.731,08	43.118,80	44.731,08	46.343,36	47.955,64	49.567,91	2,12
1.2.3	Dana Alokasi Umum	453.776,88	504.013,06	569.534,76	643.574,28	727.238,94	821.780,00	12,61
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	42.607,93	48.819,52	55.031,11	61.242,70	67.454,29	73.665,88	11,59
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	75.024,81	75.601,62	76.799,52	78.048,71	79.351,74	80.711,32	1,47
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Prov. dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	20.109,21	20.513,82	21.539,51	22.616,48	23.747,31	24.934,67	4,40
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	45.116,00	45.288,21	45.460,42	45.632,63	45.804,84	45.977,05	0,38
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Prov./ Pemerintah Daerah Lainnya	9.799,60	9.799,60	9.799,60	9.799,60	9.799,60	9.799,60	-
1.3.6	Lain-lain Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Pulang Pisau TA 2010– 2012, diolah

3.3.2 Proyeksi SiLPA

Proyeksi SiLPA untuk kurun waktu tahun 2014-2018 menggunakan data pertumbuhan SiLPA Tabel 3.11. Tingkat pertumbuhan SiLPA 2010-2012 cukup besar yaitu 184,08%. Nilai SiLPA tahun anggaran 2012 sejumlah Rp58,6 Milyar atau 9,8% dari total APBD (pendapatan daerah + penerimaan daerah), dengan mempertimbangkan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD maka diperoleh proyeksi SiLPA berikut ini :

Tabel 3.13.
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2014-2018

(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN PROYEKSI				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	48.807	26.960	29.951	33.285	37.008

Berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Pulang Pisau dalam jangka waktu lima tahun mendatang tahun 2014-2018, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.14.
Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2014-2018

(dalam juta rupiah)

No.	URAIAN	PROYEKSI				
		APBD 2014 (Rp.)	APBD 2015 (Rp.)	APBD 2016 (Rp.)	APBD 2017 (Rp.)	APBD 2018 (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Daerah	693.553,01	770.296,48	855.741,94	951.012,57	1.057.376,94
2	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	48.807,31	26.960,38	29.950,97	33.285,44	37.008,19
	Total Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah	742.360,32	797.256,85	885.692,91	984.298,01	1.094.385,13

3.3.3 Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2010-2012. Pada Tabel 3.9 hasil proyeksi dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.15.
Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2014-2018

(dalam juta rupiah)

N O	URAIAN	PROYEKSI					Rata-rata Pertumbuh an
		2014	2015	2016	2017	2018	%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	308.493,33	322.637,48	336.785,68	350.938,33	365.095,87	4,30
1	Belanja Pegawai	285.844,77	298.012,22	310.179,67	322.347,12	334.514,57	4,01
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0,00
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	404,60	445,06	489,57	538,53	592,38	10,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	22.243,96	24.180,20	26.116,44	28.052,68	29.988,92	7,76
B	BELANJA LANGSUNG	3.891,64	4.223,99	4.591,74	4.998,42	5.447,94	8,77
1	Belanja Pegawai BLUD	-	-	-	-	-	0,00
2	Belanja Barang Jasa BLUD	-	-	-	-	-	0,00

3	Belanja Jasa Kantor (tagihan bulanan: telepon,air, listrik,internet)	3.539,54	3.893,49	4.282,84	4.711,12	5.182,24	10,00
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	352,10	330,50	308,90	287,30	265,70	-6,80
5	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-	0,00
	PRIORITAS I : JUMLAH (A+B)	312.384,97	326.861,48	341.377,42	355.936,75	370.543,81	4,36

3.3.4 Kebijakan Alokasi Anggaran

Setelah membuat proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, hal yang perlu ditetapkan selanjutnya adalah kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas.

Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan:

- program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2013-2018, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen) dan bidang kesehatan 10% (sepuluh persen). Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, serta belanja tidak terduga

Tabel 3.16.
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2014-2018

(dalam juta rupiah)

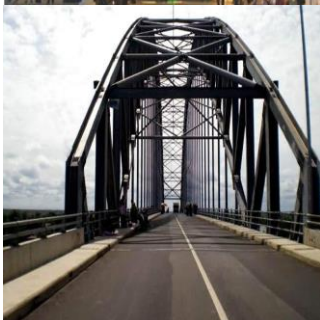
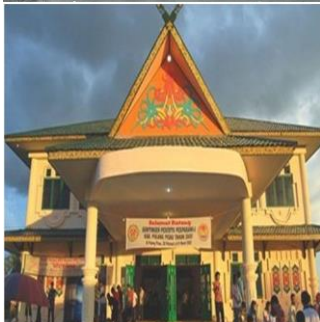
No.	URAIAN	PROYEKSI									
		(%)	APBD 2014 (Rp.)	(%)	APBD 2015 (Rp.)	(%)	APBD 2016 (Rp.)	(%)	APBD 2017 (Rp.)	(%)	APBD 2018 (Rp.)
1	2	3		4		5		6		7	
1.	Prioritas I	46,17	312.385	44,95	326.861	42,61	341.377	40,42	355.937	38,06	370.544
	Belanja Tidak Langsung	42,57	308.493	41,71	322.637	39,63	336.786	37,68	350.938	35,55	365.096
	Belanja Langsung	3,60	3.892	3,24	4.224	2,98	4.592	2,74	4.998	2,51	5.448
2.	Prioritas II	51,96	396.372	53,90	455.426	56,25	526.473	58,48	603.846	60,87	696.553
3.	Prioritas III	1,86	7.296	1,15	7.969	1,14	8.842	1,10	9.516	1,07	10.289
	Total	100,00	716.053	100,00	790.257	100,00	876.693	100,00	969.298	100,00	1.077.385

Tabel 3.17
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2014-2018

(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
A	KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	742.360,32	797.256,85	885.692,91	984.298,01	1.094.385,13
1	PENDAPATAN	693.553,01	770.296,48	855.741,94	951.012,57	1.057.376,94
2	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	48.807,31	26.960,38	29.950,97	33.285,44	37.008,19
B	BELANJA	716.053,01	790.256,85	876.692,91	969.298,01	1.077.385,13
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	315.789,53	330.606,81	345.628,14	360.453,92	375.384,59
	PRIORITAS I	308.493,33	322.637,48	336.785,68	350.938,33	365.095,87

a	Belanja Pegawai	285.844,77	298.012,22	310.179,67	322.347,12	334.514,57
b	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	404,60	445,06	489,57	538,53	592,38
e	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	22.243,96	24.180,20	26.116,44	28.052,68	29.988,92
	PRIORITAS III	7.296,19	7.969,32	8.842,46	9.515,59	10.288,72
a	Belanja Hibah	3.814,88	3.914,88	4.214,88	4.314,88	4.514,88
b	Belanja Bantuan Sosial	3.231,31	3.554,45	3.877,58	4.200,71	4.523,84
c	Belanja Tidak Terduga	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00
2	BELANJA LANGSUNG	400.263,48	459.650,04	531.064,77	608.844,09	702.000,54
	PRIORITAS I	3.891,64	4.223,99	4.591,74	4.998,42	5.447,94
a	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Belanja Barang Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Belanja Jasa Kantor	3.539,54	3.893,49	4.282,84	4.711,12	5.182,24
d	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	352,10	330,50	308,90	287,30	265,70
e	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIORITAS II	396.371,85	455.426,05	526.473,03	603.845,67	696.552,60
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	26.307,31	7.000,00	9.000,00	15.000,00	17.000,00
	Pembayaran Pokok Hutang	21.307,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Penyertaan Modal	5.000,00	7.000,00	9.000,00	10.000,00	12.000,00
	A-(B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS



RPJMD KABUPATEN
PULANG PISAU
TAHUN 2013-2018

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Permasalahan pembangunan merupakan agenda utama pembangunan yang harus diprioritaskan untuk dituntaskan. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir untuk periode tahun 2008 – tahun 2013 di Kabupaten Pulang Pisau serta berdasarkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskan permasalahan pembangunan pembangunan daerah jangka menengah di Kabupaten Pulang Pisau seperti berikut ini:

4.1.1 Masalah Infrastruktur Wilayah

- 1) Tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata di tiap kecamatan
- 2) Kualitas jalan dan jembatan yang masih rendah
- 3) Jaringan irigasi yang masih sedikit
- 4) Akses air bersih yang masih kecil

4.1.2 Masalah Kesehatan

- 1) Belum optimalnya Derajat Kesehatan Masyarakat dalam mempercepat pencapaian target MDG's
- 2) Masyarakat masih ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan kesehatan, promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

- 3) Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu dan Poskesdes masih rendah.
- 4) Belum Terpenuhinya secara menyeluruh Sarana Fisik dan Sarana Peralatan Kesehatan lainnya di Tingkat Puskesmas Maupun Jejaringnya

4.1.3 Masalah Pendidikan

- 1) Rendahnya angka rata-rata lama sekolah
- 2) Rendahnya angka rasio sekolah terhadap murid untuk tingkat pendidikan menengah atas
- 3) Rendahnya angka partisipasi kasar di tingkat pendidikan menengah atas
- 4) Rendahnya angka partisipasi murni untuk tingkat pendidikan menengah atas

4.1.4 Masalah Ekonomi Kerakyatan

- 1) Rendahnya jumlah koperasi aktif
- 2) Sistem manajemen usaha koperasi dan UMKM yang perlu ditingkatkan
- 3) Sistem kelembagaan koperasi dan UMKM yang perlu ditingkatkan;
- 4) SDM pengelola koperasi dan UMKM yang masih rendah;
- 5) Akses untuk pemodalan bagi koperasi dan UMKM yang masih rendah

4.1.5 Masalah Pertanian dan Peternakan

- 1) Produktivitas hasil tanaman pangan yang masih rendah.
- 2) Menurunnya populasi ternak sapi
- 3) Rendahnya adopsi dan inovasi teknologi pertanian
- 4) Masih rendahnya keterampilan/keahlian petani dan petugas
- 5) Belum optimal pemberdayaan kelembagaan petani
- 6) Keterbatasan Infrastruktur sarana dan prasarana Peternakan
- 7) Meningkatnya pemanfaatan lahan pertanian produktif/potensial peruntukan lain
- 8) Lemahnya permodalan petani.
- 9) Belum ada komoditas unggulan daerah di bidang peternakan.

4.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap **visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota sekitar** agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Sumber lain bagi informasi atau isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional yang berkorelasi atau mempengaruhi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Penentuan data atau informasi menjadi isu strategis sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

4.2.1. Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Agenda Pembangunan Internasional

Dari uraian di atas maka akan dikaji terlebih dahulu mengenai kebijakan pembangunan nasional, kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, kajian agenda pembangunan internasional, dan kajian pembangunan daerah kabupaten/kota sekitar.

4.2.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014

RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Di dalam RPJMN ditetapkan Visi Indonesia 2014, yaitu

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN

Kemudian visi dan misi diturunkan ke level operasional dengan cara menetapkan 11 prioritas nasional supaya lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Mayoritas sumber daya akan dialokasikan untuk mengerjakan 11 prioritas nasional yang terdiri dari:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan

4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
11. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

Pada setiap program, terdapat substansi inti yang berisi aspek-aspek pada sebuah program yang dilengkapi dengan target yang terukur. Substansi inti ini hendaknya menjadi target bersama yang harus dikejar oleh seluruh daerah, tidak terkecuali oleh Kabupaten Pulang Pisau, sebagai bentuk kontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia 2014.

4.2.2. Kebijakan Internasional

4.2.2.1. *Millenium Development Goals (MDG's)*

Kajian agenda pembangunan internasional dunia adalah tentang *Millenium Development Goals (MDG's)*. Indonesia telah berkomitmen terhadap pencapaian MDG's. Oleh karena itu, sudah merupakan suatu keharusan bagi seluruh daerah di Indonesia, termasuk kabupaten Pulang Pisau, untuk menggunakan target yang dicanangkan dalam MDGs sebagai referensi dalam penetapan target pembangunan daerah masing-masing.

Tujuan pembangunan milenium (MDG's) terdiri dari:

1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan;
2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal;
3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Memperbaiki kesehatan maternal;

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya;
7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup; dan
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan

Isu-isu MDGs di atas juga dapat dijadikan sebagai isu strategis RPJMD Kabupaten Pulang Pisau periode 2013 - 2018, apabila telah dilakukan kajian mengenai relevansi isu MDG dengan permasalahan riil yang ada di Kabupaten Pulang Pisau.

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

4.2.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk menjaga sinergitas pembangunan secara berjenjang dari pembangunan nasional hingga tingkat daerah maka perlu dipahami kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, khusus untuk periode pembangunan jangka panjang. Dalam sub bab ini akan dibahas tentang Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah.

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 yang telah disepakati adalah:

KALIMANTAN TENGAH YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL

Adapun misi pembangunan daerah Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang maju, mandiri dan adil adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah
2. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang

berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

3. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
5. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
6. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
8. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan
10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah

11. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang maju, mandiri dan adil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.2.3.2. Rencana Pembangunan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah

Visi pembangunan Kalimantan Tengah sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yaitu ”

**MENERUSKAN DAN MENUNTASKAN PEMBANGUNAN KALIMANTAN
TENGAH AGAR RAKYAT LEBIH SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DEMI
KEJAYAAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)**

Pengertian tentang **masyarakat sejahtera** adalah:

1. Tercapai angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahun dan meratanya hasil-hasil pembangunan keseluruhan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan sarana prasarana penunjang.
3. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya kesenjangan pendapatan.
4. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka.
5. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak sosial rakyat dan membaiknya mutu lingkungan hidup.

Sedangkan, pengertian tentang **masyarakat bermartabat** adalah terciptanya masyarakat yang memiliki nilai martabat yang tinggi dengan

tetap menjunjung budaya bangsa dan didasarkan kepada semangat HUMA BETANG dan BHINNEKA TUNGGAL IKA.

Perwujudan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah jangka menengah ditempuh melalui misi pembangunan daerah. Misi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

1. Sinergi dan Harmonisasi Pembangunan Kewilayahan Kalimantan Tengah melalui pemantapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.
2. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata.
3. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau.
4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat.
5. Pengembangan dan penguatan ekonomi Kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan.
6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah.
7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah.

Untuk menjabarkan misi agar jelas wujudnya dalam masa lima tahun ke depan, maka ditetapkan **tujuan pembangunan** dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut.

1. Revitalisasi dan terciptanya *cluster-cluster* ekonomi unggulan di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota
2. Terselenggaranya penataan ruang yang memperhatikan keberlanjutan sumber daya wilayah

3. Terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau.
4. Tersedianya akses infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok wilayah.
5. Meningkatnya sistem layanan kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau.
6. Tersedianya akses infrastruktur Kesehatan dasar hingga ke pelosok wilayah.
7. Terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan.
8. Tersedianya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.
9. Tersedianya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat.
10. Terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu.
11. Terselenggaranya kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar.
12. Meningkatnya daya saing masyarakat.
13. Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah.
14. Terwujudnya soliditas antarkelompok masyarakat

Adapun permasalahan yang terdapat di RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Masalah penyediaan infrastruktur pembangunan
2. Masalah pengembangan ekonomi lokal
3. Masalah kualitas dan keterjangkauan pendidikan
4. Masalah bidang kesejahteraan sosial
5. Masalah pengembangan kapasitas birokrasi
6. Masalah pengelolaan sumber daya alam

4.2.3.3. Program Inisiatif Provinsi Kalimantan Tengah

Selain menelaah visi dan misi RPJMD Kalimantan Tengah, terdapat beberapa program pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah lainnya, sebagai berikut:

a) *Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)*

Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (program membangun dan menjaga desa) yang dilaksanakan secara bersama-sama, baik pemerintah, masyarakat, dan pengusaha. Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu dimulai sejak tahun 2008. Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu bertujuan untuk mewujudkan desa/kelurahan percontohan yang mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki, sehingga mampu memacu pertumbuhan desa/kelurahan sekitarnya. Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu telah berhasil mengangkat sebanyak 210 desa/kelurahan.

b) *Kalteng Harati*

Program Kalteng Harati atau Kalteng Pintar yang dimulai pada 2 Mei 2010 bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Program Kalteng Harati mengedepankan lima prioritas, yakni kesejahteraan guru, pendidikan dan pelatihan guru, beasiswa untuk siswa berprestasi, penyediaan dan pendistribusian buku-buku pelajaran, meningkatkan kualitas mutu belajar mengajar.

c) *Kalteng Barigas*

Program Kalteng Barigas (Kalteng Sehat) diluncurkan pada tahun 2010. Program Kalteng Barigas ini untuk menjadikan masyarakat Kalteng yang sehat. Program Kalteng Barigas yang dimanifestasikan ke dalam program pembangunan kesehatan diartikan sebagai kondisi masyarakat Kalteng yang mempunyai kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat sehingga produktif secara sosial dan

ekonomis serta menjadi sumber daya yang kompetitif dalam menunjang kesinambungan pembangunan.

d) *Kalteng Besuh*

Program Kalteng Besuh (Kalteng Kenyang) diluncurkan pada bulan Juni 2013 di Kabupaten Gunung Mas. Program Kalteng Besuh merupakan program dalam bidang pertanian dan perikanan. Hasil yang diharapkan dari Program Kalteng Besuh adalah terwujudnya ketahanan pangan yang harus berdaulat pangan.

4.2.4. Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya

Di dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Kalimantan Tengah, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Pulang Pisau akan meninjau kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang berada di sekitar Kabupaten Pulang Pisau.

Berikut ini di tabel 4.1 akan ditampilkan kajian terhadap kebijakan pembangunan di kabupaten/kota di sekitar Kabupaten Pulang Pisau:

Tabel 4.1
Kebijakan Daerah Lain

NO	NAMA DAERAH LAIN	PERIODE RPJMD	KEBIJAKAN TERKAIT	KETERANGAN
1	Kabupaten Kapuas	2013 - 2018	<p>Isu Strategis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Ekonomi Daerah • Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) • Pembangunan Infrastruktur • Permasalahan bidang Kesejahteraan Sosial <p>Arah Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan cakupan layanan, akses dan distribusi infrastruktur • Peningkatan cakupan layanan, akses dan distribusi rumah layak • Peningkatan cakupan layanan, akses dan distribusi infrastruktur • Peningkatan produktivitas hasil pertanian • Intensifikasi pertanian dan diversifikasi pangan • Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup • Harmonisasi dan deregulasi peraturan 	

NO	NAMA DAERAH LAIN	PERIODE RPJMD	KEBIJAKAN TERKAIT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pola kerjasama yang menyerap tenaga kerja lokal 	
2	Kabupaten Katingan	2013 - 2018		Masih dalam proses penyusunan
3	Kabupaten Gunung Mas	2013 - 2018		Masih dalam proses penyusunan
4	Kota Palangka Raya	2013 - 2018	.	Masih dalam proses penyusunan

4.2.5. Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau 2006 - 2026

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulang Pisau memuat arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dengan berbasis pada agribisnis dan agro industri
3. Meningkatkan pembangunan prasarana transportasi dan pembangunan Pelabuhan yang terintegrasi dengan pembangunan Kereta Api di Kalimantan Tengah
4. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
5. Mendorong kehidupan masyarakat yang tertib, taat hukum, dinamis dan demokratis, menghargai nilai-nilai luhur agama dan budaya lokal sebagai bagian dari budaya nasional.
6. Mewujudkan Tata Pemerintahan daerah yang baik dan bersih

Adapun sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulang Pisau 2006 – 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
2. Terwujudnya perekonomian daerah yang maju dengan berbasis pada agribisnis dan agro industri.
3. Terbangunnya prasarana transportasi dan pelabuhan di Kabupaten Pulang Pisau yang terintegrasi dengan Kereta Api di Kalimantan Tengah
4. Berfungsinya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan

5. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, taat hukum, dinamis dan demokratis, menghargai nilai-nilai luhur agama dan budaya lokal sebagai bagian dari budaya nasional
6. Terwujudnya tata Pemerintahan yang baik dan bersih

4.2.6. Penetapan Isu Strategis

Isu-isu strategis di Kabupaten Pulang Pisau untuk periode tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan secara bersama yang terdiri dari:

1. **Peningkatan aksesibilitas daerah, irigasi teknis, air bersih dan kelistrikan**

Kabupaten Pulang Pisau sebagai daerah yang baru berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002. Saat ini, kabupaten Pulang Pisau terdiri dari 8 kecamatan, dan 99 desa. Dengan kondisi geografi yang sangat luas dan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata serta ketersediaan infrastruktur dasar seperti: jalan, air, listrik yang masih sangat terbatas. Infrastruktur dasar tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah akan membuat perekonomian semakin maju.

Adapun irigasi teknis sangat diperlukan karena penduduk Kabupaten Pulang Pisau mayoritas bekerja di bidang pertanian. Keberadaan irigasi teknis akan sangat membantu mayoritas penduduk Kabupaten Pulang Pisau yang bekerja di sektor pertanian di dalam meningkatkan hasil pertanian.

2. **Pengembangan sektor dan komoditas unggulan daerah.**

Kabupaten Pulang Pisau mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, perkebunan, perburuan, dan peternakan. Untuk bidang pertanian, jenis tanaman yang ditanam secara mayoritas adalah: padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu. Untuk bidang peternakan, jenis hewan yang dikembangkan secara mayoritas adalah: sapi, babi, dan

unggas. Untuk perkebunan, jenis tanaman yang ditanam secara mayoritas adalah: karet, dan kelapa swait.

Untuk mendapatkan nilai lebih dari bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan perlu dilakukan usaha agar produktivitas dari tanaman maupun peternakan yang sedang dikembangkan menjadi lebih produktif lagi. Hal lain yang perlu dilakukan adalah penelitian mengenai komoditas yang bisa dijadikan unggulan daerah sehingga menghasilkan nilai lebih bagi masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan tersebut.

3. Peningkatan akses dan layanan pendidikan masyarakat.

Berdasarkan data perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) se-Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan bahwa Kabupaten Pulang Pisau memiliki IPM yang paling rendah. Di dalam variabel IPM terdapat angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Untuk kedua variable tersebut, Kabupaten Pulang Pisau menempati posisi paling bawah se-Provinsi Kalimantan Tengah.

Usaha untuk meningkatkan IPM melalui salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan akses pendidikan. Peningkatan akses dan layanan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf di Kabupaten Pulang Pisau.

Peningkatan akses dan layanan pendidikan diharapkan lebih lanjut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Pulang Pisau.

4. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Untuk bidang kesehatan, kekurangan dokter menjadi permasalahan yang harus bisa ditangani. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau harus bisa mencari solusi alternatif agar para dokter mau bekerja di Kabupaten Pulang Pisau. Apabila kekurangan dokter tidak bisa ditangani maka

masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau tidak bisa tertangani dengan baik apabila berada dalam kondisi sakit.

Untuk sarana fisik dan sarana peralatan kesehatan lainnya di tingkat puskesmas maupun jejaringnya perlu lebih ditingkatkan kualitasnya. Dengan peningkatan kualitas diharapkan puskesmas dan jejaringnya dapat membuat masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau lebih sehat dan dapat hidup lebih panjang sehingga angka harapan hidup di Kabupaten Pulang Pisau tidak menjadi yang terendah se-Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM dan koperasi

Salah satu cara meningkatkan perekonomian di Kabupaten Pulang Pisau adalah pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Keberhasilan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dapat membuat masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau sejahtera.

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau harus dapat mengambil manfaat dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. Di mana usaha mikro, kecil, dan menengah dapat diberdayakan melalui upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Keberhasilan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dapat membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah akan terangkat secara ekonomi dan akan membuat masyarakat sejahtera.

Adapun untuk Koperasi, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dapat mengambil manfaat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Di dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah

dapat memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi dalam bentuk antara lain: memperkuat permodalan dan pembiayaan Koperasi, bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antara Koperasi dan badan usaha lain. Dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau diharapkan Koperasi dapat berkembang dan akan membuat para anggota



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN



RPJMD KABUPATEN
PULANG PISAU
TAHUN 2013-2018

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau periode 2013-2018 memiliki visi:

TERWUJUDNYA MASYARAKAT PULANG PISAU YANG DAMAI, MAJU, BERKEADILAN, DAN SEJAHTERA

Secara spesifik penjelasan rumusan visi tersebut yaitu:

1. Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau yang **Damai**, yang dimaksud adalah kondisi Kabupaten Pulang Pisau yang dapat menjamin rasa aman masyarakat dan dunia usaha yang ditandai dengan terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat didukung oleh peningkatan mutu pengelola pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai modal dasar untuk pembangunan berkelanjutan.
2. Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau yang **Maju**, yang dimaksud adalah kondisi Kabupaten Pulang Pisau yang masyarakatnya semakin meningkat kualitas sumber dayanya dan hasil-hasil pembangunan ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau yang **Berkeadilan**, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pulang Pisau tanpa memihak kepada perorangan, golongan atau wilayah tertentu dapat secara nyata menikmati pemerataan dari seluruh bidang pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Pulang Pisau dengan sumber pendanaannya baik melalui APBD maupun APBN.
4. Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau yang **Sejahtera**, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang mampu bekerja dan memperoleh pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan

dasar, meliputi sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan secara layak dan memadai.

5.2 Misi

Misi yang dinyatakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau periode 2013-2018 untuk mewujudkan visi yang akan dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Adapun rumusan misi untuk memberikan kerangka, sasaran, dan arah kebijakan yang akan dicapai serta strategi yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi:

1. Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan.
4. Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri.
5. Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (*Good and Clean Governance*).
7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka akan diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,

spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan yang ingin dicapai akan dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018, sebagai berikut:

Tujuan 1: Mewujudkan sarana dan prasana wilayah serta pemukiman yang mematuhi tataruang

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut adalah:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah
- b. Pembangunan wilayah pemukiman
- c. Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang

Tujuan 2: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing masyarakat

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- b. Meningkatnya melek huruf di masyarakat
- c. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan
- d. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- e. Meningkatnya Usia harapan Hidup
- f. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana
- g. Menigkatnya keterampilan kerja masyarakat

Tujuan 3: Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatnya pendapatan masyarakat
- b. Menigkatnya UMKM
- c. Meningkatnya koperasi aktif
- d. Menurunnya angka kemiskinan
- e. Menurunnya tingkat pengangguran
- f. Meningkatnya penanaman modal

Tujuan 4: Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustri

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut adalah:

- a. Berkembangnya agroindustri
- b. Meningkatnya produktifitas pertanian

Tujuan 5: Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
- b. Kualitas lingkungan hidup meningkat

Tujuan 6: Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara transparan, profesional, dan akuntabel

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
- b. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
- c. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah

Tujuan 7: Mendorong partisipasi organisasi keagamaan, sosial budaya, dan organisasi pemuda dalam membangun daerah

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
- b. Meningkatnya pemberdayaan di bidang agama
- c. Meningkatnya kesetaraan gender
- d. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran akan diperlihatkan pada tabel

5.1 seperti di bawah ini:

Tabel 5.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Adapun keterkaitan antara misi, tujuan, sasaran, dan indikator sasaran akan diperlihatkan pada tabel 5.1 seperti di bawah ini:

Visi: Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau yang Damai, Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera				
NO	MISI	TUJUAN	NO	SASARAN
1	Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman	Mewujudkan sarana dan prasana wilayah serta pemukiman yang mematuhi tata ruang	1	Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah
			2	Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
			3	Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang
2	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing masyarakat	4	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
			5	Meningkatnya melek huruf di masyarakat
			6	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan
			7	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
			8	Meningkatnya Usia harapan Hidup
			9	Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.
			10	Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat
3	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan	Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	11	Meningkatnya pendapatan masyarakat
			12	Meningkatnya UMKM
			13	Meningkatnya Koperasi Aktif
			14	Menurunnya angka kemiskinan
			15	Menurunnya tingkat pengangguran
			16	Meningkatnya penanaman modal
4	Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri	Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustri	17	Berkembangnya agroindustri
			18	Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)

Visi: Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau yang Damai, Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera

NO	MISI	TUJUAN	NO	SASARAN
5	Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan	19	Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
			20	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
6	Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (<i>Good and Clean Governance</i>)	Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara transparan, profesional, dan akuntabel	21	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
			22	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
			23	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah
7	Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan	Mendorong partisipasi organisasi keagamaan, sosial budaya, dan organisasi pemuda dalam membangun daerah	24	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
			25	Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan
			26	Meningkatnya kesetaraan gender
			27	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal

Berikutnya akan ditampilkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator. Pada tabel 5.2 akan ditampilkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator.

Setelah itu seluruh indikator tersebut akan dibuatkan target pencapaian mulai dari tahun 2013 (kondisi awal) sampai tahun 2018 (kondisi akhir). Target pencapaian terhadap indikator tersebut merupakan target yang harus dicapai oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi bidang tersebut. Pada tabel 5.3 akan menampilkan sasaran dan indikator beserta target pencapaian per tahun terhadap indikator tersebut.

Tabel 5.2

Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator

NO	MISI	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR
1	Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman	Mewujudkan sarana dan prasana wilayah serta pemukiman yang mematuhi tata ruang	1	Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah	Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%)
					Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi
					□ Sungai
					□ Laut
					KK pengguna air bersih
			2	Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Rumah tangga teraliri listrik
					Rasio Rumah Layak Huni (%)
					Rasio permukiman layak huni (%)
			3	Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW
2	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing masyarakat	4	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
			5	Meningkatnya melek huruf di masyarakat	Angka Melek Huruf
			6	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Angka partisipasi Sekolah
					□ Usia 7-12
					□ Usia 13-15

NO	MISI	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR
					□ Usia 16-18 Jumlah Perpustakaan
			7	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru yang bersertifikasi
			8	Meningkatnya Usia harapan Hidup	Usia Harapan Hidup
					Angka Kematian Bayi
					Angka Kematian ibu melahirkan
					Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
			9	Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
			10	Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat	Tingkat partisipasi angkatan kerja
			11	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB perkapita
					ADHK (Juta Rp)
					ADHB (Juta Rp)
3	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan	Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	12	Meningkatnya UMKM	Jumlah UMKM Aktif
					□ Usaha Mikro

NO	MISI	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR
					<input type="checkbox"/> Usaha kecil
					<input type="checkbox"/> Usaha Menengah
			13	Meningkatnya Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Aktif
			14	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan
			15	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka
			16	Meningkatnya penanaman modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
4	Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri	Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustri	17	Berkembangnya agroindustri	Jumlah usaha agroindustri
			18	Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)	Pertanian
					Padi (Kw/ha)
					Jagung (Kw/ha)
					Kedelai (Kw/ha)
					Ubi kayu (Kw/ha)
					Peternakan
					Sapi (ekor)
					Babi (ekor)
					Unggas (ekor)
					Perkebunan
					Karet (Ton/Ha)

NO	MISI	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR
					Kelapa Sawit (ton/ha)
					Perikanan
					Perikanan Tangkap (ton)
					Pengolahan hasil perikanan (ton)
					Perikanan Budidaya (ton)
5	Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan	19	Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.
			20	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Status pencemaran
					□ Udara
					□ air
					Hutan dan lahan yang terehabilitasi
					Kebakaran Kawasan Hutan yang tertangani
					Lahan kritis
					Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk
6	Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan	Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara transparan,	21	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penilaian LAKIP
			22	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK

NO	MISI	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR
	akuntabel (<i>Good and Clean Governance</i>)	profesional, dan akuntabel	23	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah	Aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kepemimpinan
					□ Esselon II
					□ Esselon III
					□ Esselon IV
7	Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan	Mendorong partisipasi organisasi keagamaan, sosial budaya, dan organisasi pemuda dalam membangun daerah	24	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Jumlah organisasi kepemudaan
			25	Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan	rumah ibadah yang mendapatkan bantuan
					lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan
			26	Meningkatnya kesetaraan gender	Persentase wanita di lembaga pemerintahan
					Partisipasi angkatan kerja perempuan
27	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal	Jumlah Organisasi Pelaku Budaya			

Tabel 5.3

Target Tahunan Indikator Sasaran

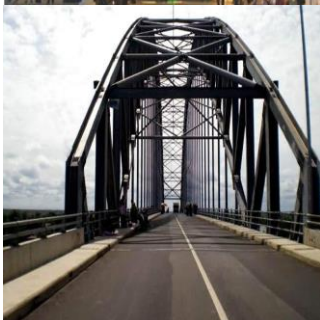
SASARAN	INDIKATOR	SKPD Penanggung jawab	KONDISI AWAL (2013*)	TARGET					KONDISI AKHIR (2018)
				TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah	Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	PU	65 %	68	72	75	78	75	75
	Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi	Dishub	23	23	25	27	28	30	30
	□ Sungai	Dishub	21	22	23	25	25	27	27
	□ Laut	Dishub	2	2	2	2	3	3	3
	KK pengguna air bersih	PU	2.243	5.000	7.500	10.000	12.500	15.000	15.500
Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Rumah tangga teraliri listrik	PU	21.640	23000	25000	27.000	29.000	30.500	30.500
	Rasio Rumah Layak Huni (%)	PU	83	84	85	86	88	90	90
	Rasio permukiman layak huni (%)	PU	30	35	40	45	50	50	50
Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	PU	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Bappeda	72,75	72,8	72,85	72,9	72,95	73	73
Meningkatnya melek huruf di masyarakat	Angka Melek Huruf	Disdik	96,23	97	97,5	98	98,5	99	99
Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Angka partisipasi Sekolah	Disdik							
	□ Usia 7-12	Disdik	95,15	95,5	96	97	98	99	99
	□ Usia 13-15	Disdik	84,83	85	86	87	88,5	90	90

SASARAN	INDIKATOR	SKPD Penanggung jawab	KONDISI AWAL (2013*)	TARGET					KONDISI AKHIR (2018)
				TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	
	□ Usia 16-18	Disdik	50,63	55	60	65	68	70	70
	Jumlah Perpustakaan	KPAD	40	43	46	49	52	55	55
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Disdik	1405	1800	2100	2500	2900	3400	3400
	Guru yang bersertifikasi	Disdik							
Meningkatnya Usia harapan Hidup	Usia Harapan Hidup	Dinkes	71	71,7	72	72,2	72,4	72,6	72,6
	Angka Kematian Bayi	Dinkes	4,72	4,6	4,5	4,4	4,2	4	4
	Angka Kematian ibu melahirkan	Dinkes	2	2	2	2	1	1	1
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Dinkes	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	KPPKB	30	28	26	25	23	20	20
Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Dinsosnaker trans	69,51%	70	70,5	71	72	73	73%
Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB perkapita	Bappeda							
	ADHK (juta)	Bappeda	6,85	6,90	7,00	7,20	7,30	7,50	7,50
	ADHB (juta)	Bappeda	13,60	13,75	13,80	13,85	13,90	14,00	14,00
Meningkatnya UMKM	Jumlah UMKM Aktif	Disperindag kopUKM	4.353	4.460	4.570	4.680	4.790	4.850	4.850
	□ Usaha Mikro	Disperindag kopUKM	1.730	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000	2.000

SASARAN	INDIKATOR	SKPD Penanggung jawab	KONDISI AWAL (2013*)	TARGET					KONDISI AKHIR (2018)
				TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	
	□ Usaha kecil	Disperindag kopUKM	2.316	2.350	2.400	2.450	2.500	2.500	2.500
	□ Usaha Menengah	Disperindag kopUKM	307	310	320	330	340	350	350
Meningkatnya Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Aktif	Disperindag kopUKM	106	120	130	140	160	275	275
Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	Bappeda	5,25	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3	4,3
Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	Dinsosnaker trans	2,59 %	2,50%	2,45%	2,30%	2,20%	2,20%	2,20%
Meningkatnya penanaman modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Bappeda	10	11	12	13	14	15	15
Berkembangnya agroindustri	Jumlah usaha agroindustri	Distanak	1						3
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)	Pertanian	Distanak							
	Padi sawah (Kw/ha)	Distanak	34,50	38,88	39,93	42,06	42,18	42,25	42,25
	Jagung (Kw/ha)	Distanak	30,15	31,17	31,43	31,62	31,68	31,70	31,70
	Kedelai (Kw/ha)	Distanak	12,10	12,67	12,67	12,70	12,71	12,72	12,72
	Ubi kayu (Kw/ha)	Distanak	118,30	118,38	118,38	118,39	118,39	118,39	118,39
	Peternakan	Distanak							
	Sapi (ekor)	Distanak	10.489	10.600	11.000	11.500	12.300	13.000	13.000
	Babi (ekor)	Distanak	7.815	7.950	8.200	9.000	9.500	10.000	10.000
	Unggas (ekor)	Distanak	1.083.521	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000

SASARAN	INDIKATOR	SKPD Penanggung jawab	KONDISI AWAL (2013*)	TARGET					KONDISI AKHIR (2018)
				TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	
	Perkebunan	Disbunhut							
	Karet (Ton/Ha)	Disbunhut	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1	1
	Kelapa Sawit (ton/ha)	Disbunhut	2,15	2,5	3	3,4	3,7	4	4
	Perikanan	DKP							
	Perikanan Tangkap (ton)	DKP	18.013,86	19.638	21.263	22.888	24.513	26.138	26.138,2 2
	Pengolahan hasil perikanan (ton)	DKP	831,96	1.072	1.313	1.554	1.795	2.036	2.036,21
	Perikanan Budidaya (ton)	DKP	2.587,00	3.376	3.787	4.387	4.987	5.587	5.587,11
Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.	BLH	50%	55%	60%	65%	70%	70%	70%
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup									
	Status pencemaran	BLH	100	100	100	100	100	100	100
	□ Udara	BLH	100	100	100	100	100	100	100
	□ air	BLH	100	100	100	100	100	100	100
	Hutan dan lahan yang terehabilitasi	Disbunhut	5300	6000	6000	6000	6000	6000	35.300
	Kebakaran Kawasan Hutan yang tertangani	Disbunhut	50 ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha
	Lahan kritis (ribu ha)	BLH	454	449	442	436	430	424	424
	Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk	BLH	60,56%	65%	70%	75%	80%	85%	85%

SASARAN	INDIKATOR	SKPD Penanggung jawab	KONDISI AWAL (2013*)	TARGET					KONDISI AKHIR (2018)
				TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penilaian LAKIP	Setda	D	C	C	C	C	CC	CC
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	DPPKAD	TW	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah	Aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kepemimpinan	BKPP	203	238	270	302	334	376	376
	□ Esselon II	BKPP	10	13	15	17	19	21	21
	□ Esselon III	BKPP	69	80	90	100	110	120	120
	□ Esselon IV	BKPP	124	145	165	185	205	235	235
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Jumlah organisasi kepemudaan	KESBANG	40	41	42	43	44	45	45
Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan	rumah ibadah yang mendapatkan bantuan	Setda	49	53	56	59	62	65	65
	Lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan	Setda	27	30	33	36	39	42	42
Meningkatnya kesetaraan gender	Persentase wanita di lembaga pemerintahan	KPPKB	5	5	5	6	6	7	7
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	KPPKB	58	59	62	63	64	65	65
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal	Jumlah Organisasi Pelaku Budaya	Setda	1	3	6	8	9	10	10



BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



RPJMD KABUPATEN
PULANG PISAU
TAHUN 2013-2018

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Rumusan strategi pembangunan akan menjelaskan bagaimana sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan akan dicapai.

Di dalam mencapai sasaran-sasaran strategi yang telah ditetapkan maka dibutuhkan strategi yang tepat. Pernyataan strategi ini memberikan pernyataan konkrit mengenai cara untuk mencapai visi dan misi. Dalam memilih strategi apa yang paling tepat untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Pulang Pisau untuk 5 (lima) tahun yang akan datang, maka digunakan pendekatan Analisis SWOT. Pendekatan analisis SWOT merupakan salah satu pendekatan yang paling umum digunakan untuk menentukan pilihan-pilihan strategi berdasarkan pertimbangan 4 (empat) hal, yaitu: kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threath*).

Di dalam analisis SWOT akan terbagi dalam faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal terdiri dari: *strength* dan *weakness*. Adapun faktor eksternal terdiri dari: *opportunity* dan *threat*.

Faktor Internal:

a. Kekuatan (*Strength*), terdiri dari:

- Jumlah penduduk besar
- Angkatan kerja besar
- Dukungan pemerintah terhadap UMKM dan Koperasi

- Banyaknya jenis tanaman yang dapat tumbuh
 - Banyaknya jenis ternak yang dapat berkembang biak
 - Angka kriminalitas rendah
- b. Kelemahan (*Weakness*), terdiri dari:
- Infrastruktur jalan belum optimal
 - Prasarana dasar belum optimal
 - Sumber daya manusia yang berkualitas terbatas

Faktor Eksternal:

- a. Peluang (*Opportunity*), terdiri dari:
- Kondisi geografis yang sangat berdekatan terhadap 2 ibukota provinsi (Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan)
 - Kebijakan pembangunan nasional, provinsi sejalan dengan kebijakan daerah
 - Kebijakan reformasi birokrasi dan pelayanan prima yang diterapkan secara nasional
- b. Ancaman (*Threat*), terdiri dari:
- Sektor perkebunan yang dikuasai para pemodal besar
 - Dampak perubahan iklim bagi kehidupan masyarakat.
 - Masuknya pengaruh budaya negatif yang dibawa oleh para pendatang

Tabel 6.1
Analisis SWOT

FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL	PELUANG (OPPORTUNITY)	ANCAMAN (THREAT)
	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi geografis yang sangat berdekatan terhadap 2 ibukota provinsi (Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan) - Kebijakan pembangunan nasional, provinsi sejalan dengan kebijakan daerah - Kebijakan reformasi birokrasi dan pelayanan prima yang diterapkan secara nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor perkebunan yang dikuasai para pemodal besar - Dampak perubahan iklim bagi kehidupan masyarakat. - Masuknya pengaruh budaya negatif yang dibawa oleh para pendatang
KEKUATAN (STRENGTH)	Alternatif Strategi (S-O):	Alternatif Strategi (S-T):
<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penduduk besar - Angkatan kerja besar - Dukungan pemerintah terhadap UMKM dan Koperasi - Banyaknya jenis tanaman yang dapat tumbuh - Banyaknya jenis ternak yang dapat berkembang biak - Angka kriminalitas rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Intensifikasi Komoditi - Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik - Pengembangan sektor ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat
KELEMAHAN (WEAKNESS)	Alternatif Strategi (W-O):	Alternatif Strategi (W-T):

<ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur jalan belum optimal - Prasarana dasar belum optimal - Sumber daya manusia yang berkualitas terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan serta serta kebudayaan dan olah raga 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
---	--	---

Dari analisis SWOT akan diperoleh alternatif strategi yang memberikan arah yang jelas bagi pencapaian sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pulang Pisau 2013-2018. Pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pada Bab V akan disesuaikan dengan alternatif strategi di atas. Selanjutnya, alternatif strategi yang telah dibuat, sasaran, dan indikator akan ditampilkan pada tabel 6.2 di bawah ini.

Tabel 6.2

Sasaran, Indikator, Strategi

NO	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI
1	Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah	Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	Strategi 1: Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
		Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi	
		□ Sungai	
		□ Laut	
		KK pengguna air bersih	
2	Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Rumah tangga teraliri listrik	
		Rasio Rumah Layak Huni (%)	
		Rasio permukiman layak huni (%)	
3	Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	
4	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Strategi 2: Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
5	Meningkatnya melek huruf di masyarakat	Angka Melek Huruf	
6	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Angka partisipasi Sekolah	
		□ Usia 7-12	

NO	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	
		□ Usia 13-15		
		□ Usia 16-18		
		Jumlah Perpustakaan		
7	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		
		Guru yang bersertifikasi		
8	Meningkatnya Usia harapan Hidup	Usia Harapan Hidup		
		Angka Kematian Bayi		
		Angka Kematian ibu melahirkan		
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		
9	Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I		
10	Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat	Tingkat partisipasi angkatan kerja		
11	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB perkapita		Strategi 3: Pengembangan Sektor Ekonomi
		ADHK (Juta Rp)		
		ADHB (Juta Rp)		
12	Meningkatnya UMKM	Jumlah UMKM Aktif		
		□ Usaha Mikro		
		□ Usaha kecil		
		□ Usaha Menengah		
13	Meningkatnya Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Aktif		
14	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan		
15	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka		
16	Meningkatnya penanaman modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		
17	Berkembangnya agroindustri	Jumlah usaha agroindustri	Strategi 4: Intensifikasi Komoditi	
18	Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)	Pertanian		
		Padi (Kw/ha)		
		Jagung (Kw/ha)		
		Kedelai (Kw/ha)		
		Ubi kayu (Kw/ha)		
		Peternakan		

NO	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI
		Sapi (ekor)	
		Babi (ekor)	
		Unggas (ekor)	
		Perkebunan	
		Karet (Ton/Ha)	
		Kelapa Sawit (ton/ha)	
		Perikanan	
		Perikanan Tangkap (ton)	
		Pengolahan hasil perikanan (ton)	
		Perikanan Budidaya (ton)	
19	Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.	Strategi 5: Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Hidup
20	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Status pencemaran	
		□ Udara	
		□ air	
		Hutan dan lahan yang terehabilitasi	
		Kebakaran Kawasan Hutan yang tertangani	
		Lahan Kritis	
		Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk	
21	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penilaian LAKIP	Strategi 5: Penerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
22	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	
23	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah	Aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kepemimpinan	
		□ Esselon II	
		□ Esselon III	
		□ Esselon IV	
24	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Jumlah organisasi kepemudaan	Strategi 6: Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

NO	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI
25	Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan	Rumah ibadah yang mendapatkan bantuan	
		Lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan	
26	Meningkatnya kesetaraan gender	Persentase wanita di lembaga pemerintahan	
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	
27	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal	Jumlah Organisasi Pelaku Budaya	

Dari tabel 6.2 di atas terdapat 6 strategi untuk mencapai 27 sasaran. Dari 6 strategi tersebut yang merupakan strategi untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

6.2 Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Pulang Pisau akan ditampilkan pada Tabel 6.3 di bawah ini:

Tabel 6.3

Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Pulang Pisau

Visi : Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau yang Damai, Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera			
Misi 1: Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan sarana dan prasana wilayah serta pemukiman yang mematuhi tata ruang	Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah	Strategi 1: Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana	Pengembangan sarana dan prasana wilayah
	Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan		Pengembangan sarana dan prasarana permukiman
	Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang		Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW
Misi 2: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia			
Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing masyarakat	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Strategi 2: Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga	Peningkatan Wajib Belajar
	Meningkatnya melek huruf di masyarakat		Peningkatan Angka Melek Huruf
	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan		Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah
	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan		Peningkatan kualitas pendidikan
	Meningkatnya Usia harapan Hidup		Peningkatan kualitas kesehatan
	Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.		Peningkatan kualitas kesehatan
	Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat		Pengembangan Keterampilan Masyarakat

Misi 3:Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan			
Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Strategi 3: Pengembangan Sektor Ekonomi	Peningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat
	Meningkatnya UMKM		Pengembangan UMKM
	Meningkatnya Koperasi Aktif		Pengembangan Koperasi
	Menurunnya angka kemiskinan		Peningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat
	Menurunnya tingkat pengangguran		Peningkatan pemerataan pembangunan
	Meningkatnya penanaman modal		Peningkatan penanaman modal
Misi 4: Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri			
Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustri	Berkembangnya agroindustri	Strategi 4: Intensifikasi Komoditi	Pengembangan usaha agrobisnis
	Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)		Pengembangan produktifitas pertanian
Misi 5: Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan			
Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan	Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Strategi 3: Pengembangan Sektor Ekonomi	Pengembangan pengelolaan sumber daya alam
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Peningkatkan persentase kualitas lingkungan
Misi 6: Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (Good and Clean Governance)			
Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara transparan, profesional, dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Strategi 5: Penerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai LAKIP
	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah		Peningkatan Opini BPK
	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah		Pengembangan sumber daya aparatur pemerintah
Misi 7: Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan			

Mendorong partisipasi organisasi keagamaan, sosial budaya, dan organisasi pemuda dalam membangun daerah	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Strategi 6: Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Mewujudkan kondisi yang kondusif di masyarakat antar agama, sosial budaya, dan organisasi kepemudaan
	Meningkatnya pemberdayaan di bidang keagamaan		
	Meningkatnya kesetaraan gender		
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal		Pengembangan pelestarian adat dan budaya lokal



BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



RPJMD KABUPATEN
PULANG PISAU
TAHUN 2013-2018

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh di dalam menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan. Program-program pembangunan tersebut menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Program pembangunan merupakan penterjemahan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Pulang Pisau. Program pembangunan memiliki tujuan, sasaran, dan indikator sehingga keberhasilan suatu program pembangunan akan dapat dihitung dengan pasti. Program-program pembangunan tersebut akan dijalankan oleh para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Program-program pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau untuk periode 2014 -2018 di dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan ditampilkan di tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah	Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana	Pengembangan sarana dan prasana wilayah	1	03	1.03.01	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	65,00	75,00	Dinas Pekerjaan Umum
			1	03	1.03.01	16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	8,00	13,00	Dinas Pekerjaan Umum
			1	03	1.03.01	17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	80,00	80,00	Dinas Pekerjaan Umum
			1	03	1.03.01	18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	65,00	79,00	Dinas Pekerjaan Umum
			1	03	1.03.01	23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan	80,00	80,00	Dinas Pekerjaan Umum
			1	03	1.03.01	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	60,00	83,00	Dinas Pekerjaan Umum

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	03	1.03.01	31	Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik Daerah	Prasarana Umum dalam kondisi baik	80,00	90,00	Dinas Pekerjaan Umum
			1	07	1.07.01	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1.400,00	6.201,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	07	1.07.01	17	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah uji kir angkutan umum	489,00	542,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	07	1.07.01	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah terminal angkutan umum	4,00	4,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	07	1.07.01	19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pemasangan rambu-rambu	0,00	205,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	25	1.07.01	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	80,00	99,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	25	1.07.01	16	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: a. media massa seperti majalah, radio, dan televisi; b. media baru seperti website (media online); c. media tradisional	80,00	99,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
								seperti pertunjukan rakyat; d. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau e. media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho			
			1	25	1.07.01	17	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase sumber daya komunikasi dan informasi yang memenuhi standar	80,00	99,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	25	1.07.01	18	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media massa, media baru, media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang	80,00	99,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	25	1.07.01	19	Program Peningkatan Pelayanan Publik	#N/A	80,00	99,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			2	03	1.20.03	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	rasio elektrifikasi	70,00	70,00	Sekretariat Daerah
Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana permukiman	Pengembangan sarana dan prasarana permukiman	1	03	1.03.01	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Rumah Tangga (RT) berakses air minum Cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota 	13,00	18,00	Dinas Pekerjaan Umum

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
		Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	1	03	1.03.01	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan infrastruktur memadai	70,00	82,00	Dinas Pekerjaan Umum
			1	03	1.03.01	30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	jalan lingkungan dibangun dalam kondisi baik	70,00	85,00	Dinas Pekerjaan Umum
			1	08	1.03.01	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	16,40	70,00	Dinas Pekerjaan Umum
			1	06	1.06.01	18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase wilayah strategis dan cepat tumbuh yang direncanakan			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	06	1.06.01	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Menjaga kesesuaian pembangunan dengan tata ruang	Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	1	05	1.03.01	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	ada	ada	Dinas Pekerjaan Umum
			1	05	1.03.01	16	Program Pemanfaatan Ruang	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah	terlayani	terlayani	Dinas Pekerjaan Umum

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
								tentang RTR wilayah kota beserta rencana rincinya			
			1	06	1.03.01	16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama pembangunan yang mencapai sasaran	80,00	80,00	Dinas Pekerjaan Umum
			1	05	1.06.01	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	ada	ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	13	1.13.02	23	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (wmk)	2 Jam	2 Jam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	13	1.13.02	24	Program Kedaruratan dan Logistik	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	3 Kecamatan	8 Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	13	1.13.02	25	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	cakupan rehabilitasi lingkungan	80,00	80,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga	Peningkatan Wajib Belajar	1	20	1.20.03	44	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	cakupan pengembangan IPTEK	75,00	98,00	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	45	Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK	cakupan pemanfaatan IPTEK	75,00	98,00	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	46	Program Penguatan Kelembagaan IPTEK	cakupan kelembagaan IPTEK	75,00	98,00	Sekretariat Daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
Meningkatnya melek huruf di masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga	Peningkatan Angka Melek Huruf	1	01	1.01.01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	43,43	71,65	Dinas Pendidikan
			1	01	1.01.01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/SDLB/MI	88,02	95,30	Dinas Pendidikan
			1	01	1.01.01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SMP/MTs	65,47		Dinas Pendidikan
			1	01	1.01.01	17	Program Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/MA	40,86	76,94	Dinas Pendidikan
			1	01	1.01.01	18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf			Dinas Pendidikan
			1	01	1.01.01	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan	40,00	55,00	Dinas Pendidikan
			1	26	1.26.01	15	Program Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	2.617,00	12.117,00	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga	Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah	1	01	1.01.01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dasar	128,58	129,18	Dinas Pendidikan
			1	01	1.26.01	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	2.815,00	13.200,00	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
			1	24	1.26.01	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku	13,88	94,44	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga	Peningkatan kualitas pendidikan	1	01	1.01.01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	77,72	99,85	Dinas Pendidikan
Meningkatnya Usia harapan Hidup	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga	Peningkatan kualitas kesehatan	1	02	1.02.01	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	125,00	155,00	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.01	16	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Rasio dokter persatuan penduduk	17,00	24,00	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.01	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,00	72,6	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.01	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita gizi kurang	5,00	22,00	Dinas Kesehatan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	02	1.02.01	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.01	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.01	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	71,00	72,6	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.01	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.01	25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,8	1,08	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.01	28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	2,00	2,00	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.01	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan kunjungan bayi	70,00	95,00	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.02	16	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,00	72,6	Rumah Sakit Umum Daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	02	1.02.02	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization	100,00	100,00	Rumah Sakit Umum Daerah
			1	02	1.02.02	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita gizi kurang	5,00		Rumah Sakit Umum Daerah
			1	02	1.02.02	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100,00	100,00	Rumah Sakit Umum Daerah
			1	02	1.02.02	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,7	1,5	Rumah Sakit Umum Daerah
			1	02	1.02.02	27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Angka Harapan Hidup	71,00	72,6	Rumah Sakit Umum Daerah
Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga	Peningkatan kualitas kesehatan	1	12	1.11.01	15	Program Keluarga Berencana	Persentase Akseptor KB	82,49	82,60	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	12	1.11.01	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	12,00	11,00	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			1	12	1.11.01	17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,00	2,00	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			1	12	1.11.01	23	Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan bina keluarga balita (BKB) ber KB)	98,94	78,10	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga	Pengembangan Keterampilan Masyarakat	1	14	1.13.01	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Angka Partisipasi angkatan kerja	71,00	76,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	14	1.13.01	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	0,00		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	14	1.13.01	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100,00	100,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pengembangan Sektor Ekonomi	Peningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat	1	06	1.06.01	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	90,00	90,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	20	1.20.03	49	Program Peningkatan Kemampuan Pemanfaatan Terhadap Potensi Ekonomi Daerah	cakupan pemanfaatan terhadap potensi daerah	75,00	98,00	Sekretariat Daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	20	1.20.03	50	Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Promosi Potensi Daerah	cakupan sarana ekonomi dan promosi potensi daerah	75,00	98,00	Sekretariat Daerah
			2	06	2.07.01	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase komoditas perdagangan diawasi peredarannya di pasar	100,00	100,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			2	06	2.07.01	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			2	07	2.07.01	15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Persentase industri berbasis teknologi	30,00	80,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			2	07	2.07.01	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Produktifitas industri kecil dan menengah	80,00	80,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Meningkatnya UMKM	Pengembangan Sektor Ekonomi	Pengembangan UMKM	1	15	2.07.01	15	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	UMKM aktif	4.353,00	4.850,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			1	15	2.07.01	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan bina UMKM	80,00	80,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	15	2.07.01	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	UMKM yang dibina	80,00	80,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Meningkatnya Koperasi Aktif	Pengembangan Sektor Ekonomi	Pengembangan Koperasi	1	15	2.07.01	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi Aktif	106,00	175,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Menurunnya angka kemiskinan	Pengembangan Sektor Ekonomi	Peningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat	1	06	1.06.01	23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Tingkat koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya	90,00	90,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	13	1.13.01	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS skala kab./kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	1.048,00	1.048,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	13	1.13.01	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS skala kab./kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	1.048,00		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	13	1.13.01	18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang telah menerima jaminan sosial	80,00	80,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	13	1.13.01	21	Program Pemberdayaan	Persentase lembaga kesejahteraan sosial	80,00	80,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
							Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	yang memperoleh pembinaan			
			1	20	1.20.03	47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesra dan Kemasyarakatan	cakupan sarana dan prasarana kesra	75,00	98,00	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	48	Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Produksi Daerah	cakupan pembinaan sarana ekonomi dan produksi daerah	75,00	98,00	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	51	Program Peningkatan Sosial Kesejahteraan Rakyat	cakupan peningkatan sosial kesra	75,00	98,00	Sekretariat Daerah
Menurunnya tingkat pengangguran	Pengembangan Sektor Ekonomi	Peningkatan pemerataan pembangunan	1	14	1.13.01	18	Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Norma Kerja dan K3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	8,30	7,14	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			2	08	1.13.01	15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase transmigran swakarsa	20,00	20,00	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			2	03	1.20.03	15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase pertambangan tanpa izin	12,50	45,00	Sekretariat Daerah
Meningkatnya penanaman modal	Pengembangan Sektor Ekonomi	Peningkatan penanaman modal	1	16	1.06.01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	10,00	15,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	20	1.20.19	41	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	rata-rata lama perizinan	1-4 hari	1-4 hari	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Berkembangnya agroindustri	Intensifikasi Komoditi	Pengembangan usaha agrobisnis	2	01	2.01.01	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	cakupan teknologi tepat guna bagi petani	80,00		Dinas Pertanian dan Peternakan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			2	07	2.07.01	18	Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan industri	7,00	8,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			2	07	2.07.01	19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sentra industri	80,00	80,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)	Intensifikasi Komoditi	Pengembangan produktifitas pertanian	1	21	1.21.01	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan utama	121,70	118,67	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
			1	21	1.21.01	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Beras	121,70	118,67	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
			1	21	1.21.01	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Daging	2,57	2,57	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
			1	21	1.21.01	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Telur	9,32	9,32	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	21	1.21.01	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ikan	33,90	33,90	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
			2	01	1.21.01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	60,03	70,10	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
			2	01	1.21.01	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	36,05	42,25	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
			2	01	1.21.01	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	cakupan teknologi tepat guna bagi petani	100,00	100,00	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
			2	01	1.21.01	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Cakupan bina kelompok tani	200,00	200,00	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
			2	01	2.01.01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	60,03	70,10	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				Dinas Pertanian dan Peternakan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
							(Pertanian/Perkebunan)				
			2	01	2.01.01	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	60,03	70,10	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas :			Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	- Padi (Ku/Ha)	34,50	42,25	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	- Jagung (Ku/Ha)	30,15	31,70	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	- Kedelai (Ku/Ha)	12,10	12,72	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	- Kacang Tanah (Ku/Ha)	11,70	11,77	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	- Kacang Hijau (Ku/Ha)	0,00	0,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	- Ubi Kayu (Ku/Ha)	11,83	118,39	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	- Ubi Jalar (Ku/Ha)	71,07	71,10	Dinas Pertanian dan Peternakan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			2	01	2.01.01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	- Buah-buahan (Ku/Ha)	1,00	11,95	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	- Sayur-sayuran (Ku/Ha)	50,50	55,25	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase ternak sakit yang ditangani	70,00	95,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Populasi :			Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	- Sapi (ekor)	7.104,00	14.484,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	- Itik (ekor)		7.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	- Kambing (ekor)	8.883,00	14.281,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	- Ayam Ras (ekor)	#####	1.265.205,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	- Ayam Petelur (ekor)		16.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	- Ayam Buras (ekor)	#####	464.378,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	- Babi (ekor)	7.815,00	13.442,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	- Kerbau (ekor)	45,00	49,00	Dinas Pertanian dan Peternakan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			2	01	2.01.01	24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase lahan termekanisasi (%)	22,10	31,52	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	05	2.05.01	15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Produksi Perikanan	20.600,86	31.725,33	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2	05	2.05.01	16	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Cakupan bina kelompok nelayan	27,16	50,19	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2	05	2.05.01	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan kelompok budidaya	12,58	17,61	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2	05	2.05.01	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan kelompok nelayan	87,44	82,32	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2	05	2.05.01	24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Cakupan kawasan budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	80,00	80,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Intensifikasi Komoditi	Pengembangan pengelolaan sumber daya alam	1	08	1.08.01	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dan jenis data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan	2,00	2,00	Badan Lingkungan Hidup
			1	08	1.08.01	22	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase kerusakan kawasan hutan	0,01	0,01	Badan Lingkungan Hidup
			2	03	1.20.03	18	Program Pembinaan Teknis dan Evaluasi Pertambangan	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	0,01	18,00	Sekretariat Daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			2	03	1.20.03	20	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	cakupan pengembangan dan pemanfaatan energi	80,00	80,00	Sekretariat Daerah
			1	08	1.21.01	22	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	1,04	3,10	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Intensifikasi Komoditi	Peningkatkan persentase kualitas lingkungan	1	08	1.08.01	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	16,40	70,00	Badan Lingkungan Hidup
			1	08	1.08.01	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	status pencemaran udara air	100,00	100,00	Badan Lingkungan Hidup
			1	08	1.08.01	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan konservasi sumber daya alam	65,00	85,00	Badan Lingkungan Hidup
			1	08	1.08.01	23	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Cakupan areal ekosistem pesisir yang dikelola dan direhabilitasi	80,00	80,00	Badan Lingkungan Hidup
			1	08	1.08.01	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	80,00	80,00	Badan Lingkungan Hidup
			1	08	1.08.01	25	Program Penataan Hukum/ Peraturan Perundang-undangan	cakupan perundangan yang disusun	3,00	3,00	Badan Lingkungan Hidup
			1	08	1.08.01	26	Program Mitigasi dan Adaptasi Bencana Serta Perubahan Iklim	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal	65,00	85,00	Badan Lingkungan Hidup

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	08	1.08.01	27	Program Penataan Lingkungan dan Komunitas Lingkungan	Penegakan hukum lingkungan	ada	ada	Badan Lingkungan Hidup
			1	08	1.08.01	28	Program Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup	cakupan pendidikan lingkungan hidup	semua kecamatan	semua kecamatan	Badan Lingkungan Hidup
			1	08	1.08.01	29	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	50,00	70,00	Badan Lingkungan Hidup
			1	19	1.19.01	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	90,00	90,00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			1	19	1.19.01	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP	2 kegiatan	2 kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			1	19	1.19.01	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			2	02	2.02.01	16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	1,04	3,10	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
			2	02	2.02.01	20	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Persentase kerusakan kawasan hutan	0,01	0,01	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
			2	02	2.02.01	21	Program Peningkatan Produksi	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	3,48	5,10	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai LAKIP	1	01	1.01.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Dinas Pendidikan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	02	1.02.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Rumah Sakit Umum Daerah
			1	03	1.03.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Dinas Pekerjaan Umum
			1	06	1.06.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	07	1.07.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	08	1.08.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Badan Lingkungan Hidup
			1	10	1.10.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	74,00	99,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase bayi berakte kelahiran	53,00	99,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	pasangan berakte nikah	83,00	99,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan KTP	55,00	99,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	25,00	90,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Ketersediaan database kependudukan skala propinsi	tidak ada	tidak ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	10	1.10.01	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan	cakupan aparatur yang dilatih	50,00	50,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	11	1.11.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			1	13	1.13.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	13	1.13.02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	19	1.19.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	19	1.19.02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			1	06	1.20.03	15	Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan data dan informasi pembangunan daerah	ada	ada	Sekretariat Daerah
			1	06	1.20.03	16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama pembangunan yang mencapai sasaran	80,00	80,00	Sekretariat Daerah
			1	06	1.20.03	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	Sekretariat Daerah
			1	09	1.20.03	17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	kasus tanah Negara yang ditindak lanjuti	90,00	90,00	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase kinerja kepala daerah/wakil kepala daerah	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	31	Program Kerjasama Pengembangan Informasi dan Komunikasi Daerah dengan Mass Media	cakupan kerjasama dengan mass media	ada	ada	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	32	Program Pembentukan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Cakupan HAM	90,00	90,00	Sekretariat Daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	20	1.20.03	42	Program Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	sistem informasi bidang hukum	ada	ada	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	43	Program Bantuan Hukum	cakupan bantuan masyarakat	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.04	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			1	20	1.20.04	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase anggota DPRD yang mematuhi tata tertib DPRD	90,00	90,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			1	20	1.20.04	26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peraturan perundang-undangan harmonis dan sinkron	100,00	100,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			1	20	1.20.04	37	Program Sains Driver Reference (SDR) Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	cakupan program SDR	100,00	100,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			1	20	1.20.04	38	Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80,00	80,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			1	20	1.20.05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1	20	1.20.06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
			1	20	1.20.06	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan	persentase temuan yang ditindaklanjuti	90,00	90,00	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
							Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				
			1	20	1.20.06	21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional	100,00	100,00	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
			1	20	1.20.06	22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase penerapan sistem prosedur	100,00	100,00	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
			1	20	1.20.07	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			1	20	1.20.08	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kecamatan Kahayan Hilir
			1	20	1.20.09	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kecamatan Kahayan Kuala
			1	20	1.20.10	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kecamatan Kahayan Tengah
			1	20	1.20.11	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kecamatan Maliku
			1	20	1.20.12	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kecamatan Banama Tingang
			1	20	1.20.13	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kecamatan Pandih Batu

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	20	1.20.14	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kecamatan Jabiren Raya
			1	20	1.20.15	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kecamatan Sebangau Kuala
			1	20	1.20.16	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kelurahan Pulang Pisau
			1	20	1.20.17	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kelurahan Kalawa
			1	20	1.20.18	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kelurahan Bereng
			1	20	1.20.19	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
			1	20	1.20.20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kelurahan Bahaur Basantan
			1	21	1.21.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
			1	22	1.22.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	26	1.26.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
			2	01	2.01.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	02	2.02.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
			2	05	2.05.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2	07	2.07.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Penerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Opini BPK	1	01	1.01.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Dinas Pendidikan
			1	02	1.02.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.02	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Rumah Sakit Umum Daerah
			1	03	1.03.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Dinas Pekerjaan Umum

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
							Capaian Kinerja dan Keuangan				
			1	06	1.06.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	07	1.07.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	08	1.08.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Badan Lingkungan Hidup
			1	10	1.10.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	11	1.11.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			1	13	1.13.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	13	1.13.02	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	19	1.19.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			1	19	1.19.02	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			1	20	1.20.03	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.04	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			1	20	1.20.05	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1	20	1.20.05	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah	cakupan penatausahaan keuangan daerah	100,00	100,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1	20	1.20.05	18	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	peningkatan penerimaan pendapatan	13,00	13,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1	20	1.20.05	19	Program Peningkatan dan Pengembangan Aset serta Barang Milik Daerah	cakupan aset yang dikelola	80,00	80,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	20	1.20.06	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
			1	20	1.20.07	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			1	20	1.20.08	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Kecamatan Kahayan Hilir
			1	20	1.20.09	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Kecamatan Kahayan Kuala
			1	20	1.20.10	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Kecamatan Kahayan Tengah
			1	20	1.20.11	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Kecamatan Maliku
			1	20	1.20.12	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Kecamatan Banama Tingang
			1	20	1.20.13	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Kecamatan Pandih Batu

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	20	1.20.16	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Kelurahan Pulang Pisau
			1	20	1.20.17	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Kelurahan Kalawa
			1	20	1.20.19	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
			1	21	1.21.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
			1	22	1.22.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	26	1.26.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
			2	01	2.01.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	02	2.02.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Dinas Perkebunan dan Kehutanan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
							Capaian Kinerja dan Keuangan				
			2	05	2.05.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2	07	2.07.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah	Penerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pengembangan sumber daya aparatur pemerintah	1	01	1.01.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Dinas Pendidikan
			1	01	1.01.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Dinas Pendidikan
			1	01	1.01.01	04	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	Dinas Pendidikan
			1	01	1.01.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Dinas Pendidikan
			1	02	1.02.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.01	04	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	Dinas Kesehatan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	02	1.02.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Dinas Kesehatan
			1	02	1.02.02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Rumah Sakit Umum Daerah
			1	02	1.02.02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Rumah Sakit Umum Daerah
			1	03	1.03.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Dinas Pekerjaan Umum
			1	03	1.03.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Dinas Pekerjaan Umum
			1	03	1.03.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Dinas Pekerjaan Umum
			1	06	1.06.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	06	1.06.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	06	1.06.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	07	1.07.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	07	1.07.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	07	1.07.01	04	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	07	1.07.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	08	1.08.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Badan Lingkungan Hidup
			1	08	1.08.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Badan Lingkungan Hidup
			1	08	1.08.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Badan Lingkungan Hidup
			1	10	1.10.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	10	1.10.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	11	1.11.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	11	1.11.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			1	13	1.13.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	13	1.13.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	13	1.13.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	13	1.13.02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	13	1.13.02	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	13	1.13.02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	19	1.19.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			1	19	1.19.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			1	19	1.19.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	19	1.19.02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			1	19	1.19.02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			1	20	1.20.03	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	33	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur	persentase pengembangan pendayagunaan aparatur	90,00	90,00	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	34	Program Peningkatan Pembinaan/ Pengawasan Tata Pemerintahan Daerah Bawahan	cakupan pembinaan/pengawasan tata pemerintahan	90,00	90,00	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	35	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan	cakupan pelayanan kesra	1 kabupaten	1 kabupaten	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.04	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			1	20	1.20.04	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Sekretariat Dewan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
											Perwakilan Rakyat Daerah
			1	20	1.20.04	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			1	20	1.20.05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1	20	1.20.05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1	20	1.20.06	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
			1	20	1.20.06	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
			1	20	1.20.06	04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
			1	20	1.20.06	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
			1	20	1.20.07	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			1	20	1.20.07	28	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal	70,00	85,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
								dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya			
			1	20	1.20.07	29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Otonomi Daerah	Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya	70,00	85,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			1	20	1.20.07	30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir	80,00	80,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			1	20	1.20.08	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kecamatan Kahayan Hilir
			1	20	1.20.08	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Kecamatan Kahayan Hilir
			1	20	1.20.09	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kecamatan Kahayan Kuala
			1	20	1.20.09	04	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	Kecamatan Kahayan Kuala
			1	20	1.20.09	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Kecamatan Kahayan Kuala
			1	20	1.20.10	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kecamatan Kahayan Tengah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	20	1.20.10	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Kecamatan Kahayan Tengah
			1	20	1.20.11	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kecamatan Maluku
			1	20	1.20.11	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Kecamatan Maluku
			1	20	1.20.12	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kecamatan Banama Tingang
			1	20	1.20.12	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Kecamatan Banama Tingang
			1	20	1.20.13	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kecamatan Pandih Batu
			1	20	1.20.13	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Kecamatan Pandih Batu
			1	20	1.20.14	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kecamatan Jabiren Raya
			1	20	1.20.14	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Kecamatan Jabiren Raya
			1	20	1.20.15	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kecamatan Sebangau Kuala

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	20	1.20.15	04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	Kecamatan Sebangau Kuala
			1	20	1.20.15	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Kecamatan Sebangau Kuala
			1	20	1.20.16	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kelurahan Pulang Pisau
			1	20	1.20.17	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kelurahan Kalawa
			1	20	1.20.18	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kelurahan Bereng
			1	20	1.20.19	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
			1	20	1.20.19	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
			1	20	1.20.19	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
			1	20	1.20.20	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kelurahan Bahaur Basantan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	21	1.21.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
			1	22	1.22.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	22	1.22.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	22	1.22.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	26	1.26.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
			1	26	1.26.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
			1	26	1.26.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
			2	01	2.01.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Dinas Pertanian dan Peternakan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			2	01	2.01.01	04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	01	2.01.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Dinas Pertanian dan Peternakan
			2	02	2.02.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
			2	02	2.02.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
			2	02	2.02.01	04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
			2	02	2.02.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
			2	05	2.05.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2	05	2.05.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2	05	2.05.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Dinas Kelautan dan Perikanan
			2	07	2.07.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha

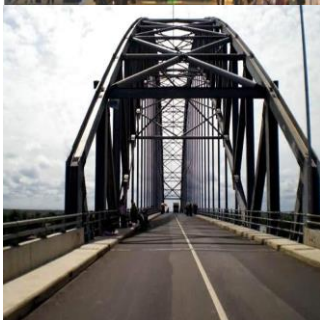
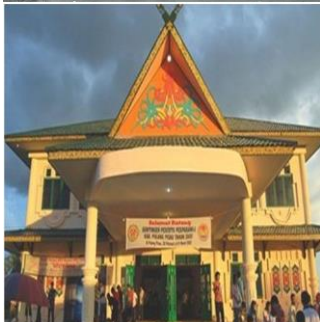
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
											Mikro, Kecil dan Menengah
			2	07	2.07.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			2	07	2.07.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama	Mewujudkan kondisi yang kondusif di masyarakat antar agama, sosial budaya, dan organisasi kepemudaan	1	19	1.19.02	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	2,29	2,40	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			1	18	1.20.03	16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	40,00	45,00	Sekretariat Daerah
			1	18	1.20.03	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah Orgasnisasi olahraga	15,00	20,00	Sekretariat Daerah
			1	18	1.20.03	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah Gedung Olahraga	1,00	2,00	Sekretariat Daerah
			1	22	1.22.01	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga	80,00	80,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
								Pemberdayaan Masyarakat (LPM)			
			1	22	1.22.01	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang aktif	60,00	90,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	22	1.22.01	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase LPM yang berprestasi	100,00	100,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	22	1.22.01	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparaturnya pemerintah desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	80,00	80,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	22	1.22.01	19	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	PKK aktif	0,00	8,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	22	1.22.01	20	Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L)	cakupan PM2L	80,00	80,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1	22	1.22.01	21	Program Fasilitas Pembangunan Desa Terpadu	cakupan pembangunan desa terpadu	semua kecamatan	semua kecamatan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan	Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama	Mewujudkan kondisi yang kondusif di masyarakat antar agama, sosial budaya, dan organisasi kepemudaan	1	11	1.11.01	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	5,00	6,50	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	11	1.11.01	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	95,00	93,50	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			1	11	1.11.01	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	0,05	0,05	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			1	11	1.11.01	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	5,00	6,50	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			1	11	1.11.01	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	95,00		Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Meningkatnya kesetaraan gender	Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama	Mewujudkan kondisi yang kondusif di masyarakat antar agama, sosial budaya, dan organisasi kepemudaan	1	01	1.01.01	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	Dinas Pendidikan
			1	08	1.08.01	07	Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	Badan Lingkungan Hidup
			1	20	1.20.09	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	Kecamatan Kahayan Kuala
			1	20	1.20.10	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	Kecamatan Kahayan Tengah
			1	20	1.20.11	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	Kecamatan Maliku

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Kode				SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Urs	Bid Urs	SKPD	Prg			AWAL	AKHIR	
			1	20	1.20.12	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	Kecamatan Banama Tingang
			1	20	1.20.13	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	Kecamatan Pandih Batu
			1	20	1.20.14	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	Kecamatan Jabiren Raya
			1	20	1.20.15	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	Kecamatan Sebangau Kuala
			1	20	1.20.19	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
			1	26	1.26.01	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
			2	07	2.07.01	07	Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal	Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama	Pengembangan pelestarian adat dan budaya lokal	1	19	1.19.02	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase penegakan PERDA	65,00	95,00	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			1	17	1.20.03	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	4,00	4,00	Sekretariat Daerah
			2	04	1.20.03	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kunjungan wisata	0,00	1,37	Sekretariat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan pedoman di dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Setiap program pemerintahan daerah tidak dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika tidak disusun dan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Oleh karena itu, program pemerintahan daerah yang disusun dalam RKPD harus konsisten dengan program, indikator kinerja outcome dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penanggung jawab yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang RPJMD.



BAB VIII

INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA KERANGKA PENDANAAN



RPJMD KABUPATEN
PULANG PISAU
TAHUN 2013-2018

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas di Kabupaten Pulang Pisau merupakan program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan seluruh bidang urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Pisau.

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Pagu indikatif adalah jumlah kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD.

Pagu indikatif akan dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Pengelompokan pagu pada program di tiap-tiap SKPD dapat dilakukan untuk kurun waktu lima tahun masa pembangunan jangka menengah. Adapaun pagu maksimal bagi SKPD adalah total dari pagu program yang menjadi urusannya.. Di tabel 8.1 di bawah ini akan ditampilkan Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan di Kabupaten Pulang Pisau untuk tahun 2014 -2018:

Tabel 8.1

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Pulang Pisau 2014 – 2018**

(dalam jutaan Rupiah)

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
01				Urusan Wajib				342.512		391.027		451.780		517.948		597.196		2.300.463
01	01			Pendidikan				53.977		61.622		71.196		81.624		94.112		362.531
1	01	1.01.01	0	Dinas Pendidikan				53.977		61.622		71.196		81.624		94.112		362.531
1	01	1.01.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	4.417	90	5.043	90	5.826	90	6.680	90	7.702	90	29.668
1	01	1.01.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	2.510	90	2.866	90	3.311	90	3.796	90	4.376	90	16.858
1	01	1.01.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	105	90	120	90	138	90	159	90	183	90	705
1	01	1.01.01	04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	100	90	114	90	132	90	151	90	174	90	672
1	01	1.01.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	165	90	188	90	218	90	250	90	288	90	1.108
1	01	1.01.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	120	90	137	90	158	90	182	90	209	90	806
1	01	1.01.01	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	100	Mengikuti	114	Mengikuti	132	Mengikuti	151	Mengikuti	174	Mengikuti	672
1	01	1.01.01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	43,43	46,90	1.255	51,12	1.433	60,32	1.655	65,74	1.898	71,65	2.188	71,65	8.429
1	01	1.01.01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/SDLB/MI	88,02	89,42	25.705	90,88	29.346	92,33	33.905	93,80	38.871	95,30	44.819	95,30	172.646
1	01	1.01.01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SMP/MTs	65,47	69,39	-	73,55	-	77,96	-	82,63	-	87,58	-	-	-
1	01	1.01.01	17	Program Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/MA	40,86	46,37	14.464	52,63	16.513	59,73	19.079	67,79	21.873	76,94	25.220	76,94	97.150
1	01	1.01.01	18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf			260		297		343		393		453		1.746
1	01	1.01.01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	77,72	84,71	2.465	92,33	2.814	96,94	3.251	98,87	3.728	99,85	4.298	99,85	16.556
1	01	1.01.01	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan	40,00	43,00	260	46,00	297	49,00	343	52,00	393	55,00	453	55,00	1.746

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	01	1.01.01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dasar	128,58	128,70	2.050	128,82	2.340	128,94	2.704	129,06	3.100	129,18	3.574	129,18	13.769
01	02			Kesehatan				30.186		34.462		39.816		45.647		52.632		202.742
1	02	1.02.01	0	Dinas Kesehatan				16.814		19.196		22.178		25.426		29.317		112.931
1	02	1.02.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	969	90	1.106	90	1.278	90	1.465	90	1.689	90	6.506
1	02	1.02.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	1.072	90	1.224	90	1.414	90	1.621	90	1.869	90	7.200
1	02	1.02.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	131	90	150	90	173	90	198	90	229	90	881
1	02	1.02.01	04	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	5	90	6	90	7	90	8	90	9	90	34
1	02	1.02.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	220	90	251	90	290	90	333	90	384	90	1.478
1	02	1.02.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	300	90	342	90	396	90	454	90	523	90	2.015
1	02	1.02.01	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	125,00	135,00	1.857	140,00	2.120	145,00	2.449	150,00	2.808	155,00	3.237	155,00	12.471
1	02	1.02.01	16	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Rasio dokter persatuan penduduk	17,00	16,00	2.255	18,00	2.574	20,00	2.974	22,00	3.410	24,00	3.931	24,00	15.144
1	02	1.02.01	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,00	71,7	594	72,00	678	72,2	784	72,4	899	72,6	1.036	72,6	3.991
1	02	1.02.01	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita gizi kurang	5,00	30,00	50	28,00	57	26,00	66	24,00	76	22,00	87	22,00	336
1	02	1.02.01	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization	100,00	100,00	125	100,00	143	100,00	165	100,00	189	100,00	218	100,00	840
1	02	1.02.01	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	100,00	100,00	690	100,00	788	100,00	910	100,00	1.043	100,00	1.203	100,00	4.634
1	02	1.02.01	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	71,00	71,7	365	72,00	417	72,2	481	72,4	552	72,6	636	72,6	2.452
1	02	1.02.01	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100,00	100,00	175	100,00	200	100,00	231	100,00	265	100,00	305	100,00	1.175
1	02	1.02.01	25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,8	0,92	6.156	0,96	7.028	1,00	8.120	1,04	9.310	1,08	10.734	1,08	41.350
1	02	1.02.01	28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	2,00	2,00	1.650	2,00	1.884	2,00	2.176	2,00	2.495	2,00	2.877	2,00	11.082
1	02	1.02.01	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan kunjungan bayi	70,00	90,00	200	90,00	228	92,5	264	92,5	302	95,00	349	95,00	1.343
1	02	1.02.02	0	Rumah Sakit Umum Daerah				13.372		15.266		17.638		20.221		23.315		89.811

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	02	1.02.02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	1.720	90	1.964	90	2.269	90	2.601	90	2.999	90	11.552
1	02	1.02.02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	240	90	274	90	317	90	363	90	418	90	1.612
1	02	1.02.02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	156	90	178	90	206	90	236	90	272	90	1.048
1	02	1.02.02	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	10	90	11	90	13	90	15	90	17	90	67
1	02	1.02.02	16	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,00	71,7	3.784	72,00	4.320	72,2	4.991	72,4	5.722	72,6	6.598	72,6	25.415
1	02	1.02.02	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization	100,00	100,00	45	100,00	51	100,00	59	100,00	68	100,00	78	100,00	302
1	02	1.02.02	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita gizi kurang	5,00	30,00	10	28,00	11	26,00	13	24,00	15	22,00	17		67
1	02	1.02.02	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100,00	100,00	3.000	100,00	3.425	100,00	3.957	100,00	4.537	100,00	5.231	100,00	20.149
1	02	1.02.02	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,7	0,7	3.977	1,5	4.540	1,5	5.245	1,5	6.014	1,5	6.934	1,5	26.710
1	02	1.02.02	27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Angka Harapan Hidup	71,00	71,7	430	72,00	491	72,2	567	72,4	650	72,6	750	72,6	2.888
01	03			Pekerjaan Umum				165.769		189.250		218.653		250.677		289.032		1.113.381
1	03	1.03.01	0	Dinas Pekerjaan Umum				165.769		189.250		218.653		250.677		289.032		1.113.381
1	03	1.03.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	865	90	988	90	1.141	90	1.309	90	1.509	90	5.812
1	03	1.03.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	674	90	770	90	889	90	1.019	90	1.175	90	4.528
1	03	1.03.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	100	90	114	90	132	90	151	90	174	90	672
1	03	1.03.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	85	90	97	90	112	90	129	90	148	90	571
1	03	1.03.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	43	90	49	90	57	90	65	90	75	90	289
1	03	1.03.01	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	65,00	68	79.776	72,00	91.076	75,00	105.226	78	120.638	75,00	139.096	75,00	535.813
1	03	1.03.01	16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	8,00	9,00	6.391	10,00	7.296	11,00	8.430	12,00	9.664	13,00	11.143	13,00	42.925

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	03	1.03.01	17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	80,00	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-
1	03	1.03.01	18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	65,00	68,00	2.225	72,00	2.540	74,00	2.935	76,00	3.364	79,00	3.879	79,00	14.943
1	03	1.03.01	23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana kebinarmargaan	80,00	80,00	2.641	80,00	3.015	80,00	3.484	80,00	3.994	80,00	4.605	80,00	17.738
1	03	1.03.01	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	60,00	65,00	16.502	70,00	18.840	74,00	21.767	78,00	24.955	83,00	28.773	83,00	110.836
1	03	1.03.01	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Rumah Tangga (RT) berakses air minum Cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota 	13,00	14,00	9.557	15,00	10.911	16,00	12.607	17,00	14.453	18,00	16.664	18,00	64.192
1	03	1.03.01	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan infrastruktur memadai	70,00	73,00	7.500	75,00	8.562	77,00	9.892	79,00	11.341	82,00	13.076	82,00	50.370
1	03	1.03.01	30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	jalan lingkungan dibangun dalam kondisi baik	70,00	75,00	12.840	78,00	14.658	80,00	16.936	82,00	19.416	85,00	22.387	85,00	86.236
1	03	1.03.01	31	Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik Daerah	Prasarana Umum dalam kondisi baik	80,00	82,00	20.420	84,00	23.312	86,00	26.934	88,00	30.879	90,00	35.604	90,00	137.150
1	05	1.03.01	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	ada	ada	2.180	ada	2.489	ada	2.875	ada	3.297	ada	3.801	ada	14.642
1	05	1.03.01	16	Program Pemanfaatan Ruang	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kota beserta rencana rincinya	terlayani	terlayani	955	terlayani	1.090	terlayani	1.260	terlayani	1.444	terlayani	1.665	terlayani	6.414
1	06	1.03.01	16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama pembangunan yang mencapai sasaran	80,00	80,00	1.245	80,00	1.421	80,00	1.642	80,00	1.883	80,00	2.171	80,00	8.362
1	08	1.03.01	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	16,40	35,00	1.770	45,00	2.021	50,00	2.335	60,00	2.677	70,00	3.086	70,00	11.888
01	06			Perencanaan pembangunan				8.500		9.704		11.212		12.854		14.821		57.090
1	05	1.06.01	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				8.500		9.704		11.212		12.854		14.821		57.090
1	05	1.06.01	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	ada	ada	90	ada	103	ada	119	ada	136	ada	157	ada	604

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	06	1.06.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	816	90	932	90	1.076	90	1.234	90	1.423	90	5.481
1	06	1.06.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	2.297	90	2.623	90	3.030	90	3.474	90	4.005	90	15.429
1	06	1.06.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	40	90	46	90	53	90	60	90	70	90	269
1	06	1.06.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	100	90	114	90	132	90	151	90	174	90	672
1	06	1.06.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	38	90	43	90	50	90	57	90	66	90	255
1	06	1.06.01	18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase wilayah strategis dan cepat tumbuh yang direncanakan			650		742		857		983		1.133		4.366
1	06	1.06.01	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	2.848	ada	3.251	ada	3.756	ada	4.306	ada	4.965	ada	19.127
1	06	1.06.01	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	90,00	90,00	518	90,00	591	90,00	683	90,00	783	90,00	903	90,00	3.479
1	06	1.06.01	23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Tingkat koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya	90,00	90,00	694	90,00	792	90,00	915	90,00	1.049	90,00	1.209	90,00	4.658
1	16	1.06.01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	10,00	11,00	410	12,00	468	13,00	540	14,00	619	15,00	714	15,00	2.750
01	07			Perhubungan				2.037		2.326		2.687		3.080		3.552		13.681
1	07	1.07.01	0	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				2.037		2.326		2.687		3.080		3.552		13.681
1	07	1.07.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	506	90	578	90	667	90	765	90	882	90	3.398
1	07	1.07.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	300	90	342	90	396	90	454	90	523	90	2.015
1	07	1.07.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	30	90	34	90	40	90	45	90	52	90	201
1	07	1.07.01	04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	10	90	11	90	13	90	15	90	17	90	67
1	07	1.07.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	90	90	103	90	119	90	136	90	157	90	604
1	07	1.07.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	20	90	23	90	26	90	30	90	35	90	134
1	07	1.07.01	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1.400,00	4.257,00	270	5.000,00	308	5.240,00	356	5.782,00	408	6.201,00	471	6.201,00	1.813
1	07	1.07.01	17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah uji kir angkutan umum	489,00	202,00	100	212,00	114	225,00	132	339,00	151	542,00	174	542,00	672

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	07	1.07.01	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah terminal angkutan umum	4,00	4,00	155	4,00	177	4,00	204	4,00	234	4,00	270	4,00	1.041
1	07	1.07.01	19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pemasangan rambu-rambu	0,00	120,00	426	136,00	487	148,00	562	100,00	644	205,00	743	205,00	2.862
1	25	1.07.01	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	80,00	85,00	25	90,00	29	95,00	33	97,00	38	99,00	44	99,00	168
1	25	1.07.01	16	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: a. media massa seperti majalah, radio, dan televisi; b. media baru seperti website (media online); c. media tradisional seperti pertunjukan rakyat; d. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau e. media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	80,00	85,00	30	90,00	34	95,00	40	97,00	45	99,00	52	99,00	201
1	25	1.07.01	17	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase sumber daya komunikasi dan informasi yang memenuhi standar	80,00	85,00	30	90,00	34	95,00	40	97,00	45	99,00	52	99,00	201
1	25	1.07.01	18	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media massa, media baru, media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang	80,00	85,00	10	90,00	11	95,00	13	97,00	15	99,00	17	99,00	67
1	25	1.07.01	19	Program Peningkatan Pelayanan Publik	#N/A	80,00	85,00	35	90,00	40	95,00	46	97,00	53	99,00	61	99,00	235
01	08			Lingkungan Hidup				4.385		5.006		5.784		6.631		7.645		29.451
1	08	1.08.01	0	Badan Lingkungan Hidup				4.385		5.006		5.784		6.631		7.645		29.451
1	08	1.08.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	606	90	692	90	799	90	916	90	1.057	90	4.070
1	08	1.08.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	869	90	992	90	1.146	90	1.314	90	1.515	90	5.837
1	08	1.08.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	3	90	3	90	4	90	5	90	5	90	20
1	08	1.08.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	100	90	114	90	132	90	151	90	174	90	672
1	08	1.08.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	15	90	17	90	20	90	23	90	26	90	101
1	08	1.08.01	07	Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	40	Mengikuti	46	Mengikuti	53	Mengikuti	60	Mengikuti	70	Mengikuti	269

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	08	1.08.01	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	16,40	35,00	934	45,00	1.066	50,00	1.232	60,00	1.412	70,00	1.629	70,00	6.273
1	08	1.08.01	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	status pencemaran udara air	100,00	100,00	235	100,00	268	100,00	310	100,00	355	100,00	410	100,00	1.578
1	08	1.08.01	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan konservasi sumber daya alam	65,00	65,00	60	70,00	68	75,00	79	80,00	91	85,00	105	85,00	403
1	08	1.08.01	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dan jenis data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan	2,00	2,00	105	2,00	120	2,00	138	2,00	159	2,00	183	2,00	705
1	08	1.08.01	22	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase kerusakan kawasan hutan	0,01	0,01	105	0,01	120	0,01	138	0,01	159	0,01	183	0,01	705
1	08	1.08.01	23	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Cakupan areal ekosistem pesisir yang dikelola dan direhabilitasi	80,00	80,00	30	80,00	34	80,00	40	80,00	45	80,00	52	80,00	201
1	08	1.08.01	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	80,00	80,00	165	80,00	188	80,00	218	80,00	250	80,00	288	80,00	1.108
1	08	1.08.01	25	Program Penataan Hukum/ Peraturan Perundang-undangan	cakupan perundangan yang disusun	3,00	3,00	140	3,00	160	3,00	185	3,00	212	3,00	244	3,00	940
1	08	1.08.01	26	Program Mitigasi dan Adaptasi Bencana Serta Perubahan Iklim	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal	65,00	65,00	708	70,00	808	75,00	934	80,00	1.071	85,00	1.234	85,00	4.755
1	08	1.08.01	27	Program Penataan Lingkungan dan Komunitas Lingkungan	Penegakan hukum lingkungan	ada	ada	50	ada	57	ada	66	ada	76	ada	87	ada	336
1	08	1.08.01	28	Program Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup	cakupan pendidikan lingkungan hidup	semua kecamatan	semua kecamatan	140	semua kecamatan	160	semua kecamatan	185	semua kecamatan	212	semua kecamatan	244	semua kecamatan	940
1	08	1.08.01	29	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	50,00	50,00	80	55,00	91	60,00	106	65,00	121	70,00	139	70,00	537
01	10			Kependudukan dan Catatan Sipil				3.000		3.425		3.957		4.537		5.231		20.149
1	10	1.10.01	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				3.000		3.425		3.957		4.537		5.231		20.149
1	10	1.10.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	612	90	699	90	807	90	926	90	1.067	90	4.111
1	10	1.10.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	1.030	90	1.176	90	1.359	90	1.558	90	1.796	90	6.918
1	10	1.10.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	100	90	114	90	132	90	151	90	174	90	672
1	10	1.10.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	5	90	6	90	7	90	8	90	9	90	36
1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan			993		1.133		1.309		1.501		1.731		6.666
1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	74,00	80,00	-	85,00	-	90,00	-	95,00	-	99,00	-	99,00	-
1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase bayi berakte kelahiran	53,00	65,00	-	70,00	-	80,00	-	95,00	-	99,00	-	99,00	-

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	pasangan berakte nikah	83,00	88,00	-	90,00	-	93,00	-	96,00	-	99,00	-	99,00	-
1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan KTP	55,00	65,00	-	70,00	-	80,00	-	95,00	-	99,00	-	99,00	-
1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	25,00	40,00	-	60,00	-	75,00	-	85,00	-	90,00	-	90,00	-
1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Ketersediaan database kependudukan skala propinsi	tidak ada	tidak ada	-	tidak ada	-	tidak ada	-	tidak ada	-	tidak ada	-	tidak ada	-
1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	-	sudah	-	sudah	-	sudah	-	sudah	-	sudah	-
1	10	1.10.01	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan	cakupan aparatur yang dilatih	50,00	50,00	260	50,00	297	50,00	343	50,00	393	50,00	453	50,00	1.746
01	11			Pemberdayaan Perempuan				2.074		2.368		2.735		3.136		3.616		13.928
1	11	1.11.01	0	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana				2.074		2.368		2.735		3.136		3.616		13.928
1	11	1.11.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	331	90	378	90	437	90	501	90	577	90	2.223
1	11	1.11.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	131	90	149	90	172	90	198	90	228	90	878
1	11	1.11.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	17	90	19	90	22	90	26	90	30	90	114
1	11	1.11.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	11	90	13	90	15	90	17	90	19	90	74
1	11	1.11.01	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	5,00	5,10	114	5,10	130	5,50	150	6,00	172	6,50	199	6,50	766
1	11	1.11.01	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	95,00	94,90	-	94,90	-	94,50	-	94,00	-	93,50	-	93,50	-
1	11	1.11.01	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	0,05	0,05	96	0,05	110	0,05	127	0,05	145	0,05	167	0,05	645
1	11	1.11.01	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	5,00	5,10	65	5,10	74	5,50	86	6,00	98	6,50	113	6,50	437
1	11	1.11.01	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	95,00	94,90	-	94,90	-	94,50	-	94,00	-	93,50	-		-
1	12	1.11.01	15	Program Keluarga Berencana	Persentase Akseptor KB	82,49	82,50	1.064	82,55	1.215	82,55	1.404	82,60	1.609	82,60	1.855	82,60	7.147
1	12	1.11.01	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	12,00	12,00	50	11,50	57	11,50	66	11,00	76	11,00	87	11,00	336
1	12	1.11.01	17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,00	2,00	175	2,00	200	2,00	231	2,00	265	2,00	305	2,00	1.175
1	12	1.11.01	23	Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan bina keluarga balita (BKB) ber KB	98,94	98,94	20	78,05	23	78,05	26	78,10	30	78,10	35	78,10	134
01	13			Sosial				2.845		3.248		3.753		4.303		4.961		19.110

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	13	1.13.01	0	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				2.845		3.248		3.753		4.303		4.961		19.110
1	13	1.13.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	553	90	631	90	729	90	836	90	964	90	3.713
1	13	1.13.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	817	90	933	90	1.078	90	1.235	90	1.425	90	5.487
1	13	1.13.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	50	90	57	90	66	90	76	90	87	90	336
1	13	1.13.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	50	90	57	90	66	90	76	90	87	90	336
1	13	1.13.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	52	90	59	90	69	90	79	90	91	90	349
1	13	1.13.01	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS skala kab./kota yang menerima program pemberdayaan social melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya	1.048,00	1.048,00	150	1.048,00	171	1.048,00	198	1.048,00	227	1.048,00	262	1.048,00	1.007
1	13	1.13.01	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS skala kab./kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	1.048,00	1.048,00	315	1.048,00	360	1.048,00	415	1.048,00	476	1.048,00	549		2.116
1	13	1.13.01	18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang telah menerima jaminan sosial	80,00	80,00	47	80,00	54	80,00	62	80,00	71	80,00	82	80,00	316
1	13	1.13.01	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang memperoleh pembinaan	80,00	80,00	197	80,00	224	80,00	259	80,00	297	80,00	343	80,00	1.320
1	14	1.13.01	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Angka Partisipasi angkatan kerja	71,00	72,00	100	73,00	114	74,00	132	75,00	151	76,00	174	76,00	672
1	14	1.13.01	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	0,00	0,70	100	0,65	114	0,60	132	0,55	151	0,50	174		672
1	14	1.13.01	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100,00	100,00	35	100,00	40	100,00	46	100,00	53	100,00	61	100,00	235
1	14	1.13.01	18	Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Norma Kerja dan K3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	8,30	8,33	45	8,00	51	7,69	59	7,40	68	7,14	78	7,14	302
2	08	1.13.01	15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase transmigran swakarsa	20,00	20,00	335	20,00	382	20,00	442	20,00	507	20,00	584	20,00	2.250
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian				64.395		73.517		84.939		97.379		112.278		432.508
1	13	1.13.02	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				1.500		1.712		1.979		2.268		2.615		10.075
1	13	1.13.02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	334	90	381	90	440	90	505	90	582	90	2.241

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	13	1.13.02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	180	90	205	90	237	90	272	90	314	90	1.209
1	13	1.13.02	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	78	90	88	90	102	90	117	90	135	90	521
1	13	1.13.02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	30	90	34	90	40	90	45	90	52	90	201
1	13	1.13.02	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	8	90	9	90	10	90	12	90	14	90	52
1	13	1.13.02	23	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (wmk)	2 Jam	2 Jam	165	2 Jam	188	2 Jam	218	2 Jam	250	2 Jam	288	2 Jam	1.108
1	13	1.13.02	24	Program Kedaruratan dan Logistik	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	3 Kecamatan	4 Kecamatan	315	5 Kecamatan	360	6 kecamatan	415	7 Kecamatan	476	8 Kecamatan	549	8 Kecamatan	2.116
1	13	1.13.02	25	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	cakupan rehabilitasi lingkungan	80,00	80,00	391	80,00	446	80,00	516	80,00	591	80,00	682	80,00	2.626
1	19	1.19.01	0	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat				2.100		2.397		2.770		3.176		3.662		14.105
1	19	1.19.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	470	90	537	90	620	90	711	90	819	90	3.157
1	19	1.19.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	160	90	183	90	211	90	242	90	279	90	1.075
1	19	1.19.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	20	90	23	90	26	90	30	90	35	90	134
1	19	1.19.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	40	90	46	90	53	90	60	90	70	90	269
1	19	1.19.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	45	90	51	90	59	90	68	90	78	90	302
1	19	1.19.01	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	90,00	90,00	875	90,00	999	90,00	1.155	90,00	1.324	90,00	1.526	90,00	5.879
1	19	1.19.01	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP	2 kegiatan	2 kegiatan	240	2 kegiatan	274	2 kegiatan	316	2 kegiatan	362	2 kegiatan	418	2 kegiatan	1.610
1	19	1.19.01	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	250	2 kegiatan	285	2 kegiatan	330	2 kegiatan	378	2 kegiatan	436	2 kegiatan	1.679
1	19	1.19.02	0	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja				1.300		1.484		1.715		1.966		2.267		8.731
1	19	1.19.02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	733	90	837	90	967	90	1.108	90	1.278	90	4.921
1	19	1.19.02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	120	90	137	90	158	90	181	90	209	90	806
1	19	1.19.02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	105	90	120	90	138	90	159	90	183	90	705

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	19	1.19.02	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	7	90	8	90	9	90	11	90	12	90	47
1	19	1.19.02	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	2,29	2,30	120	2,30	137	2,30	158	2,30	181	2,40	209	2,40	806
1	19	1.19.02	16	Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase penegakan PERDA	65,00	70,00	215	75,00	246	80,00	284	85,00	326	95,00	375	95,00	1.446
1	06	1.20.03	0	Sekretariat Daerah				26.339		30.069		34.741		39.829		45.923		176.901
1	06	1.20.03	15	Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan data dan informasi pembangunan daerah	ada	ada	497	ada	567	ada	656	ada	752	ada	867	ada	3.338
1	06	1.20.03	16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama pembangunan yang mencapai sasaran	80,00	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-
1	06	1.20.03	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	43	ada	49	ada	57	ada	65	ada	75	ada	289
1	09	1.20.03	17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	kasus tanah Negara yang ditindak lanjuti	90,00	90,00	50	90,00	57	90,00	66	90,00	76	90,00	87	90,00	336
1	17	1.20.03	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	4,00	4,00	985	4,00	1.125	4,00	1.299	4,00	1.490	4,00	1.717	4,00	6.616
1	18	1.20.03	16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	40,00	41,00	490	42,00	559	43,00	646	44,00	741	45,00	854	45,00	3.291
1	18	1.20.03	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah Organisasi olahraga	15,00	16,00	410	17,00	468	18,00	541	19,00	620	20,00	715	20,00	2.754
1	18	1.20.03	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah Gedung Olahraga	1,00	1,00	150	2,00	171	2,00	198	2,00	227	2,00	262	2,00	1.007
1	20	1.20.03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	8.087	90	9.233	90	10.667	90	12.230	90	14.101	90	54.318
1	20	1.20.03	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	6.410	90	7.318	90	8.455	90	9.693	90	11.176	90	43.052
1	20	1.20.03	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	400	90	457	90	528	90	605	90	697	90	2.687
1	20	1.20.03	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	425	90	485	90	561	90	643	90	741	90	2.854
1	20	1.20.03	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	275	90	314	90	363	90	416	90	479	90	1.847
1	20	1.20.03	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase kinerja kepala daerah/wakil kepala daerah	100,00	100,00	555	100,00	634	100,00	732	100,00	839	100,00	968	100,00	3.728
1	20	1.20.03	31	Program Kerjasama Pengembangan Informasi dan Komunikasi Daerah dengan Mass Media	cakupan kerjasama dengan mass media	ada	ada	1.885	ada	2.152	ada	2.486	ada	2.851	ada	3.287	ada	12.661
1	20	1.20.03	32	Program Pembentukan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Cakupan HAM	90,00	90,00	205	90,00	234	90,00	270	90,00	310	90,00	357	90,00	1.377

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	20	1.20.03	33	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur	persentase pengembangan pendayagunaan aparatur	90,00	90,00	458	90,00	523	90,00	604	90,00	693	90,00	799	90,00	3.076
1	20	1.20.03	34	Program Peningkatan Pembinaan/ Pengawasan Tata Pemerintahan Daerah Bawah	cakupan pembinaan/pengawasan tata pemerintahan	90,00	90,00	2.111	90,00	2.410	90,00	2.784	90,00	3.192	90,00	3.680	90,00	14.176
1	20	1.20.03	35	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan	cakupan pelayanan kesra	1 kabupaten	1 kabupaten	890	1 kabupaten	1.016	1 kabupaten	1.174	1 kabupaten	1.346	1 kabupaten	1.552	1 kabupaten	5.978
1	20	1.20.03	42	Program Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	sistem informasi bidang hukum	ada	ada	65	ada	74	ada	86	ada	98	ada	113	ada	437
1	20	1.20.03	43	Program Bantuan Hukum	cakupan bantuan masyarakat	100,00	100,00	120	100,00	137	100,00	158	100,00	181	100,00	209	100,00	806
1	20	1.20.03	44	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	cakupan pengembangan IPTEK	75,00	80,00	60	85,00	68	90,00	79	95,00	91	98,00	105	98,00	403
1	20	1.20.03	45	Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK	cakupan pemanfaatan IPTEK	75,00	80,00	100	85,00	114	90,00	132	95,00	151	98,00	174	98,00	672
1	20	1.20.03	46	Program Penguatan Kelembagaan IPTEK	cakupan kelembagaan IPTEK	75,00	80,00	88	85,00	100	90,00	115	95,00	132	98,00	153	98,00	588
1	20	1.20.03	47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesra dan Kemasyarakatan	cakupan sarana dan prasarana kesra	75,00	80,00	400	85,00	457	90,00	528	95,00	605	98,00	697	98,00	2.687
1	20	1.20.03	48	Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Produksi Daerah	cakupan pembinaan sarana ekonomi dan produksi daerah	75,00	80,00	65	85,00	74	90,00	86	95,00	98	98,00	113	98,00	437
1	20	1.20.03	49	Program Peningkatan Kemampuan Pemanfaatan Terhadap Potensi Ekonomi Daerah	cakupan pemanfaatan terhadap potensi daerah	75,00	80,00	15	85,00	17	90,00	20	95,00	23	98,00	26	98,00	101
1	20	1.20.03	50	Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Promosi Potensi Daerah	cakupan sarana ekonomi dan promosi potensi daerah	75,00	80,00	55	85,00	63	90,00	73	95,00	83	98,00	96	98,00	369
1	20	1.20.03	51	Program Peningkatan Sosial Kesejahteraan Rakyat	cakupan peningkatan sosial kesra	75,00	80,00	40	85,00	46	90,00	53	95,00	60	98,00	70	98,00	269
2	03	1.20.03	15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase pertambangan tanpa izin	12,50	25,00	65	30,00	74	35,00	86	40,00	98	45,00	113	45,00	437
2	03	1.20.03	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	rasio elektrifikasi	70,00	70,00	160	70,00	183	70,00	211	70,00	242	70,00	279	70,00	1.075
2	03	1.20.03	18	Program Pembinaan Teknis dan Evaluasi Pertambangan	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	0,01	10,00	40	12,00	46	14,00	53	16,00	60	18,00	70	18,00	269
2	03	1.20.03	20	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	cakupan pengembangan dan pemanfaatan energi	80,00	80,00	680	80,00	776	80,00	897	80,00	1.028	80,00	1.186	80,00	4.567
2	04	1.20.03	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kunjungan wisata	0,00	1,55	60	1,50	68	1,43	79	1,41	91	1,37	105	1,37	403
1	20	1.20.04	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				10.867		12.406		14.334		16.433		18.947		72.987
1	20	1.20.04	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	2.576	90	2.940	90	3.397	90	3.895	90	4.491	90	17.298
1	20	1.20.04	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	1.494	90	1.706	90	1.971	90	2.260	90	2.605	90	10.036

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	20	1.20.04	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	369	90	421	90	486	90	558	90	643	90	2.477
1	20	1.20.04	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	209	90	238	90	275	90	315	90	364	90	1.401
1	20	1.20.04	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	68	90	78	90	90	90	103	90	118	90	456
1	20	1.20.04	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase anggota DPRD yang mematuhi tata tertib DPRD	90,00	90,00	5.247	90,00	5.990	90,00	6.921	90,00	7.934	90,00	9.148	90,00	35.240
1	20	1.20.04	26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peraturan perundang-undangan harmonis dan sinkron	100,00	100,00	337	100,00	385	100,00	445	100,00	510	100,00	588	100,00	2.267
1	20	1.20.04	37	Program Sceins Driver Reference (SDR) Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	cakupan program SDR	100,00	100,00	488	100,00	557	100,00	644	100,00	738	100,00	851	100,00	3.277
1	20	1.20.04	38	Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80,00	80,00	80	80,00	91	80,00	105	80,00	120	80,00	139	80,00	535
1	20	1.20.05	0	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				10.950		12.501		14.443		16.559		19.092		73.545
1	20	1.20.05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	895	90	1.022	90	1.181	90	1.353	90	1.561	90	6.011
1	20	1.20.05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	5.051	90	5.766	90	6.662	90	7.638	90	8.807	90	33.925
1	20	1.20.05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	100	90	114	90	132	90	151	90	174	90	672
1	20	1.20.05	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	16	90	18	90	21	90	24	90	28	90	107
1	20	1.20.05	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah	cakupan penatausahaan keuangan daerah	100,00	100,00	1.614	100,00	1.842	100,00	2.129	100,00	2.440	100,00	2.814	100,00	10.838
1	20	1.20.05	18	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	peningkatan penerimaan pendapatan	13,00	13,00	2.799	13,00	3.196	13,00	3.692	13,00	4.233	13,00	4.881	13,00	18.801
1	20	1.20.05	19	Program Peningkatan dan Pengembangan Aset serta Barang Milik Daerah	cakupan aset yang dikelola	80,00	80,00	475	80,00	542	80,00	627	80,00	718	80,00	828	80,00	3.190
1	20	1.20.06	0	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau				2.269		2.590		2.993		3.431		3.956		15.240
1	20	1.20.06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	398	90	454	90	525	90	601	90	693	90	2.671
1	20	1.20.06	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	401	90	457	90	528	90	606	90	698	90	2.690
1	20	1.20.06	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	10	90	11	90	13	90	15	90	17	90	67
1	20	1.20.06	04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	20	90	23	90	26	90	30	90	35	90	134

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	20	1.20.06	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparaturnya yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	100	90	114	90	132	90	151	90	174	90	672
1	20	1.20.06	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	20	90	23	90	26	90	30	90	35	90	134
1	20	1.20.06	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	persentase temuan yang ditindaklanjuti	90,00	90,00	1.001	90,00	1.143	90,00	1.320	90,00	1.513	90,00	1.745	90,00	6.722
1	20	1.20.06	21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa dan aparaturnya yang profesional	100,00	100,00	270	100,00	308	100,00	356	100,00	408	100,00	471	100,00	1.813
1	20	1.20.06	22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase penerapan sistem prosedur	100,00	100,00	50	100,00	57	100,00	66	100,00	76	100,00	87	100,00	336
1	20	1.20.07	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				3.300		3.767		4.353		4.990		5.754		22.164
1	20	1.20.07	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	708	90	809	90	934	90	1.071	90	1.235	90	4.758
1	20	1.20.07	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparaturnya	90	90	123	90	141	90	163	90	187	90	215	90	829
1	20	1.20.07	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	12	90	14	90	16	90	18	90	21	90	81
1	20	1.20.07	28	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya	70,00	75,00	15	78,00	17	81,00	20	83,00	23	85,00	26	85,00	101
1	20	1.20.07	29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Otonomi Daerah	Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya	70,00	75,00	1.604	78,00	1.831	81,00	2.115	83,00	2.425	85,00	2.796	85,00	10.770
1	20	1.20.07	30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparaturnya yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir	80,00	80,00	838	80,00	956	80,00	1.105	80,00	1.267	80,00	1.460	80,00	5.626
1	20	1.20.08	0	Kecamatan Kahayan Hilir				622		710		820		941		1.084		4.177
1	20	1.20.08	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	399	90	456	90	527	90	604	90	696	90	2.683
1	20	1.20.08	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparaturnya	90	90	194	90	221	90	255	90	293	90	337	90	1.300
1	20	1.20.08	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparaturnya yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	25	90	29	90	33	90	38	90	44	90	168
1	20	1.20.08	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	4	90	5	90	5	90	6	90	7	90	27

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
				Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan														
1	20	1.20.09	0	Kecamatan Kahayan Kuala				540		616		712		817		942		3.627
1	20	1.20.09	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	369	90	421	90	486	90	557	90	643	90	2.475
1	20	1.20.09	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	111	90	126	90	146	90	167	90	193	90	742
1	20	1.20.09	04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	10	90	11	90	13	90	15	90	17	90	67
1	20	1.20.09	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	25	90	29	90	33	90	38	90	44	90	168
1	20	1.20.09	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	1	90	1	90	1	90	2	90	2	90	7
1	20	1.20.09	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	25	Mengikuti	29	Mengikuti	33	Mengikuti	38	Mengikuti	44	Mengikuti	168
1	20	1.20.10	0	Kecamatan Kahayan Tengah				481		549		634		727		839		3.231
1	20	1.20.10	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	340	90	388	90	448	90	514	90	593	90	2.284
1	20	1.20.10	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	95	90	108	90	125	90	143	90	165	90	636
1	20	1.20.10	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	25	90	29	90	33	90	38	90	44	90	168
1	20	1.20.10	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	1	90	1	90	2	90	2	90	2	90	8
1	20	1.20.10	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	20	Mengikuti	23	Mengikuti	26	Mengikuti	30	Mengikuti	35	Mengikuti	134
1	20	1.20.11	0	Kecamatan Maliku				532		607		702		804		928		3.573
1	20	1.20.11	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	377	90	430	90	497	90	570	90	657	90	2.532
1	20	1.20.11	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	113	90	129	90	149	90	171	90	197	90	759
1	20	1.20.11	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	25	90	29	90	33	90	38	90	44	90	168
1	20	1.20.11	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	2	90	2	90	3	90	3	90	3	90	13
1	20	1.20.11	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	15	Mengikuti	17	Mengikuti	20	Mengikuti	23	Mengikuti	26	Mengikuti	101
1	20	1.20.12	0	Kecamatan Banama Tingang				492		562		649		744		858		3.304
1	20	1.20.12	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	324	90	369	90	427	90	489	90	564	90	2.173

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	20	1.20.12	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	132	90	151	90	175	90	200	90	231	90	890
1	20	1.20.12	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	25	90	29	90	33	90	38	90	44	90	168
1	20	1.20.12	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	1	90	1	90	1	90	2	90	2	90	7
1	20	1.20.12	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	10	Mengikuti	11	Mengikuti	13	Mengikuti	15	Mengikuti	17	Mengikuti	67
1	20	1.20.13	0	Kecamatan Pandih Batu				532		607		702		804		928		3.573
1	20	1.20.13	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	388	90	443	90	511	90	586	90	676	90	2.605
1	20	1.20.13	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	101	90	115	90	133	90	153	90	176	90	678
1	20	1.20.13	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	25	90	29	90	33	90	38	90	44	90	168
1	20	1.20.13	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	2	90	2	90	3	90	3	90	3	90	13
1	20	1.20.13	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	16	Mengikuti	19	Mengikuti	21	Mengikuti	25	Mengikuti	28	Mengikuti	109
1	20	1.20.14	0	Kecamatan Jabiren Raya				502		573		662		759		875		3.372
1	20	1.20.14	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	332	90	378	90	437	90	501	90	578	90	2.227
1	20	1.20.14	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	125	90	143	90	166	90	190	90	219	90	843
1	20	1.20.14	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	25	90	29	90	33	90	38	90	44	90	168
1	20	1.20.14	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	20	Mengikuti	23	Mengikuti	26	Mengikuti	30	Mengikuti	35	Mengikuti	134
1	20	1.20.15	0	Kecamatan Sebangau Kuala				550		628		725		832		959		3.694
1	20	1.20.15	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	343	90	391	90	452	90	518	90	597	90	2.301
1	20	1.20.15	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	137	90	157	90	181	90	208	90	240	90	923
1	20	1.20.15	04	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	10	90	11	90	13	90	15	90	17	90	67
1	20	1.20.15	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	25	90	29	90	33	90	38	90	44	90	168
1	20	1.20.15	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	35	Mengikuti	40	Mengikuti	46	Mengikuti	53	Mengikuti	61	Mengikuti	235
1	20	1.20.16	0	Kelurahan Pulang Pisau				173		197		228		261		301		1.159
1	20	1.20.16	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	131	90	150	90	173	90	198	90	228	90	880

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	20	1.20.16	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	40	90	45	90	52	90	60	90	69	90	265
1	20	1.20.16	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	2	90	2	90	3	90	3	90	3	90	13
1	20	1.20.17	0	Kelurahan Kalawa				148		168		195		223		257		991
1	20	1.20.17	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	107	90	122	90	141	90	162	90	187	90	719
1	20	1.20.17	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	38	90	43	90	50	90	57	90	66	90	255
1	20	1.20.17	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	3	90	3	90	3	90	4	90	4	90	17
1	20	1.20.18	0	Kelurahan Bereng				148		168		195		223		257		991
1	20	1.20.18	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	96	90	109	90	126	90	144	90	167	90	641
1	20	1.20.18	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	52	90	59	90	69	90	79	90	91	90	349
1	20	1.20.19	0	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu				905		1.033		1.194		1.369		1.578		6.078
1	20	1.20.19	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	318	90	364	90	420	90	482	90	555	90	2.139
1	20	1.20.19	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	334	90	381	90	441	90	505	90	582	90	2.243
1	20	1.20.19	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	35	90	40	90	46	90	53	90	61	90	235
1	20	1.20.19	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	70	90	80	90	92	90	106	90	122	90	470
1	20	1.20.19	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	7	90	7	90	9	90	10	90	11	90	44
1	20	1.20.19	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	30	Mengikuti	34	Mengikuti	40	Mengikuti	45	Mengikuti	52	Mengikuti	201
1	20	1.20.19	41	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	rata-rata lama perizinan	1-4 hari	1-4 hari	111	1-4 hari	127	1-4 hari	146	1-4 hari	168	1-4 hari	194	1-4 hari	746
1	20	1.20.20	0	Kelurahan Bahaur Basantan				148		168		195		223		257		991
1	20	1.20.20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	99	90	113	90	131	90	150	90	173	90	665
1	20	1.20.20	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	49	90	55	90	64	90	73	90	85	90	326
01	21			Ketahanan Pangan				1.805		2.060		2.380		2.729		3.146		12.120
1	21	1.21.01	0	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan				1.805		2.060		2.380		2.729		3.146		12.120
1	08	1.21.01	22	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	1,04	1,10	15	2,00	17	2,50	20	3,00	23	3,10	26	3,10	101

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	21	1.21.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	331	90	378	90	436	90	500	90	577	90	2.221
1	21	1.21.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	58	90	66	90	76	90	87	90	101	90	388
1	21	1.21.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	10	90	11	90	13	90	15	90	17	90	67
1	21	1.21.01	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan utama	121,70	121,09	385	120,49	440	119,88	508	119,28	582	118,67	671	118,67	2.586
1	21	1.21.01	15		Beras	121,70	121,09	-	120,49	-	119,88	-	119,28	-	118,67	-	118,67	-
1	21	1.21.01	15		Daging	2,57	2,57	-	2,57	-	2,57	-	2,57	-	2,57	-	2,57	-
1	21	1.21.01	15		Telur	9,32	9,32	-	9,32	-	9,32	-	9,32	-	9,32	-	9,32	-
1	21	1.21.01	15		Ikan	33,90	33,90	-	33,90	-	33,90	-	33,90	-	33,90	-	33,90	-
2	01	1.21.01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	60,03	60,03	140	60,45	160	60,85	185	70,10	212	70,10	244	70,10	940
2	01	1.21.01	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	36,05	38,80	40	39,30	46	42,00	53	42,18	60	42,25	70	42,25	269
2	01	1.21.01	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	cakupan teknologi tepat guna bagi petani	100,00	100,00	40	100,00	46	100,00	53	100,00	60	100,00	70	100,00	269
2	01	1.21.01	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Cakupan bina kelompok tani	200,00	200,00	786	200,00	897	200,00	1.037	200,00	1.189	200,00	1.371	200,00	5.280
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				2.500		2.854		3.298		3.781		4.359		16.791
1	22	1.22.01	0	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				2.500		2.854		3.298		3.781		4.359		16.791
1	22	1.22.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	439	90	501	90	579	90	663	90	765	90	2.946
1	22	1.22.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	495	90	565	90	653	90	749	90	863	90	3.325
1	22	1.22.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	80	90	91	90	106	90	121	90	139	90	537
1	22	1.22.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	20	90	23	90	26	90	30	90	35	90	134
1	22	1.22.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	3	90	3	90	4	90	5	90	5	90	20
1	22	1.22.01	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	80,00	80,00	653	80,00	745	80,00	861	80,00	987	80,00	1.139	80,00	4.386
1	22	1.22.01	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang aktif	60,00	70,00	97	75,00	111	80,00	128	85,00	147	90,00	169	90,00	651

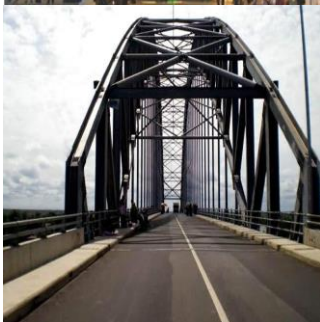
Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	22	1.22.01	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase LPM yang berprestasi	100,00	100,00	135	100,00	154	100,00	178	100,00	204	100,00	235	100,00	907
1	22	1.22.01	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	80,00	80,00	243	80,00	277	80,00	321	80,00	367	80,00	424	80,00	1.632
1	22	1.22.01	19	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	PKK aktif	0,00	8,00	30	8,00	34	8,00	40	8,00	45	8,00	52	8,00	201
1	22	1.22.01	20	Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L)	cakupan PM2L	80,00	80,00	175	80,00	200	80,00	231	80,00	265	80,00	306	80,00	1.178
1	22	1.22.01	21	Program Fasilitas Pembangunan Desa Terpadu	cakupan pembangunan desa terpadu	semua kecamatan	semua kecamatan	130	semua kecamatan	148	semua kecamatan	171	semua kecamatan	197	semua kecamatan	227	semua kecamatan	873
01	23			Kearsipan				1.039		1.186		1.371		1.571		1.812		6.979
1	01	1.26.01	0	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi				1.039		1.186		1.371		1.571		1.812		6.979
1	01	1.26.01	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	2.815,00	7.920,00	300	9.240,00	342	10.560,00	396	11.800,00	454	13.200,00	523	13.200,00	2.015
1	24	1.26.01	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku	13,88	19,44	40	27,77	46	41,66	53	69,44	60	94,44	70	94,44	269
1	26	1.26.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	343	90	392	90	452	90	519	90	598	90	2.304
1	26	1.26.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	104	90	118	90	137	90	157	90	181	90	696
1	26	1.26.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	10	90	11	90	13	90	15	90	17	90	67
1	26	1.26.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	20	90	23	90	26	90	30	90	35	90	134
1	26	1.26.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	13	90	14	90	16	90	19	90	22	90	84
1	26	1.26.01	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	20	Mengikuti	23	Mengikuti	26	Mengikuti	30	Mengikuti	35	Mengikuti	134
1	26	1.26.01	15	Program Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	2.617,00	3.617,00	190	5.117,00	217	7.117,00	251	9.617,00	287	12.117,00	331	12.117,00	1.276
				Urusan pilihan				60.109		68.623		79.285		90.897		104.804		403.717
02	01			Pertanian				23.868		27.249		31.482		36.093		41.615		160.306
2	01	2.01.01	0	Dinas Pertanian dan Peternakan				23.868		27.249		31.482		36.093		41.615		160.306
2	01	2.01.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	1.008	90	1.150	90	1.329	90	1.524	90	1.757	90	6.767
2	01	2.01.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	1.187	90	1.355	90	1.566	90	1.795	90	2.070	90	7.972
2	01	2.01.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	85	90	97	90	112	90	129	90	148	90	571

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
2	01	2.01.01	04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	3	90	3	90	3	90	4	90	4	90	17
2	01	2.01.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	40	90	46	90	53	90	60	90	70	90	269
2	01	2.01.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	25	90	29	90	33	90	38	90	44	90	168
2	01	2.01.01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	60,03	60,03	100	60,45	114	60,85	132	70,10	151	70,10	174	70,10	672
2	01	2.01.01	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)				6.724		7.677		8.870		10.169		11.725		45.164
2	01	2.01.01	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	60,03	60,03	492	60,45	562	60,85	649	70,10	744	70,10	858	70,10	3.306
2	01	2.01.01	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	cakupan teknologi tepat guna bagi petani	80,00		8.332		9.512		10.990		12.599		14.527		55.959
2	01	2.01.01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas :			1.661		1.896		2.190		2.511		2.895		11.153
2	01	2.01.01	19		- Padi (Ku/Ha)	34,50	38,88	-	39,33	-	42,06	-	42,18	-	42,25	-	42,25	-
2	01	2.01.01	19		- Jagung (Ku/Ha)	30,15	31,17	-	31,43	-	31,62	-	31,68	-	31,70	-	31,70	-
2	01	2.01.01	19		- Kedelai (Ku/Ha)	12,10	12,67	-	12,67	-	12,70	-	12,71	-	12,72	-	12,72	-
2	01	2.01.01	19		- Kacang Tanah (Ku/Ha)	11,70	11,71	-	11,72	-	11,73	-	11,74	-	11,77	-	11,77	-
2	01	2.01.01	19		- Kacang Hijau (Ku/Ha)	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
2	01	2.01.01	19		- Ubi Kayu (Ku/Ha)	11,83	118,38	-	118,38	-	118,38	-	118,39	-	118,39	-	118,39	-
2	01	2.01.01	19		- Ubi Jalar (Ku/Ha)	71,07	71,08	-	71,09	-	71,09	-	71,10	-	71,10	-	71,10	-
2	01	2.01.01	19		- Buah-buahan (Ku/Ha)	1,00	11,50	-	11,75	-	11,80	-	11,87	-	11,95	-	11,95	-
2	01	2.01.01	19		- Sayur-sayuran (Ku/Ha)	50,50	50,53	-	51,25	-	53,25	-	54,10	-	55,25	-	55,25	-
2	01	2.01.01	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase ternak sakit yang ditangani	70,00	75,00	168	80,00	192	85,00	222	90,00	254	95,00	293	95,00	1.128
2	01	2.01.01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Populasi :			3.852		4.397		5.081		5.825		6.716		25.870
2	01	2.01.01	22		- Sapi (ekor)	7.104,00	9.062,00	-	10.938,00	-	12.539,00	-	13.793,00	-	14.484,00	-	14.484,00	-
2	01	2.01.01	22		- Itik (ekor)		5.000,00	-	5.500,00	-	6.000,00	-	6.500,00	-	7.000,00	-	7.000,00	-
2	01	2.01.01	22		- Kambing (ekor)	8.883,00	9.771,00	-	10.679,00	-	11.747,00	-	12.900,00	-	14.281,00	-	14.281,00	-
2	01	2.01.01	22		- Ayam Ras (ekor)	785.592,00	864.151,00	-	950.567,00	-	1.045.623,00	-	1.150.186,00	-	1.265.205,00	-	1.265.205,00	-
2	01	2.01.01	22		- Ayam Petelur (ekor)		12.000,00	-	13.000,00	-	14.000,00	-	15.000,00	-	16.000,00	-	16.000,00	-

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
2	01	2.01.01	22		- Ayam Buras (ekor)	288.898,00	317.174,00	-	348.893,00	-	383.783,00	-	422.162,00	-	464.378,00	-	464.378,00	-
2	01	2.01.01	22		- Babi (ekor)	7.815,00	9.181,00	-	10.099,00	-	11.109,00	-	12.220,00	-	13.442,00	-	13.442,00	-
2	01	2.01.01	22		- Kerbau (ekor)	45,00	45,00	-	46,00	-	47,00	-	48,00	-	49,00	-	49,00	-
2	01	2.01.01	24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase lahan termekanisasi (%)	22,10	23,98	192	25,87	219	27,75	253	29,64	290	31,52	335	31,52	1.290
02	02			Kehutanan				14.174		16.182		18.696		21.434		24.714		95.200
2	02	2.02.01	0	Dinas Perkebunan dan Kehutanan				14.174		16.182		18.696		21.434		24.714		95.200
2	02	2.02.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	616	90	703	90	813	90	932	90	1.074	90	4.137
2	02	2.02.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	475	90	542	90	626	90	718	90	827	90	3.187
2	02	2.02.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	61	90	70	90	81	90	93	90	107	90	411
2	02	2.02.01	04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	15	90	17	90	20	90	23	90	26	90	101
2	02	2.02.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	113	90	129	90	149	90	171	90	197	90	761
2	02	2.02.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	49	90	56	90	65	90	74	90	86	90	329
2	02	2.02.01	16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	1,04	1,10	3.800	2,00	4.338	2,50	5.013	3,00	5.747	3,10	6.626	3,10	25.524
2	02	2.02.01	20	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Persentase kerusakan kawasan hutan	0,01	0,01	1.975	0,01	2.255	0,01	2.605	0,01	2.987	0,01	3.444	0,01	13.265
2	02	2.02.01	21	Program Peningkatan Produksi	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	3,48	3,50	7.070	4,10	8.071	4,50	9.325	5,00	10.691	5,10	12.327	5,10	47.485
02	05			Kelautan dan Perikanan				16.436		18.764		21.679		24.854		28.657		110.390
2	05	2.05.01	0	Dinas Kelautan dan Perikanan				16.436		18.764		21.679		24.854		28.657		110.390
2	05	2.05.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	968	90	1.105	90	1.277	90	1.464	90	1.688	90	6.502
2	05	2.05.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	1.834	90	2.094	90	2.420	90	2.774	90	3.199	90	12.321
2	05	2.05.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	75	90	86	90	99	90	113	90	131	90	504
2	05	2.05.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	30	90	34	90	40	90	45	90	52	90	201
2	05	2.05.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	115	90	131	90	152	90	174	90	201	90	772
2	05	2.05.01	15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Produksi Perikanan	20.600,86	22.825,75	525	25.050,64	599	27.275,53	692	29.500,42	794	31.725,33	915	31.725,33	3.526

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
2	05	2.05.01	16	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Cakupan bina kelompok nelayan	27,16	29,16	323	30,11	369	35,29	426	40,11	488	50,19	563	50,19	2.169
2	05	2.05.01	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan kelompok budidaya	12,58	14,67	7.354	15,12	8.396	16,08	9.701	16,91	11.121	17,61	12.823	17,61	49.395
2	05	2.05.01	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan kelompok nelayan	87,44	85,33	3.183	84,88	3.634	83,91	4.198	83,09	4.813	82,32	5.550	82,32	21.378
2	05	2.05.01	24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Cakupan kawasan budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	80,00	80,00	2.028	80,00	2.315	80,00	2.675	80,00	3.067	80,00	3.536	80,00	13.621
02	06			Perdagangan				5.631		6.428		7.427		8.515		9.818		37.820
1	15	2.07.01	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah				5.631		6.428		7.427		8.515		9.818		37.820
1	15	2.07.01	15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	UMKM aktif	4.353,00	4.460,00	100	4.570,00	114	4.680,00	132	4.790,00	151	4.850,00	174	4.850,00	672
1	15	2.07.01	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan bina UMKM	80,00	80,00	185	80,00	211	80,00	244	80,00	280	80,00	323	80,00	1.243
1	15	2.07.01	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	UMKM yang dibina	80,00	80,00	175	80,00	200	80,00	231	80,00	265	80,00	305	80,00	1.175
1	15	2.07.01	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi Aktif	106,00	120,00	120	130,00	137	140,00	158	160,00	181	275,00	209	175,00	806
2	06	2.07.01	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase komoditas perdagangan diawasi peredarannya di pasar	100,00	100,00	55	100,00	63	100,00	73	100,00	83	100,00	96	100,00	369
2	06	2.07.01	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				2.842		3.245		3.749		4.298		4.956		19.090
2	07	2.07.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	450	90	513	90	593	90	680	90	784	90	3.021
2	07	2.07.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	1.103	90	1.259	90	1.455	90	1.668	90	1.923	90	7.407
2	07	2.07.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	48	90	55	90	63	90	73	90	84	90	322
2	07	2.07.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	45	90	51	90	59	90	68	90	78	90	302
2	07	2.07.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	18	90	21	90	24	90	27	90	31	90	121
2	07	2.07.01	07	Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	50	Mengikuti	57	Mengikuti	66	Mengikuti	76	Mengikuti	87	Mengikuti	336
2	07	2.07.01	15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Persentase industri berbasis teknologi	30,00	40,00	90	50,00	103	60,00	119	70,00	136	80,00	157	80,00	604
2	07	2.07.01	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Produktivitas industri kecil dan menengah	80,00	80,00	35	80,00	40	80,00	46	80,00	53	80,00	61	80,00	235
2	07	2.07.01	18	Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan industri	7,00	7,30	216	7,50	247	7,70	285	7,80	327	8,00	377	8,00	1.451

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
2	07	2.07.01	19	Program Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sentra industri	80,00	80,00	99	80,00	113	80,00	131	80,00	150	80,00	173	80,00	665
				TOTAL (Ur. Wajib+ Ur. Pilihan)				400.263		459.650		531.065		608.844		702.001		2.704.180



BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH



RPJMD KABUPATEN
PULANG PISAU
TAHUN 2013-2018

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pulang Pisau periode tahun 2013-2018 dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator *outcome* (hasil) program pembangunan daerah setiap tahun yang diakumulasikan akan membuat kondisi perencanaan yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pulang Pisau periode 2013-2018 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

Pada tabel 9.1 di bawah ini akan ditampilkan mengenai penetapan indikator kinerja daerah. Di tabel 9.1 akan dapat dilihat secara kuantitatif keberhasilan yang dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau periode 2013-2018.

Tabel 9.1

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
I	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1	Pertumbuhan PDRB								
-	Atas Harga Berlaku	%	13,30	13,40	13,45	13,50	13,55	13,60	13,60
-	Atas Harga Konstan	%	7,00	7,10	7,20	7,30	7,40	7,50	7,50
1.2	Laju Inflasi	%							
1.4	Persentase penduduk miskin	%	4,80	4,78	4,75	4,60	4,55	4,50	4,50
1.5	Angka Pengangguran	jiwa	2,20	2,18	2,16	2,14	2,12	2,10	2,10
II	Fokus Kesejahteraan Sosial								
2.1	Pendidikan								
2.1.1	APK SD/SDLB/MI	%	104,14	105,18	106,23	107,29	108,36	108,90	108,90
2.1.2	APK SMP/MTs	%	88,07	89,83	91,62	93,75	95,62	97,53	97,53
2.1.3	APK SMA/SMK/MA	%	58,44	63,11	68,15	73,60	79,48	85,83	85,83
2.1.4	APM SD/SDLB/MI	%	88,02	89,42	90,88	92,33	93,80	95,30	95,30
2.1.5	APM SMP/MTs	%	65,47	69,39	73,55	77,96	82,63	87,58	87,58
2.1.6	APM SMA/SMK/MA	%	40,86	46,37	52,63	59,73	67,79	76,94	76,94
2.2	Kesehatan								
2.2.1	Angka Kematian Bayi	jiwa	209,00	160,00	102,00	101,00	100,00	99,00	99,00
2.2.2	Angka Harapan Hidup	tahun	71,00	71,7	72,00	72,2	72,4	72,6	72,6
2.2.3	Persentase Balita Gizi buruk	%	5,00	30,00	28,00	26,00	24,00	22,00	22,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.4	Angka Kematian Ibu	%	0,05	16,00	15,00	14,00	13,00	12,00	12,00
2.2.5	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (dilaporkan)	Persen	71,00	71,7	72,00	72,2	72,4	72,6	72,6
III	Fokus Budaya dan Olahraga								
3.1	Jumlah Grup Kesenian	buah	24,00	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	28,00
3.2	Jumlah Gedung Olahraga	buah	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3.3	Jumlah Sarana Peribadatan	buah	500,00	530,00	560,00	590,00	620,00	650,00	650,00
ASPEK PELAYANAN UMUM									
I	Fokus Layanan Urusan Wajib								
1.1	Pendidikan								
1.1.1	Pendidikan Dasar								
1.1.1a	Angka partisipasi sekolah SD	persen	880,23	897,80	915,75	934,01	952,68	971,65	971,65
1.1.1b	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dasar	rasio	128,58	128,70	128,82	128,94	129,06	129,18	129,18
1.1.1c	Rasio Guru terhadap murid	rasio	836,27	735,91	647,60	569,88	501,49	441,31	441,31
1.1.1d	Rasio Guru terhadap murid per kelas rata-rata	rasio	83,63	74,43	66,24	58,95	52,46	46,68	46,68
1.1.2	Pendidikan Menengah								
1.1.2a	Angka partisipasi sekolah SMP	persen	654,75	700,58	749,62	802,09	858,23	918,30	918,30
1.1.2b	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah pertama	rasio	68,18	71,58	75,15	78,90	82,84	86,98	86,98
1.1.2c	Rasio Guru terhadap murid	rasio	630,23	661,17	694,25	728,96	765,40	803,67	803,67
1.1.2d	Rasio Guru terhadap murid per kelas rata-rata	rasio	63,02	66,17	69,47	72,94	76,58	80,40	80,40
1.1.2e	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	persen	98,85	98,89	98,93	98,97	99,01	99,05	99,05
1.1.2f	Angka Partisipasi Sekolah SMA	persen	410,18	471,70	542,45	623,81	717,38	824,98	824,98

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2g	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah atas	Rasio	39,62	40,80	42,02	43,28	44,57	45,90	45,90
1.1.2h	Rasio guru terhadap murid	Rasio	662,83	583,29	513,29	451,69	397,48	349,78	349,78
1.1.2i	Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata	Rasio	66,28	57,99	50,74	44,39	38,84	33,98	33,98
1.1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								
1.1.3a	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	persen	43,43	46,90	51,12	60,32	65,74	71,65	71,65
1.1.4	Angka Putus Sekolah								
1.1.4a	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	persen	0,41	0,38	0,36	0,34	0,32	0,30	0,30
1.1.4b	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	persen	0,74	0,70	0,66	0,62	0,58	0,55	0,55
1.1.4c	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	persen	0,85	0,80	0,76	0,72	0,68	0,64	0,64
1.1.4d	penurunan angka putus sekolah	persen	-						
1.1.5	Angka Kelulusan								
1.1.5a	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	persen	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.5b	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	persen	99,96	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.5c	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	persen	99,87	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Angka melanjutkan sekolah								
1.1.5d	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	persen	90,85	92,66	94,51	96,40	98,32	99,70	99,70
1.1.5e	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	persen	83,46	86,38	89,40	92,52	95,75	99,45	99,45
1.1.5f	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	orang	77,72	84,71	92,33	96,94	98,87	99,85	99,85
1.2	Kesehatan								
1.2.1	Rasio Posyandu per satuan balita	rasio	1,7	1,75	1,8	1,85	1,90	1,95	1,95
1.2.2	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	rasio	0,8	0,92	0,96	1,00	1,04	1,08	1,08

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	rasio	0,7	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1.2.4	Rasio dokter persatuan penduduk	rasio	17,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	24,00
1.2.5	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	rasio	125,00	135,00	140,00	145,00	150,00	155,00	155,00
1.2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen	75,00	75,00	80,00	82,5	85,00	87,5	87,5
1.2.7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	90,00	90,00	90,00	92,5	92,5	95,00	95,00
1.2.8	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	persen	55,00	60,00	62,5	65,00	67,5	70,00	70,00
1.2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.12	Cakupan puskesmas	persen	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	162,5	162,5
1.2.13	Cakupan Puskesmas Pembantu	persen	75,00	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00	84,00
1.2.14	Cakupan kunjungan bayi	persen	70,00	90,00	90,00	92,5	92,5	95,00	95,00
1.2.15	Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3	Pekerjaan Umum								
1.3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	65,00	68	72,00	75,00	78	75,00	75,00
1.3.2	Rasio Jaringan Irigasi	rasio	0,64	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1.3.3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	rasio		72,60	86,18	102,30	144,15	144,15	144,15
1.3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	persen	51,56	1,12	1,52	2,05	3,75	3,75	3,75

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.5	Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk	rasio		17.886,00	15.886,00	13.886,00	11.886,00	9.886,00	9.886,00
1.3.6	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	rasio		0,40	0,40	0,55	0,65	0,70	0,70
1.3.7	Rasio Rumah Layak Huni	rasio	0,83	9,06	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Rasio Permukiman Layak Huni	rasio	0,30	9,58	7,88	6,48	4,39	4,39	4,39
1.3.9	Panjang Jalan dilalui roda empat	rasio	0,65	74,88	82,19	90,21	100,00	100,00	100,00
1.3.10	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	persen	-	56,68	55,42	54,19	51,81	51,81	51,81
1.3.11	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	persen	65,00	67,00	69,00	71,00	73,00	75,00	75,00
1.3.12	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	persen	3,50	-	-	-	-	-	-
1.3.13	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	persen	-	-	-	-	-	-	-
1.3.14	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	persen	-	-	-	-	-	-	-
1.3.15	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	persen	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	13,00
1.3.16	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kabupaten	persen	-	-	-	-	-	-	-
1.3.17	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	54,00	-	-	-	-	-	-
1.3.18	Lingkungan Pemukiman	Persen	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Perumahan			-	-	-	-	-	-
1.4.1	Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih	Persen	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Perencanaan Pembangunan								

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.6.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.6.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.6.4	Persentase keselarasan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.7	Perhubungan								
1.7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	jumlah	1.400,00	4.257,00	5.000,00	5.240,00	5.782,00	6.201,00	6.201,00
1.7.2	Rasio ijin trayek	rasio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	Jumlah uji kir angkutan umum	jumlah	489,00	202,00	212,00	225,00	339,00	542,00	542,00
1.7.4	Jumlah terminal angkutan umum	jumlah	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.7.5	Jumlah angkutan darat	jumlah	175,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.7.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	0,17	0,10	0,12	0,15	0,27	0,30	
1.7.7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
1.7.8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Harga (Rp)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.7.9	Pemasangan rambu-rambu	Unit	0,00	120,00	136,00	148,00	100,00	205,00	205,00
1.8	Lingkungan Hidup								
1.8.1	Persentase penanganan sampah	persen	16,40	35,00	45,00	50,00	60,00	70,00	70,00
1.8.2	Persentase penduduk berakses air minum	persen	32,40	35,00	45,00	50,00	60,00	70,00	70,00
1.8.3	Persentase Luas pemukiman yang tertata	persen	-						
1.8.4	Pencemaran status mutu air	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8.5	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	persen	-						
1.8.6	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	persen	50,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
1.8.7	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal	persen	65,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
1.8.8	Penegakan hukum lingkungan	Persen	-						
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil								
1.10.1	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	Persen	74,00	80,00	85,00	90,00	95,00	99,00	99,00
1.10.2	Persentase bayi berakte kelahiran	Persen	53,00	65,00	70,00	80,00	95,00	99,00	99,00
1.10.3	pasangan berakte nikah	Pasang	83,00	88,00	90,00	93,00	96,00	99,00	99,00
1.10.4	Persentase kepemilikan KTP	Persen	55,00	65,00	70,00	80,00	95,00	99,00	99,00
1.10.5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Persen	25,00	40,00	60,00	75,00	85,00	90,00	90,00
1.10.6	Ketersediaan database kependudukan skala propinsi	ada/tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
1.10.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak								
1.11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	5,00	5,10	5,10	5,50	6,00	6,50	6,50
1.11.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	95,00	94,90	94,90	94,50	94,00	93,50	93,50
1.11.3	Rasio KDRT	Rasio	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1.11.4	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (Dinsostran)	Persen	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
1.11.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	30,00	31,00	33,00	34,00	35,00	36,00	36,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	persen	80,00	80,00	82,00	82,00	85,00	85,00	85,00
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera								
1.12.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	rata-rata	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.12.2	Persentase Akseptor KB	persen	82,49	82,50	82,55	82,55	82,60	82,60	82,60
1.12.3	Cakupan peserta KB aktif	persen	80,27	80,50	81,00	81,00	81,50	81,50	81,50
1.12.4	Persentase keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	persen	37,00	36,50	36,30	36,30	36,20	36,20	35,00
1.12.5	Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	persen	12,00	12,00	11,50	11,50	11,00	11,00	11,00
1.12.6	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif	persen	80,27	80,50	81,00	81,00	81,50	81,50	81,50
1.12.7	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet need)	Persen	20,02	14,10	14,00	14,00	14,00	13,80	13,80
1.12.8	Cakupan bina keluarga balita (BKB) ber KB)	Persen	98,94	98,94	78,05	78,05	78,10	78,10	78,10
1.12.9	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB	Persen	90,91	90,91	90,95	91,00	91,20	91,50	91,50
1.12.10	Cakupan PLKB/PKB di setiap desa/kelurahan	Persen	16,70	16,70	14,00	14,00	10,00	10,00	10,00
1.12.11	Keluarga pra sejahtera dan KS I	Persen	23,00	24,00	24,00	25,00	30,00	30,00	30,00
1.12.12	Cakupan PPKBD di setiap desa/kelurahan	persen	1,04	1,04	1,04	1,03	1,01	1,01	1,01
1.12.13	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	persen	95,96	98,99	98,99	99,00	99,00	99,00	99,00
1.13	Sosial								
1.13.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi	jumlah	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.13.2	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	orang	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00
1.13.3	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	persen							
1.14	Ketenagakerjaan								
1.14.1	Angka Partisipasi angkatan kerja	jiwa	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	76,00
1.14.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	angka	8,30	8,33	8,00	7,69	7,40	7,14	7,14
1.14.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen		0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,50
1.14.4	Pencari kerja yang ditempatkan	Persen	13,50	13,00	13,00	14,00	14,00	15,00	15,00
1.14.5	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2,59	2,50	2,40	2,30	2,20	2,10	2,10
1.14.6	Persentase keselamatan dan perlindungan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.14.7	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
1.15.1	Persentase koperasi aktif	persen							
1.17	Kebudayaan								
1.17.1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	jumlah	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.17.2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	jumlah	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.17.3	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	persen	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79
1.18	Kepemudaan dan Olahraga								
1.18.1	Jumlah organisasi pemuda	jumlah	40,00	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00	45,00
1.18.2	Jumlah Orgasnisasi olahraga	jumlah	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00
1.18.3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	jumlah	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	9,00

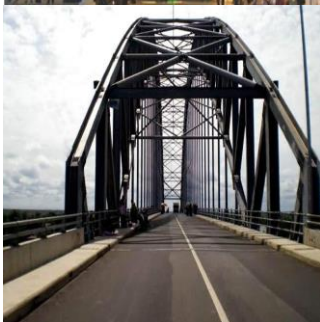
No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.18.4	Jumlah Kegiatan Olahraga	jumlah	7,00	10,00	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00
1.18.5	Gelanggang/balai remaja	jumlah	0,84	0,86	0,87	0,87	0,87	0,88	0,88
1.18.6	Lapangan Olahraga	Jumlah							
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
1.19.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP	jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
1.19.2	Kegiatan pembinaan politik daerah	jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.20.1	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	Rasio	2,29	2,30	2,30	2,30	2,30	2,40	2,40
1.20.7	Persentase penegakan PERDA	persen	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	95,00	95,00
1.20.8	Cakupan patrol petugas Satpol PP	jumlah	39,00	39,00	64,00	75,00	90,00	100,00	100,00
1.20.9	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketrentaman, keindahan) di kabupaten	persen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.20.10	Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten	persen							
1.20.11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	persen	3 Kecamatan	4 Kecamatan	5 Kecamatan	6 kecamatan	7 Kecamatan	8 Kecamatan	8 Kecamatan
1.20.12	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (wmk)	persen	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.1 3	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	persen							
1.20.1 4	Sistem Informasi Manajemen Pemda	jumlah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.20.1 5	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada/tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
1.21	Ketahanan Pangan								
1.21.1	Regulasi Ketahanan Pangan	Ada/tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
1.21.2	Ketersediaan pangan utama								
	Beras	persen	121,70	121,09	120,49	119,88	119,28	118,67	118,67
	Daging	persen	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
	Telur	persen	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32
	Ikan	persen	33,90	33,90	33,90	33,90	33,90	33,90	33,90
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1.22.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	rata-rata	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
1.22.2	Rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK	rata-rata	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
1.22.3	Jumlah LSM yang aktif	jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.22.4	LPM berprestasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.22.5	Persentase PKK aktif	persen	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
1.22.6	Persentase posyandu aktif	persen	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
1.23	Statistik								
1.23.1	Buku Kabupaten Dalam Angka	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.23.2	Buku PDRB Kabupaten	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.24	Kearsipan								
1.24.1	Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku	persen	13,88	19,44	27,77	41,66	69,44	94,44	94,44
1.24.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	jumlah kegiatan	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	6,00
1.26	Perpustakaan								
1.26.1	Jumlah perpustakaan	buah	40,00	43,00	46,00	49,00	52,00	55,00	55,00
1.26.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	2.815,00	7.920,00	9.240,00	10.560,00	11.800,00	13.200,00	13.200,00
1.26.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	jumlah buku	2.617,00	3.617,00	5.117,00	7.117,00	9.617,00	12.117,00	12.117,00
2,00	Fokus Layanan Urusan Pilihan								
2.1	Pertanian								
2.1.1	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	kuintal per hektar	36,05	38,80	39,30	42,00	42,18	42,25	42,25
2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	persen	60,03	60,03	60,45	60,85	70,10	70,10	70,10
2.1.3	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	persen	25,03	21,50	21,70	21,75	22,00	22,10	22,10
2.1.4	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	persen	17,21	17,60	17,80	18,02	18,65	19,55	19,55
2.1.5	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	persen	25,03	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	25,00
2.1.5	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	persen	25,03	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	25,00
2.2	Kehutanan								

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	persen	1,04	1,10	2,00	2,50	3,00	3,10	3,10
2.2.2	Persentase kerusakan kawasan hutan	persen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2.2.3	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	persen	3,48	3,50	4,10	4,50	5,00	5,10	5,10
2.3	Energi dan Sumberdaya Mineral								
2.3.1	Persentase pertambangan tanpa izin	persen	12,50	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	45,00
2.3.2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	persen	0,01	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	18,00
2.4	Pariwisata								
2.4.1	Kunjungan wisata	Persen		1,55	1,50	1,43	1,41	1,37	1,37
2.4.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Kelautan dan Perikanan								
2.5.1	Produksi Perikanan	ton per tahun	20.600,86	22.825,75	25.050,64	27.275,53	29.500,42	31.725,33	31.725,33
2.5.2	Konsumsi ikan	Kg/kapita/thn	35,96	37,98	39,11	40,29	41,50	42,74	42,74
2.5.3	Cakupan bina kelompok nelayan	persen	27,16	29,16	30,11	35,29	40,11	50,19	50,19
2.5.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	persen	87,44	85,33	84,88	83,91	83,09	82,32	82,32
2.5.5	Produksi perikanan kelompok budidaya	persen	12,58	14,67	15,12	16,08	16,91	17,61	17,61
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
2.00	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
2.1	Perhubungan								
2.2.1	Ketaatan terhadap RTRW	persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4	Lingkungan Hidup								

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.1	Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih	persen	2.243,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00
3.	Fokus Iklim Berinvestasi								
3.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
3.1.2	Jumlah demo	kali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Lama proses perizinan	hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari
3.1.6	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	Persen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4.	Fokus Sumber Daya Manusia								
4.1.	Ketenagakerjaan								
4.1.1	Rasio lulusan S1/S2/S3	rasio	42,20	46,40	50,60	54,80	59,10	63,30	63,30
4.1.2	Rasio ketergantungan	rasio	43,00	47,00	52,00	56,00	60,00	65,00	65,00



BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN



RPJMD KABUPATEN
PULANG PISAU
TAHUN 2013-2018

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk menjaga dan mengendalikan pemanfaatan RPJMD serta konsistensi dokumen-dokumen perencanaan lain dan penganggaran dengan RPJMD, diperlukan kerjasama semua pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi implementasi RPJMD secara reguler dan periodik. Hal ini berkaitan dengan pentingnya pengawasan internal dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Keberhasilan pembangunan harus mensinergikan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau untuk bersama-sama berpikir, bertindak dan mendukung pelaksanaan dan implementasi rencana pembangunan daerah dengan segala kemampuan yang dimiliki, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat.

10.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah setelah RPJMD ini berakhir, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2019 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD sesuai periode/tahapan berkenaan. Penyusunan RKPD Tahun 2019 tersebut, berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Pulang Pisau serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 sebagai produk bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulang

Pisau merupakan pernyataan tentang keadaan dan tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Oleh karena itu RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 harus menjadi pedoman dan arah kebijakan dalam menjalankan pemerintahan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
2. Seluruh SKPD di Kabupaten Pulang Pisau berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Pulang Pisau Tahun 2013-2018. Renstra SKPD tersebut nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Pulang Pisau serta menjamin konsistensinya.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, Pemerintah Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya.
4. Evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Kinerja pembangunan daerah akan diukur berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPJMD ini.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra SKPD Tahun 2013-2018.

6. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau, maka kinerja setiap program dan kegiatan harus dipublikasikan dan melibatkan aspirasi masyarakat secara luas.

Demikian Dokumen RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 ini disusun, dan dengan memohon ridha Tuhan yang Maha Esa serta dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan RPJM Daerah ini maka telah melahirkan komitmen bersama antara eksekutif, DPRD, dunia usaha dan dukungan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pulang Pisau untuk mencapai **“Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau yang Damai, Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera”**.